



DENNY J.A.
Kolom Di Majalah Gatra

Politik *yang* Mencari Bentuk

Editor:
Fransiskus Surdiasis

LKIS

Sanksi Pelanggaran Pasal 44
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Limapuluh Juta Rupiah)

DENNY J.A
Kolom di Majalah Gatra

**POLITIK YANG
MENCARI BENTUK**

Denny J.A

Kolom di Majalah Gatra

Politik yang Mencari Bentuk

Denny J. A

© Denny J.A

xii + 198 halaman: 14,5 x 21 cm

1. Ilmu Politik
2. ISBN : 979-25-5232-4

Editor : Fransisku surdiasi

Rancang sampul : Imam syahirul Alim

Setting/Layout : Santo

Penerbit

LKIS Yogyakarta

Salakan Baru No.1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Tlp. (0274) 387194 / 7472110

Faks. (0274) 417762

Cetakan I : Agustus 2006

*Untuk Tiga Matahari:
Mulia Jayaputri Istriku,
Rafi dan Ramy Anakku*

PENGANTAR

MEDEKATI akhir 80-an dan awal 90-an, politik Indonesia digairahkan dengan isu keterbukaan politik. Aspirasi perlunya keterbukaan politik ke arah sistem politik yang demokratis meluas di lingkungan elit terutama di luar birokrasi pemerintahan.

Namun isu keterbukaan politik di bawah rezim Orde Baru itu berkembang mirip politik gelang karet. Kadang ditarik mengembang, kadang ditarik mengecil sesuai dengan lebar-sempit ruang politik yang diinginkan rezim yang berkuasa.

Pada periode pertengahan tahun 1990-an, perkembangan politik melahirkan sikap pesimisme di satu sisi dan optimisme di sisi lain. Pesimisme lahir dari kenyataan merosotnya kualitas kehidupan politik yang berpuncak pada tindakan represif pemerintah dalam kasus 27 Juli 1996.

Di sisi lain optimisme muncul karena ternyata tindakan represif tersebut tidak serta merta mematikan semangat perlawanan terhadap rezim Orde Baru dengan Soeharto sebagai pusatnya. Menyusul peristiwa 27 Juli itu, PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri terus melakukan perlawanan. Tokoh lain, Sri Bintang Pamungkas melakukan perlawanan dengan mendirikan partai baru yang jelas tidak sesuai dengan format politik saat itu.

Tahun-tahun menjelang dan awal reformasi adalah periode yang cair, di mana politik Indonesia tengah mencari bentuknya. Banyak ide perubahan dan eksperimen inovasi politik dilakukan guna mencari format politik yang sesuai. Di tengah dinamika politik seperti itulah tulisan-tulisan Denny JA ini lahir, di tengah kesibukan perkuliahannya di Amerika Serikat. Itulah sebabnya kumpulan tulisan ini diberi judul: Politik Yang Mencari Bentuk.

Sebagian besar tulisan-tulisan ini bisa dipandang sebagai sebuah sintesa antara situasi dan kebutuhan reformasi politik di Indonesia saat itu dengan dinamika dan perkembangan yang berlangsung

di Amerika Serikat dan dunia umumnya. Penulis mencoba mendialogkan situasi Indonesia di satu sisi, dan perkembangan di negara lain di sisi yang satu.

Tulisan-tulisan Denny J.A, terutama di bagian pertama dan keempat buku ini merupakan sumbangan dan respons atas gairah politik pada periode akhir kekuasaan Soeharto itu. Melalui aneka peristiwa dan isu politik, baik yang terjadi di Tanah Air maupun di negeri lain, penulis mencoba menawarkan sejumlah proposal visi ke arah perubahan dan inovasi politik.

Banyak pemikiran, ide, dan usulan yang dikandung dalam tulisan-tulisan ini kemudian, di era reformasi, menjadi bagian dari praktek politik. Di tahun 1996 misalnya, penulis, merujuk pada pengalaman Pemilu 1996 di AS, sudah mengingatkan tentang perlunya mengatur sumbangan uang untuk partai politik.

Di tahun yang sama, penulis juga sudah mengusulkan perlunya politik Indonesia mengadopsi debat publik sebagai salah satu mekanisme untuk memperkuat kualitas proses politik, terutama dalam konteks pemilihan presiden. Pada pemilu 2004, praktek ini sudah menjadi paket dari proses Pemilu Presiden. Fakta-fakta ini sekadar ilustrasi tentang visi perubahan yang dimiliki penulis.

Buku yang sekarang ada di tangan Anda ini adalah kumpulan 48 artikel penulis yang dimuat di Majalah Berita Mingguan Gatra selama periode 1995 hingga 2005.

Guna memudahkan pembaca, artikel-artikel tersebut dikelompokkan ke dalam empat bagian.

Bagian Pertama: Mencari Model ke Arah Perubahan merupakan tempat bagi artikel-artikel yang menawarkan visi tentang demokrasi dan aneka inovasi serta aturan main politik yang diperlukan guna meningkatkan kualitas kehidupan politik Indonesia. Artikel pada bagian ini terutama ditulis pada periode sebelum reformasi: 1995, 1996, dan 1997.

Bagian Kedua: Melewati Transisi Politik, merupakan tempat artikel-artikel yang merekam isu politik dan perkembangan di era awal reformasi. Periode ini ditandai oleh ikhtiar Idea sebagai sebuah bangsa untuk membangun sebuah ruang politik yang baru, ditengah belum tercapainya sejumlah konsensus dasar.

Bagian Ketiga: Membangun Institusi Politik, merupakan tempat bagi artikel-artikel yang mengkritisi dan menyoroti kinerja kelembagaan seperti DPR, partai politik, dan eksekutif. Sikap kritis ini disertai sejumlah catatan perbaikan yang diperlukan guna membenahi pranata politik kita.

Bagian Terakhir merupakan tempat bagi artikel-artikel yang lebih merupakan potret atau rekaman atas sejumlah isu dan perkembangan politik, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Selain sebuah upaya menyatukan kembali respons intelektual penulis atas aneka isu dan wacana politik, buku ini merupakan sumbangan bagi upaya tak pernah henti guna membangun demokrasi Indonesia. Ada banyak isu yang dibahas dalam buku ini masih merupakan pekerjaan rumah pembangunan demokrasi kita untuk hari ini.

Terima kasih kepada banyak pihak, terutama kepada Majalah Berita Mingguan Gatra, yang memberi kesempatan kepada penulis untuk ikut mewarnai pembangunan politik Indonesia.

Akhirnya, Selamat Membaca!

Jakarta, Agustus 2006

Fransiskus Surdiasis

Editor

DAFTAR ISI

Pengantar v

Daftar Isi viii

Mencari Model ke Arah Perubahan

- Bukan Sipil, Bukan Militer * 3
- Mencari Visi * 6
- Tokoh 1995 * 10
- Kolumnis Politik * H
- Politik Megawati *18
- Iklan Politik * 22
- Prospek Demokrasi * 26
- Debat Politik * 30
- Reformasi * 34
- Uang dan Politik * 38
- Politik 1996 * 42
- Fleksibel? * 46
- Konflik Kepentingan * 49

Melewati Transisi Politik

- ABRI di Era Baru * 55
- Manajer Reformasi * 59

- ABRI Perubahan Ideologi * 62
- Habibie Berburu Singa, Ditelan Singa * 65
- Bondan Gunawan: Percikan Gunung Es * 69
- Polarisasi Konservatif vs. Progresif * 72
- Presidensialisme: Tapi Kabinet Jatuh Bangun * 76
- Megawati: Riding the Tiger * 80
- Gejolak Politik 2003 * 87
- Kontroversi Calon Presiden * 91
- Warna-warni Pilkada * 95

Membangun Institusi Politik

- Perlunya Partai Dominan * 101
- Partai Islam * 105
- Prospek Golkar * 109
- Koalisi Partai: Dua Ganjalan Besar * 113
- Kemenangan Partai Terbuka * 116
- Etika Warga: Bukan Urusan MPR * 119
- Anggota DPR: The Untouchables * 123
- Guncangan internal PDIP * 127
- Anggota DPR, Kerja Sambilan * 131
- Politik Brutus Wakil Presiden * 135
- Pertanggungjawaban Presiden * 139

- Potret Politik SBY-JK * 143

Menimba Pelajaran dari Luar

- Agama dan Politik * 151
- Kerusuhan *155
- Ekspor Demokrasi *158
- Politik Orang Kaya * 162
- Primordialisme Amerika * 166
- Kepentingan Publik * 170
- Jiang Zemin dan Amerika Serikat * 174
- Krisis Asia * 178
- Kelemahan IMF * 183
- Perhatian Amerika Serikat * 186
- The Habibie Center: Mana Visinya * 190

Sumber Naskah

Daftar Buku Denny J.A

**MENCARI MODEL KEARAH
PERUBAHAN**

Bukan Sipil, Bukan Militer

PARA praktisi, ujar Howard Raiffa (*Decision Analysis*, 1968), acapkali melakukan kekeliruan yang khas: memecahkan masalah yang salah. Dalam public policy, kesalahan ini dinamakan the error of the third type. Walau jawaban yang diberikan benar, problem tetap tidak terpecahkan karena pertanyaan yang diajukan ternyata salah.

Pertanyaan yang berbunyi “Apakah presiden mendarat sebaiknya dari sipil atau militer” dapat dikategorikan ke dalam the error of the third type. Jawabannya tidak memecahkan satu problem politik yang penting di Tanah Air. Tidak juga problem hubungan sipil-militer.

Kendati begitu, isu sipil-militer terus timbul tenggelam. Jenderal (Purnawirawan) Soemitro dan Arief Budiman memilih presiden dari sipil. Respons pun meluas. Ketika isi itu reda, Sudomo memunculkannya lagi. Presiden mengharap wakil presiden yang akan datang dari kalangan sipil.

Karl Popper dapat menjelaskan kesalahan ini lebih filosofis dari sisi sejarah pemikiran politik. Dari Plato hingga Karl Marx, ujarnya, pertanyaan fundamental dalam politik yang selalu diajukan adalah: siapa yang seharusnya memerintah?

Plato membagi sistem pemerintahan berdasarkan pertanyaan itu dari segi jumlah yang memerintah. Jika yang memerintah terpusat di tangan satu orang, ia menamakannya monarki. Bentuk terburuk dari monarki adalah dram. Jika yang memerintah itu sejumlah orang, ia menamakannya aristokrasi. Bentuk terburuk dari aristokrasi adalah oligarki.

Jika yang memerintah adalah rakyat kebanyakan, ia menamakannya demokrasi. Karena mayoritas cenderung berbuat kerusuhan, ujar Plato, maka demokrasi memburukkan dirinya sendiri. Setelah menguraikan tipe pemerintahan, yang seharusnya memerintah, ujar Plato, adalah yang sedikit dan terbaik. Mereka adalah kaum aristokrasi yang berkualitas the philosopher kings.

Banyak pemikir yang tidak menyetujui jawaban Plato, namun mereka tetap mengajukan pertanyaan yang sama: siapa yang seharusnya memerintah? Marx menjawab: kaum buruh. Khomeini menjawab: para ulama. Galbraith memilih kaum teknokrat. Peter Drucker menunjuk kelompok manajer. Di tanah air, sebagian dari kita menjawab: kaum sipil, sedangkan sebagian lagi berseru: sebaiknya dari militer.

Bukankah siapa pun yang memerintah selalu mempunyai kemungkinan salah, tanya Karl Popper. Bahkan sistem demokrasi yang berlandaskan suara mayoritas yang dihasilkan pemilihan umum dapat memilih seorang diktator. Hitler terpilih secara demokratis di Jerman dan menyulut perang dunia II.

Teori yang baru, kata Popper lebih lanjut, harus mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bukan lagi "siapa yang seharusnya memerintah", melainkan "bagaimana menciptakan sistem sehingga pemimpin yang membuat kesalahan dapat dikoreksi dan diturunkan

dari jabatannya secara terlembaga dan tanpa kekerasan". Mekanisme seperti ini dapat menghindari kemungkinan sang pemimpin membuat kesalahan yang lebih besar.

Siapa pun yang berkuasa tidak lagi menjadi problem sejauh ia dapat dikoreksi. Apakah ia ilmuwan atau praktisi, buruh atau pengusaha, ulama atau seniman, sipil atau militer. Debat presiden sipil atau militer menjadi tidak relevan dalam kerangka pandangan Karl Popper ini.

Tetapi sebuah lagu yang baik memerlukan penyanyi yang merdu. Hanya kombinasi itu yang membuat sebuah nyanyian mengalun indah di telinga pendengar. Karl Popper yang ingin keluar dari pertanyaan "siapa yang seharusnya memerintah " mungkin terlalu ekstrem. Tipe dan karakteristik pemimpin tetap penting, walau tingkat kepentingannya berada di belakang pembentukan sistem yang self correcting,

Sungguh pun sistem yang diutamakan, tipe dan karakter kepemimpinan tetap tidak pernah menjadi unsur yang dapat diabaikan. Ia dapat mengejawantahkan sistem secara benar, bahkan lebih baik, atau justru dapat merusaknya.

Sistem demokrasi, sebagai misal, hanya dapat bertahan lama jika si pemimpin meyakinkannya dan hidup dalam budayanya. Para founding fathers kita sudah bicara mengenai pentingnya spirit penyelenggara pemerintahan. Fukuyama juga berbicara tentang pentingnya "dunia ide" yang diyakini pemimpin. Terlebih lagi dalam sistem yang belum sepenuhnya terinstitusionalisasi seperti di dunia ketiga, peran pemimpin cukup besar.

Dari perspektif demokrasi, isu calon presiden di Tanah Air hams diubah. Bukan lagi sipil atau militer, melainkan demokrat atau bukan. Sistem demokrasi membutuhkan pemimpin demokrat. Sedangkan baik sipil maupun militer bisa demokrat, bisa juga tidak.

Mencari Visi

MUNGKINKAH ICMI berkembang seperti The Heritage Foundation? Pertanyaan ini muncul setelah merenungkan kemungkinan peran yang akan dimainkan ICMI di masa datang. Lima tahun pertama sudah dilalui. Pengurus baru 1995-2000 sudah terbentuk. Peraturan yang ada tidak memungkinkan lembaga ini berkembang menjadi partai politik. Menjadi LSM, yang terlibat secara praktis dalam pengembangan masyarakat, juga bukan pilihan, seperti dinyatakan Adi Sasono dalam majalah Gatra, edisi 9 Desember 1995.

Peran ICMI, kata Adi Sasono, berada pada level pemikiran dan rekomendasi kebijaksanaan yang bersifat makro. Kegiatan yang dilakukannya bersifat kajian dan keilmuan, seperti seminar profesi yang bertujuan untuk melakukan reformasi dalam skala nasional.

Jika harapan Adi Sasono ini menjadi kenyataan, model yang patut dipelajari adalah The Heritage Foundation. Lembaga ini bermarkas di Washington, D.C., didirikan pada 1973, dan telah banyak melahirkan

studi kebijaksanaan. Sebagai dapur pemikiran (think tank), ia sangat berpengaruh dalam kehidupan publik di Amerika Serikat.

Besarnya pengaruh The Heritage Foundation dapat dilihat dari beberapa ukuran. Ia memiliki dan membina jaringan dengan 2.000 akademisi terkemuka dan ratusan policy research groups, sudah menerbitkan sekitar 1.000 dokumen — mulai dari yang berhalaman di atas 1.000 sampai yang hanya belasan halaman -mempublikasikan berbagai penerbitan, mulai dari yang mingguan (Backgrounder), bulanan (Insider Newsletter), & jurnal akademis quarterly (Policy Review) serta Monografi. Aksesnya langsung ke pengambil kebijaksanaan tertinggi mulai dari presiden, anggota Kongres, sampai pemimpin partai.

Kerja lembaga ini sangat serius. Pada 1988, misalnya, ia menyiapkan tiga volume agenda masa depan dalam era pasca Reagan. Sebanyak 238 agenda ia siapkan dalam program operasional dan dapat dicapai. Agenda itu meliputi masalah tenaga kerja (Plan 28: Mempromosikan Kesempatan Kerja dengan Mereformasi Upah Minimum), masalah transfer teknologi (Plan 120: Membatasi Transfer Teknologi Barat ke Blok Soviet), sampai masalah bantuan dunia ketiga (Plan 173: Mempromosikan Pertumbuhan Sektor Swasta Dunia Kedua sebagai Syarat Bantuan Dana).

Namun yang membuat lembaga ini begitu bergema adalah visi yang ditawarkannya. Berbagai kebijaksanaan yang ditangani, yang sangat beragam itu, tetap terkait dalam sebuah platform yang jelas: conservatism. Sejak berdiri, lembaga ini sudah mencanangkan berjuang untuk mempopulerkan prinsip pasar bebas, pemerintahan yang terbatas, kebebasan individu, dan pertahanan nasional yang kuat. Apa pun jenis kebijaksanaan yang ia tangani adalah operasionalisasi dari conservatism. Ia tetap konsisten sejak ideologi tersebut tidak populer pada 1970-an sampai menjadi dominan dan mainstream pada 1980-an dan 1990-an.

ICMI potensial tumbuh dan berkembang seperti The Heritage Foundation. ICMI juga memiliki dan dapat terus meningkatkan berbagai tenaga ahli, akses ke pengambil

kebijaksanaan dan sarana publikasi. Namun satu hal penting yang belum dimiliki ICMI adalah visi. Dapat dikatakan, ICMI belum secara serius dan menyeluruh merumuskan visi organisasinya.

Masih belum jelas visi ICMI mengenai ekonomi, politik, kebudayaan, dan hubungan internasional. Dalam bidang ekonomi, misalnya, apakah ICMI pro-market sebagaimana layaknya para ekonom neoklasik? Ataukah ICMI lebih pro kepada peran pemerintah yang besar, baik untuk redistribusi kesejahteraan maupun proteksi industri dalam negeri? Ataukah ICMI memiliki konsep ekonomi sendiri yang berdasarkan ajaran Islam? Memang sudah dikatakan bahwa agenda ICMI yang utama adalah menghapuskan kesenjangan. Tetapi bagaimana visi penghapusan kesenjangan itu, karena setiap visi akan memiliki persepsi dan memberi rekomendasi yang berbeda?

Di bidang politik, apakah ICMI pro-demokrasi ala Barat? Ataukah ia menganggap sistem politik yang berlaku sekarang adalah bentuk yang final? Ataukah ICMI memiliki gagasan demokrasi yang lain sama sekali? Lalu bagaimana memformulasikan pilihan visi itu ke tahap operasional untuk merespons situasi yang aktual? Bagaimana pula mengaitkan ajaran Islam? Dengan atau tanpa menyinggung ajaran formal Islam, apakah warna sebuah policy akan berbeda?

Setiap pemimpin di ICMI botch jadi sudah punya sikap atas pertanyaan di atas. Namun, sebagai sebuah organisasi, kita belum mendengar adanya platform yang operasional, yang disepakati bersama, dan diumumkan secara publik.

Tanpa kejelasan visi organisasi, berbagai rekomendasi dan studi kebijaksanaan dari ICMI hanya akan bersifat ad hoc, dan sangat tergantung pribadi yang sedang bertugas di bidang itu. Akibatnya, dalam jangka panjang, boleh jadi satu rekomendasi akan bertentangan dengan rekomendasi yang lain. Atau perubahan

personal dalam organisasi akan mengakibatkan perubahan warna policy-nya pula. Lebih mendasar dari itu, ICMI hanya akan besar dalam ukuran fisik keorganisasian, tetapi tidak dalam kejelasan dan relevansi visinya. Duet baru, Habibie-Adi Sasono, tentu menyadari hal ini.

Tokoh 1995

PUNYAKAH kita tokoh seperti Newt Gingrich di Tanah Air? Ia dinobatkan Majalah Time sebagai “Man of the Years” 1995. Lebih dari pemimpin lainnya, demikian tulis Majalah Time, ia mengubah kosakata dan spirit politik Amerika. Punya kah kita tokoh yang berpotensi mengubah kosakata dan spirit politik Indonesia?

Melalui bukunya, *To Renew America* yang terbit tahun 1995, ia berbicara kepada publik luas. Peradaban Amerika, ujar Gingrich dalam buku itu, kini tengah mengalami krisis. Di satu sisi, Amerika adalah satu-satunya superpower dunia yang menyatukan kekuatan ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan sekaligus dalam tangannya. Penduduknya sangat beragam dengan aneka kultur, agama, status ekonomi, ataupun motivasi. Namun negeri ini mampu memberikan kemungkinan bagi semua warganya untuk mencapai kebebasan, kesejahteraan, dan kebahagiaan sebesar-besarnya. Di sisi lain, nilai-nilai tertinggi peradaban ini justru mulai ditinggalkan oleh banyak warga Amerika sendiri. Akibatnya, kultur kekerasan tumbuh

subur, terutama di kota besar. Nilai-nilai keluarga yang konservatif memudar.

Negeri ini, Gingrich berseru, telah memimpin koalisi untuk menghancurkan fasisme Jepang, Jerman, dan Italia. Setelah fasisme jatuh, negeri ini juga memimpin separuh penduduk dunia lainnya untuk mengalahkan komunisme. Adalah ironis, ketika ia mampu memenangkan peperangan di tingkat dunia, di dalam negeri sendiri Amerika dikalahkan oleh jenis perang yang lain. Bagaimana peradaban Amerika dapat survive dengan warganya yang baru berumur 12 tahun sudah menggendong bayi, baru berumur 15 tahun sudah saling membunuh. Yang berusia 17 tahun tengah sekarat menghadapi penyakit AIDS, dan yang berumur 18 tahun mendapat diploma tetapi tidak dapat membaca diplamanya sendiri.

Kita, ujar Gingrich lebih lanjut, telah membawa manusia mendarat di bulan, memimpin dunia dalam molecular medicine, dan membukakan gerbang bagi sejarah untuk menuju abad komputer dan revolusi komunikasi. Namun pada saat yang sama, berbagai institusi pendidikan kita mengalami krisis. Lihatlah kondisi anak-anak kita yang makin rendah kemampuannya dalam matematika dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan anak-anak dari negara industri lain. Kita tengah terancam makin tidak memahami kompleksitas dunia yang telah kita temukan sendiri.

Dengan latar belakang keprihatinan itu, Gingrich pun berseru sebagaimana layaknya pemimpin revolusioner yang menginginkan perubahan cepat dan mendasar. Peradaban Amerika, ujarnya, perlu diperbarui. Mutiara yang telah membawa Amerika ke puncak kejayaannya perlu dimunculkan kembali. Segala unsur yang Menyebabkan kejatuhan peradaban ini hams segera dimusnahkan. Lalu ia mengutip buku *Study of History* dari Toynbee, dan bercerita ten tang beberapa peradaban besar yang kemudi an hancur dan hilang. "Peradaban besar Amerika dapat mengalami kejatuhan yang sama," ujarnya. Seruan Gingrich pun bergema ke publik luas. Namun Gingrich tidak hanya bicara dan merumuskan keadaan. Ia

pun seorang politikus yang ulung. Ia memformulasikan visi politiknya itu ke dalam berbagai agenda yang operasional. Sebagai pemimpin Kongres (Speaker of the House), ia berjuang keras memaksakan berbagai visi politiknya, memimpin anggota parlemen lain untuk berkomitmen menggolkan agenda yang diberi nama Contract with America.

Memang tidak semua harapan Gingrich menjadi kenyataan. Ia hams menghadapi Presiden Clinton yang datang dari partai politik dan punya agenda berbeda. Berbagai lawan politiknya terus-menerus mencari dan mengeksploitasi kelemahannya. Di akhir tahun, popularitasnya bahkan menurun. Namun, sebagaimana Ronald Reagan, ia sudah mengubah political mood politisi dan masyarakat Amerika untuk makin konservatif, yang percaya kepada pemerintahan yang minimal, kebebasan individu, prinsip pasar bebas, nilai-nilai keluarga, dan agama.

Yang istimewa pada Gingrich, ia menampilkan kembali sosok politikus tradisional, figur pemimpin dan sekaligus pemikir. Dalam dirinya bertemu dua dunia: dunia praktis dan dunia konsep. Ia memiliki ketajaman, koherensi, dan visi seorang pemikir, intelektual, atau akademikus. Ia juga memiliki semangat dan pas-sion seorang politikus, aktivis, atau pejuang. Ia adalah pejuang pemikir atau pemikir pejuang, sebagaimana politisi terbesar di Amerika Serikat, seperti Thomas Jefferson dan James Madison. Dua tokoh ini adalah Presiden Amerika Serikat di zamannya dan juga pemikir, peletak dasar filsafat politik, yang menjadi sokoguru sistem politik Amerika Serikat sekarang.

Di Tanah Air, kita pun pernah punya politisi dari jenis itu: pejuang pemikir. Mereka adalah generasi 1928 yang menjadi Found-ing Fathers Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan Moh. Natsir. Kepiawaian mereka sebagai politisi tidak diragukan. Namun lebih dari umumnya politisi, mereka pun adalah pemikir yang menyerap ide-ide politik terbaik di zamannya dan memberikan visi bagi pengikutnya. Soekarno dengan visi nasionalisme, Hatta dan

Sjahrir dengan sosial-demokrasi, Tan Malaka dengan populisme, dan Moh. Natsir dengan Islam.

Namun makin lama, kita makin kehilangan ripe pemimpin yang visioner, politisi dengan kecemerlangan intelektual). Politik makin kurang bersifat ideologis serta makin bersifat administratif, teknis, dan manajemen, dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Politisi pun makin tampil seragam, sebagai profesional eksekutif atau manajer yang kurang terlibat dalam discourse gegap gempita ideologi dan keberagaman cita-cita sosial. Dunia politik menjadi makin kering. Newt Gingrich agaknya mengingatkan kita bahwa politik juga adalah sebuah gelora, sebuah passion, sebuah medan pertarungan berbagai visi.

Kolumnis Politik

SEBERAPA besar sebenarnya pengaruh seorang penulis kolom politik? Saat ini, Januari 1996, publik di Amerika Serikat tengah mempercakapkan William Safire, penulis kolom politik yang kini dianggap terbaik dan paling berpengaruh. Ia menulis kolom rutin di New York Times, koran yang paling banyak dibaca oleh pengambil kebijakan, di samping Washington Post. Namun hari itu, 8 Januari 1996, Safire secara khusus menyerang Ibu Negara Hillary Clinton. Kolom yang ia tulis berjudul tajam dan keras: Badai Kebohongan (Blizzard of Lies).

Masyarakat Amerika dari berbagai golongan, ujar Safire, sangatlah tidak beruntung. Ibu Negara Hillary Clinton, wanita yang berbagai bakatnya tidak diragukan dan menjadi idola banyak orang di generasinya, ternyata seorang pembohong (a congenital liar). Perlahan-lahan, dengan makin terungkapnya kasus Whitewater, ujar Safire, kita menjadi tahu Ibu Negara telah memberikan keterangan palsu. Ia telah memperdaya kawan-kawannya sendiri dan staf

yang membelanya dengan aneka jerat kebohongan. Safire lalu memberikan bukti, argumen dan data, satu per satu.

Secara cepat dan serentak, kolom politik Safire menjadi pergunjangan publik. Berbagai media massa dan tokoh politik membahasnya. Siaran televisi CNN mengulas kolom politik itu di berbagai program utama, mulai dari "Larry King Live", "Cross-Fire", "Inside Politics", "Capital Gank", sampai "Reliable Sources". Program "Inside Politics" bahkan menganggap kolom politik Safire sebagai berita terpenting pekan itu. Sekretaris kepresidenan, bahkan Presiden Clinton dan Hillary sendiri, merasa perlu merespons.

Jajak pendapat yang kemudian dilakukan oleh Time-CNN menunjukkan merosotnya popularitas Hillary. Lebih dari 50% publik Amerika Serikat merasa bahwa Hillary memang telah berbohong dalam kasus Whitewater, yang menuduh Hillary dan Clinton melakukan penggelapan uang ketika Clinton masih menjadi gubernur di Arkansas.

Bukan isi kasus Whitewater ini yang benar-benar menarik, melainkan konteks politik yang melingkupinya. Tahun ini adalah tahun pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kolom politik Safire dianggap telah membalikkan citra Ibu Negara Hillary, yang dapat berpengaruh kepada popularitas Presiden Clinton sendiri. Setelah kolom Safire, Newsweek, yang pernah menokohkan Hillary dengan judul sampul: Politics of Virtue, kini menampilkan kembali Hillary dengan judul yang berbalik: Saint of Sinner. Bahkan majalah The Weekly Standard di sampulnya melukis wajah Hillary yang menyerupai Richard Nixon. Presiden Nixon jatuh karena Watergate. Kini Hillary {dan Clinton} dengan kasus Whitewater.

Ibu Negara Hillary bukanlah korban pertama kolom politik William Safire. Kerja yang lebih gemilang dilakukan Safire di tahun 1977. Korban pertamanya, di tahun itu, adalah Bert Lance, direktur budget dalam era Presiden Carter. Melalui investigative report dan kolom politiknya yang rutin, Safire mengungkap skandal keuangan

yang dilakukan Bert Lance. Akibatnya Lance mengundurkan diri, dan William Safire memperoleh penghargaan tertinggi di bidang jurnalistik — Pulitzer Prize,

Setelah Lance, berbagai tokoh penting menjadi sasaran tembaknya, termasuk William Casey dalam skandal Iran, James Baker dalam kasus Perang Teluk, dan bahkan pemimpinnya sendiri di kubu konservatif, Ronald Reagan. Safire pun ditakuti bukan saja karena akurasi data yang ia punya dan gaya penulisannya yang menyerang, melainkan juga indah. Ia lebih ditakuti karena informasi di tangannya banyak yang sangat eksklusif, yang hanya diketahui oleh sangat sedikit the insiders.

Punya kah kita penulists kolom politik seperti Safire di Tanah Air? Setidaknya ada tiga hal yang membuat penulis kolom politik di Indonesia sangat susah menyamai William Safire. Pertama, penulisan kolom di Amerika Serikat sudah menjadi profesi. Menjadi kolomnis di Amerika bukan pekerjaan sambilan seperti di Indone-sia, ia sudah menjadi status yang terhormat dengan bayaran yang sangat tinggi. Dalam setahun, Safire, misalnya, memberi ceramah 12-15 kali, dengan bayaran sekitar Rp45 juta sekali ceramah. Total penghasilannya setahun diperkirakan sekitar Rp 1,2 milyar, hanya dari ceramah, menulis kolom, dan buku. Dengan penghasilan besar, ia dapat berkonsentrasi dan intens di bidang penulisan kolom.

Kedua, kedekatan dan hubungan khususnya dengan banyak para pengambil kebijakan. Untuk membuat sebuah tulisan penting, ia kadang menelepon beberapa sumbernya di dalam pemerintahan. Melalui mekanisme ini, ia memperoleh informasi segar dari tangan pertama sebelum informasi itu meluas ke publik. Ia juga memiliki akses ke berbagai dokumen penting yang susah ditembus orang lain. Safire sendiri adalah man tan penulis pidato presiden era Nixon. Ia memang sudah mengenal liku-liku informasi di Gedung Putih.

Ketiga, kultur kebebasan di Amerika Serikat sendiri. Investigasi atas masalah publik dan publikasi atas investigasi itu adalah sesuatu

yang halal secara politik. Ia adalah bagian dari hak warga negara yang justru berfungsi positif bagi koreksi dan kontrol atas praktek pemerintahan ataupun tingkah laku individual para politisi. Serangan atas ibu negara, seperti atas Hillary Clinton yang disertai data akurat, adalah hal yang jamak belaka.

Namun Safire bukanlah contoh terbaik dari penulis politik bagi negara yang tengah tumbuh seperti Indonesia. Walau dengan tingkat keahlian yang tinggi, Safire lebih banyak mengeksplorasi politik sehari-hari (day to day's politics). Sedangkan negeri kita lebih butuh tipe penulis politik yang menawarkan visi dan memberikan perspektif perubahan.

Voltaire jelas lebih ideal. Berbagai tulisannya yang dibukukan dalam *Letters on the English* memulai Revolusi Prancis dan abad pencerahan di Eropa. Opiniya dibangun oleh analisis yang tajam atas kekuasaan yang ada, dalam oleh renungan filosofis, bahasanya puitis, dan visioner. Akan punya kah kita penulis politik seperti Voltaire untuk memulai era pencerahan di Indonesia?

Politik Megawati

DI MANA idealnya tempat Megawati dalam format politik Indonesia? Posisi apa yang mungkin ia capai dan peran apa yang seharusnya ia mainkan? Mungkinkah ia pada akhirnya dicatat sejarah berdiri sejajar di samping Cory Aquino dan Benazir Bhutto? Pertanyaan ini seketika berkeliaran di kepala setelah membaca berita tentangnya. Berita yang paling aktual dan sensasional: Megawati mungkin dicalonkan sebagai presiden oleh partainya, PDI.

Tidak banyak pemimpin di Tanah Air yang seberuntung Megawati. Kehadirannya dalam pentas nasional terhitung belum lama. Namun ia sudah menempati posisi khusus, membawa kegairahan baru serta menjadi pusat berita. Ia menjadi wanita pertama yang memimpin partai politik sepanjang sejarah Orde Baru. Lebih dari itu, ia pemimpin partai yang terpilih karena desakan arus bawah, dan bertahan walau terus digoyang lawan politiknya dan dihantam aneka isu.

Jika pencalonannya sebagai presiden menjadi kenyataan, walaupun ia tidak terpilih, niscaya ia menjadi orang pertama pula

yang berkompetisi dalam pemilihan presiden sepanjang sejarah Indonesia. Ini berarti ia tidak hanya hadir dalam sejarah, melainkan juga membuat sejarah.

Namun, kini Megawati berada di titik jalan yang bercabang dua. Jalan mana yang ia tempuh akan menentukan tidak hanya karirnya pribadi, melainkan juga kondisi politik nasional. Oleh lingkungannya boleh jadi ia diarahkan untuk memainkan peran politik sebagaimana yang dimainkan Cory Aquino di Filipina. Bulan Agustus 1983, Ninoy, suami Cory, tewas terbunuh. Februari 1986, Cory dinyatakan sebagai presiden. Pada periode itu Cory berubah dari ibu rumah tangga menjadi pemimpin simbolik koalisi |perubahan dan akhirnya menjadi pemimpin resmi negara.

Sebagaimana Megawati, Cory juga seorang ibu rumah tangga biasa yang awalnya jauh dari gegap gempita politik. *Current Biography Yearbook* (1986) bahkan melukiskannya sebagai classical oriental wife, seorang ibu rumah tangga tipe tradisional Timur. Suaminya memang seorang politikus ulung, gubernur, dan senator termuda dalam sejarah Filipina. Namun jika suaminya diibaratkan panglima perang, Cory hanya merawat pedang dan menjaga kuda

Situasi sosial kemudian membimbing Cory ke arah yang tidak terduga. Kekuatan oposisi di Filipina kala itu begitu lemah dan terpecah. Ketika Marcos mengumumkan akan diadakan pemilihan presiden, November 1985, mereka yang gandrung perubahan kekuasaan memerlukan satu pemimpin. Tanpa satu komando, suara mereka akan terpecah dan sulit mengalahkan Marcos.

Persoalannya, di tubuh oposisi Filipina terlalu banyak pemimpin dan sedikit "prajurit". Yang satu tidak ingin menjadi bawahan yang lain. Satu-satunya cara adalah mencari pemimpin simbolik yang dapat menyatukan mereka. Salvador Laurel, sungguh pun sangat lihai dan berpengalaman sebagai politikus, serta memimpin Unido, partai oposisi terbesar, dianggap tidak memadai untuk memimpin koalisi. Cory Aquino pun dipilih, bukan karena pengalaman politiknya, melainkan simbol moralnya.

Aneka keberuntungan lalu menyertai Cory. Keluguan politiknya malah menjadi sumber kekuatannya di saat politik sudah begitu tercemar. Ia membawa gairah baru. Para aktivis independen membentuk lembaga pengawas pemilu (NAMFREL) agar tidak dirugai. Cory pun tampil sebagai alternatif moral. People Power kemudian membawa Cory ke puncak.

Mungkinkah Megawati memilih peran Cory Aquino, lalu mengulangi kisah suksesnya? Megawati memang dapat memainkan simbol moral yang sama. Namun, situasi politik Indonesia 1996-1997 agaknya berbeda dengan Filipina 1985-1986. Saat itu di Filipina, pemimpin agama yang dihormati, Kardinal Sin, berdiri di belakang Cory. Fenomena moral yang dibawa Cory bercampur dengan gairah agama massa. Satu koalisi besar pun terbentuk solid, menggelinding membesar bagai bola salju dan menarik dukungan massa. Baik karena alasan politik maupun agama. Gereja sendiri bukan hanya menarik jarak, juga mulai mengkritik struktur kekuasaan yang ada.

Namun, di Indonesia 1996, kelompok agama yang dominan — kelompok Islam melalui ICMI — justru sedang memulai rahap baru. Mereka bukan saja tidak menarik jarak, melainkan sedang bertaut dengan sistem yang ada, mencoba perubahan bertahap dari dalam. Sebagai pilihan politik, sikap ini pun tidak dapat disalahkan, ia juga merupakan sebuah eksperimen untuk turut mempengaruhi kebijaksanaan. Mereka punya hak memilih yang sama dengan pihak lain yang memilih sebaliknya. Yang jelas, koalisi masyarakat yang menarik jarak dari sistem agaknya sulit menarik kelompok Islam di ICMI.

Bagaimana dengan kelompok Islam di luar ICMI? Memang ada Gus Dur yang dapat mendukung Megawati. Tetapi pengaruh Gus Dur di kalangan Islam di Indonesia sangat berbeda dengan Kardinal] Sin bagi Katolik di Filipina. Apalagi sekarang ada krisis internal di tubuh NU yang menyulitkan posisi Gus Dur sendiri.

Dukungan kelompok Islam di NU pun secara utuh belum tentu didapat. Tanpa dukungan kekuatan Islam yang terorganisir, kisah sukses seperti Cory Aquino sulit terjadi di sini. Kekuatan dominan dalam Politik masyarakat sendiri bahkan sangat mungkin terbelah dan saling berhadapan. Gerakan sejenis People Power menjadi sangat riskan. Ia dapat menjadi arena pergesekan antara kelompok masyarakat sendiri yang dua-duanya menginginkan perubahan tetapi berbeda strategi. Yang satu bekerja sama, yang satu beroposisi dengan Pemerintah.

Kini Megawati benar-benar hidup dalam politik riil. Tarik-menarik kekuatan dan tekanan ia rasakan secara langsung. Pilihan yang ada sama-sama sulit dan berisiko. Isu calon presiden boleh jadi merupakan persoalan yang paling dilematis yang pernah ia hadapi selaku pemimpin: memilih antara inovasi politik yang berdampak jauh dan kalkulasi politik rasional. Pendukungnya berharap ia memimpin semacam kesatuan aksi perubahan, namun konstelasi politik riil mengikat kakinya.

Mungkinkah berbagai keberuntungan yang telah membawa Megawati ke pentas politik nasional masih menyertainya? Misalnya ia membuat langkah yang sangat kreatif dan kondisi kemudian berubah berpihak padanya, lalu ia pun akan dikenang sebagai salah satu inovator politik Indonesia? Atau malah ini menjadi awal kejatuhannya? Pilihan pribadi dan kreativitas Megawati yang masih terbuka atas isu calon presiden itu akan menentukan karier politik kelompok pendukungnya, selain yang lebih mendasar: citra dan aroma Megawati sendiri.

Iklan Politik

POLITIK kini memasuki era baru. Ini kesan paling kuat yang timbul setelah menyaksikan pemilihan calon presiden di Amerika Serikat, Maret 1996. Di era panglima perang Alexander the Great dan Napoleon, untuk memperbesar pengaruh dan memenangkan dukungan politik, diperlukan meriam dan bedil. Namun di abad informasi di Amerika Serikat, untuk memenangkan pengaruh dan dukungan, yang diperlukan adalah iklan di televisi. Aktor utama di balik pertarungan politik bukan lagi jenderal perang, melainkan konsultan marketing.

Bulan Maret 1996, di Amerika Serikat, Partai Demokrat dan Partai Republik memilih kandidat calon presiden yang akan dipertarungkan November 1996. Calon itu kini sudah terpilih. Partai Demokrat tetap mencalonkan Presiden Clinton. Sedangkan Partai Republik mencalonkan Bob Dole, yang kini masih menjabat Ketua Mayoritas Senat Amerika Serikat.

Proses pemilihan itu yang menarik. Di televisi, bersama-sama dengan iklan sepatu, susu, mobil, ataupun komputer, muncul berbagai iklan politik dari para calon presiden, mulai dari Bob Dole, Pat Buchanan, Steve Forbes, sampai Lamar Alexander. Para ahli strategi mengemas calon mereka untuk menarik rakyat pemilih sebagaimana layaknya para ahli marketing mengemas produk pabrik agar dibeli konsumen. Perang iklan di antara para calon presiden berlangsung tidak berbeda dengan perang Iklan antara IBM dan Apple, perusahaan telepon AT&T dan MCI, Pepsi Cola dan Coca-Cola, serta di antara aneka merek piza.

Iklan politik Bob Dole, misalnya, ingin mengesankan figur Bob Dole sebagai pahlawan Amerika Serikat. Digambarkan saat-saat ia mengabdikan diri kepada negaranya dalam Perang Dunia II, yang berakibat cacat fisik di tangan kanannya. Adegan yang lain menggambarkan betapa ia sebagai pemimpin telah dites berkali-kali dengan aneka posisi di pemerintahan, dipercaya karakter dan kejujurannya, serta kaya akan pengalaman. Iklan ini diakhiri dengan pesan singkat: Bob Dole for President.

Perang iklan yang menunjukkan kelemahan lawan politik juga beredar. Bob Dole, misalnya, mengiklankan kelemahan Pat Buchanan dan Steve Forbes. Pat Buchanan ia iklankan sebagai politikus yang terlalu ekstrem untuk politik Amerika Serikat. Berbagai pandangan Pat Buchanan, terutama opininya terhadap wanita yang agak inferior, diiklankan berulang-ulang. Sedangkan Steve Forbes ia iklankan sebagai pendatang baru yang belum berpengalaman. Kepemimpinannya di bidang politik belum pernah dites.

Melalui iklan, Steve Forbes ataupun Pat Buchanan pun menyerang Bob Dole. Bob Dole dianggap sejenis the death fish in the water yang tidak memiliki visi yang jelas bagi masa depan Amerika Serikat. Rekor Bob Dole yang tidak konsisten — ingin menurunkan pajak tetapi justru mendukung beberapa kali kenaikan pajak — juga berulang-ulang diiklankan. Bob Dole dikesankan tidak mungkin

dapat membuat perubahan karena ia sendiri adalah bagian dari status quo.

Penjelasan lebih jauh tentang iklan politik ini diurai Bruce Newman dalam bukunya *The Marketing of the President: Political Marketing as Campaign Strategy* (1994). Ia menggambarkan, sebagaimana dunia bisnis, kini kampanye politik juga menggunakan prinsip marketing, seperti marketing research, market segmentation, targeting, positioning, strategy development, dan implementation,

Para ahli marketing memutuskan apa yang harus mereka “judi” dari sang calon presiden. Dengan bantuan para pollsters (ahli jajak pendapat), mereka membuat profil rakyat pemilih di berbagai negara bagian. Profil itu menggambarkan apa yang sedang menjadi kegelisahan dan harapan rakyat pemilih dari berbagai kategori umur, pendapatan, dan kelompok sosial. Kualifikasi pemimpin yang bagaimana yang mereka harapkan.

Bersama dengan ideolog, lalu ahli marketing itu mengemas dan menerjemahkan visi politik sang calon untuk diiklankan sesuai dengan profil itu. Berdasarkan prinsip marketing, diputuskan isu apa yang harus diiklankan di negara bagian tertentu. Para ahli busana juga dilibatkan agar penampilan sang calon makin meyakinkan. Gerak calon presiden lain juga terus diamati. Iklan politik dari lawan yang menyudutkan dijawab dengan iklan politik lainnya.

Tidaklah mengherankan jika pemilihan presiden di Amerika Serikat menjadi sangat mahal. Menurut *Time*, edisi Maret 1996, selama masa kampanye tahun itu, Steve Forbes menghabiskan sekitar US\$ 30 juta, Bob Dole menguras dana sebesar US\$ 27 juta, sedangkan Pat Buchanan sebesar USD 11 juta.

Kita pun bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Mengapa politik demokrasi modern sampai ke tahap itu dan menjadi mahal? Penyebabnya adalah substansi dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi meletakkan kekuasaan di tangan rakyat banyak, bukan segelintir elite. Untuk memperoleh kekuasaan, setiap politikus

harus menemui rakyat banyak itu. Makin banyak rakyat yang harus dijangkau dan diyakinkan, akan makin mahal biaya yang harus dikeluarkan.

Di samping itu televisi sudah berkembang sedemikian rumit. Hampir di setiap rumah tangga ada televisi. Iklan politik di televisi menjadi sangat efektif untuk menjangkau rakyat pemilih. Bagi pengelola televisi, tidaklah penting apakah itu iklan politik atau bisnis. Mereka membebankan tarif untuk panjangnya waktu iklan, bukan jenis iklan. Tarif untuk iklan politik akan sama mahalannya dengan tarif iklan bisnis jika waktu yang digunakan sama. Perang iklan politik antar calon presiden di televisi membuat biaya kampanye membubung tinggi.

Ditambah lagi, dalam demokrasi hanya persuasi yang diizinkan dan prosedur pemilihan calon juga bersih. Intimidasi dan paksaan serta kecurangan pemilihan dianggap tindakan kriminal dalam politik. Untuk terpilih tidak bisa tidak sang calon presiden akhirnya hanya bergantung pada strategi persuasi. Makin cerdas rakyat pemilih, strategi persuasi harus makin canggih pula. Berbagai konsultan pun dilibatkan untuk merumuskan strategi persuasi yang tepat, mulai dari ahli marketing, ideolog, penulis pidato, ahli statistik, sampai perancang busana. Honor para ahli ini juga mahal.

Karena uang menjadi sangat sentral dalam proses politik ini, ada aturan dan batasan jumlah sumbangan yang boleh diberikan sebuah perusahaan kepada calon presiden. Penyimpangan terhadap aturan main akan dengan mudah dibongkar oleh berbagai pihak.

Sejalan dengan pertumbuhan demokrasi, Indonesia suatu waktu juga akan menyaksikan perang iklan politik ini dengan konsekuensi biaya yang mahal.

Prospek Demokrasi

PADA pertengahan 1990-an, kita menyaksikan denyut nadi politik yang meningkat. Berbagai isu terus bergulir dan berakumulasi. Mulai pernyataan keprihatinan berbagai tokoh tentang merosotnya kualitas politik, kasus PDI dan massa pendukung Megawati yang mengalami radikalisisasi di berbagai kota besar, sampai keberanian Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan mengumumkan partai baru yang jelas-jelas konfrontatif dengan sistem yang ada. Mungkinkah situasi yang ada berujung perubahan format politik Orde Baru ke arah demokrasi?

Dalam literatur demokrasi, ada tiga pendekatan populer yang lazim digunakan sebagai alat analisis. Ketiganya dapat digunakan untuk meneropong kasus Indonesia.

Pertama, pendekatan sosio-ekonomi. Pelopor pendekatan ini adalah Seymour Martin Lipset (1960). Lipset menemukan korelasi yang tinggi antara kondisi ekonomi dan terbentuknya demokrasi yang stabil. Klaim Lipset ini kemudian didukung oleh berbagai penemuan

dunia politik kontemporer. Semua negara kaya yang memiliki GNP per kapita di atas US\$ 6.000 adalah negara demokrasi, kecuali negara pengekspor minyak, seperti Arab Saudi. Semua negara miskin yang memiliki GNP per kapita di bawah US\$ 450 adalah tidak demokratis, kecuali India dan Sri Lanka. Sedangkan negara berpenghasilan menengah (US\$ 450 - US\$ 6.000) sebagian demokratis, sebagian lagi tidak.

Kedua, pendekatan konflik, yang dipelopori Dankwar A. Rustow (1970). Rustow tidak mencari kondisi yang dibutuhkan demokrasi, tetapi sebab-musabab lahirnya demokrasi. Setelah tercipta integrasi nasional, klaim Rustow, demokrasi akan dilahirkan oleh tumbuhnya oposisi dan konflik kepentingan di kalangan elite. Para elite itu tidak harus meyakini demokrasi sebagai ideologi. Fragmentasi dan konflik kepentingan di antara elite itu sendiri yang akan mentransformasikan sistem. Dalam konflik ini berbagai elite akan mencari dukungan di kalangan non elite. Demokrasi adalah kawah Janji untuk mengakomodasi dan menyatukan kepentingan elite, dengan mengubah konflik menuju kompetisi.

Ketiga, pendekatan kultur, yang dipelopori Almond dan Verba (1963). Salam risetnya, mereka menemukan tumbuhnya insting tertentu di negara demokratis, yang kemudian mereka namakan civic culture. Oleh para pendukungnya, konsep civic culture ini dikembangkan sebagai kondisi yang dibutuhkan demokrasi, seperti sikap politik yang moderat, toleransi akan perbedaan dan pluralisasi, kepercayaan atas institusi negara, sikap kritis atas informasi, dan social trust antara anggota masyarakat. Pendekatan ini melihat demokrasi bukan buah konflik elite, melainkan sebagai way of life. Agar Demokrasi stabil, mayoritas masyarakat tidak cukup hanya memiliki kepentingan berbeda, melainkan juga harus menghayati civic culture itu.

Harold Crouch (1994) mencoba menerapkan ketiga pendekatan itu. Dengan memadukan ketiga pendekatan itu, Crouch sampai pada sikap pesimistis atas kemungkinan demokrasi di Indonesia pada 1990-an. Dari sisi sosio-ekonomi, menurut Crouch, pengusaha besar yang

terbentuk di Indonesia sulit untuk membawa program politik yang berbeda dengan pemerintah. Sebagian besar adalah pengusaha non-pri yang sangat minoritas dan tidak memiliki akar tradisi politik kritis. Sedangkan pengusaha pribumi yang tumbuh subur ternyata dekat bahkan keluarga dari pihak kekuasaan. Mereka tidak berkepentingan mentransformasikan kekuatan bisnis untuk membuat perubahan atas sistem yang menguntungkan mereka sendiri. Kelompok bisnis di luar dua kelompok di atas, kelas menengah lain ataupun kelompok buruh, belum banyak dan tidak cukup kuat untuk memimpin perubahan.

Dan pendekatan konflik elite, situasi Indonesia juga tidak krusial. Crouch mencatat banyaknya studi yang ingin menggambarkan konflik elite di tubuh militer, misalnya konflik antara militer garis keras dan moderat, Jawa dan non-Jawa, Angkatan 45 dan Angkatan Magelang, Divisi Diponegoro dan divisi lainnya, pragmatis dan prinsipal, atau konflik militer dan kelompok pemerintah nonmiliter. Namun, bagi Crouch, konflik ini tidak cukup untuk mengubah sistem, terutama karena kemampuan politik Presiden Soekarno yang menjadi penyekat dan penyatu, yang|acap berhasil menyeimbangkan kepentingan elite di sekitarnya. .

Pendekatan kultur adalah yang paling lemah dalam meneropong demokratisasi di Indonesia. Konsep kekuasaan Jawa yang banyak menjadi bahan studi Indonesianis bukan saja paralel dengan kultur demokrasi, melainkan juga banyak bertentangan. Sementara itu kultur modern (world culture), yang dibawa oleh pembangunan ekonomi dan pendidikan ala Barat masih berupa selimut tipis yang tidak berakar dalam kesadaran publik.

Dalam pandangan Crouch, fondasi sosio-ekonomi, politik, dan kultur belum mengabarkan prospek cerah bagi demokrasi di Indonesia tahun 1990-an, Sistem demokrasi ataupun semi-demokrasi akan goyah dan labil dalam kondisi Indonesia sekarang.

Bagi pemikir postmodernists, realitas kekuasaan lebih bersifat tidak pasti, misterius, dan penuh unsur surprise— tidak seperti diduga pengamat politik konvensional. Dalam realitas politik praktis, tidak semua informasi tersedia secara terang benderang, dan posisi setiap aktor selalu goyah, dapat ke kanan atau ke kiri, tergantung situasi politik yang selalu mungkin berubah.

Setahun sebelum bubarnya Uni Soviet, tidak ada pengamat politik yang dapat menduga bahwa kerajaan besar komunisme tersebut akan bubar secepat itu. Sebelum pada 1980-an, tidak ada pengamat yang menduga agama akan kembali memainkan peran politik yang berpengaruh bahkan di negeri paling bebas dan sekuler, seperti Amerika Serikat. Bagi postmodernists, dua kejadian besar ini menjadi insight betapa realitas politik itu lebih kompleks dan misterius dari apa yang dapat dikonstruksi oleh politik konvensional.

Berbeda dengan Crouch, bagi postmodernists, demokrasi di Indonesia jangan sendirinya dapat ditegakkan kapan pun, tergantung permainan politik dan berbagai kebetulan yang tidak sepenuhnya dapat diduga. Dukungan dan loyalitas politik selalu goyah dan acap berubah. Sejarah menyediakan banyak cerita betapa perubahan posisi politik dapat tidak terduga. Di samping itu, kondisi sosial ekonomi dan sosio-kultur bukanlah prasyarat pokok bagi

Posisi kita berada di tengah dua ekstrem di atas. Di satu sisi, saya mengakui kekuatan analisis Harold Crouch dalam melihat masih tipisnya fondasi sosio-ekonomi dan sosio-kultur bagi demokrasi yang stabil di Indonesia. Di sisi lain, saya pun melihat adanya kebenaran postmodernists yang membuka kemungkinan demokratisasi yang substansial di Indonesia akibat bekerjanya sebab akibat yang tidak sepenuhnya dapat dipahami dan diduga. Sebagai akademikus yang berpretensi bebas nilai, saya cenderung memihak Crouch. Terapi, sebagai aktivis yang romantis, hati ini lebih di kalangan postmodernists.

Debat Politik

MENGAPA masyarakat elite Amerika Serikat sangat menyukai debat politik? Sebelum hari pemilihan umum, para calon presiden diminta lebih dulu melakukan serangkaian debat politik di depan publik. Pada Oktober 1996, calon presiden Bob Dole dan Bill Clinton, serta calon wakil presiden mereka, Jack Kemp dan Al Gore, berdebat. Televisi mengantarkan debat itu ke seluruh pelosok negeri untuk disaksikan masyarakat pemilih. Apa sumbangan debat itu bagi pertumbuhan sistem politik di sana? Apa pula yang dapat dipetik dari tradisi debat itu bagi politik kira di Tanah Air?

Agak aneh mungkin. Awal dari tradisi debat di Amerika Serikat adalah pengalaman buruk para pendatang di negeri itu. Berbeda dengan negara lain, para imigran Eropa yang datang pertama kali ke negeri itu bukan untuk mencari tambang emas dan mengumpulkan kekayaan. Para pendatang pertama di Amerika Serikat adalah pelarian yang ingin keluar dari absolutisme politik dan fanatisme agama di negaranya masing-masing. Mereka adalah kaum terdidik yang terusir.

Di tanah yang baru, Amerika Serikat, mereka ingin membangun tradisi yang tidak ditemui di negara asalnya. Yaitu kultur yang menghormati keberagaman keyakinan dan pikiran agar pengalaman buruk mereka tidak lagi terulang. Perdebatan dan ketidaksepakatan harus dianggap biasa dalam situasi keberagaman. Menghormati keberagaman dengan sendirinya menuntut penghormatan atas perdebatan.

Tradisi debat itu dicatat Alexis de Tocqueville. Ia -seorang Perancis yang datang ke Amerika Serikat pada 1830-an- merekamnya dalam buku yang menjadi klasik: *Democracy in America*.

Berpartisipasi untuk membangun komunitas dan mendiskusikannya secara publik, ujar de Tocqueville, adalah kesenangan utama masyarakat Amerika. Kegiatan itu menjadi tradisi habit of the hearts, penduduk setempat. Bahkan para wanita, sambung de Tocqueville, acapkali datang ke pertemuan umum dan mendengar perdebatan politik sebagai bagian rekreasi, setelah lelah bekerja di rumah. Berbagai kelompok debat dibentuk sebagai pengganti hiburan seni.

Debat politik pertama yang legendaris terjadi pada 1858. Di depan publik di berbagai tempat, Abraham Lincoln dan Senator Douglas berdebat keras tentang isu yang emosional saat itu: pro dan kontra perbudakan. Namun, revolusi debat politik baru terjadi pada 1960, antara John F. Kennedy dan Richard Nixon.

Berbeda dengan Lincoln dan Douglas, Kennedy dan Nixon hidup di era industri televisi. Mereka tidak perlu mengunjungi tempat untuk berdebat agar disaksikan makin banyak Serikat. Televisi yang membawa perdebatan mereka ke rumah masyarakat pemilih. Kennedy dan Nixon secara cerdas mengawinkan politik dan televisi.

Sambutan masyarakat luas, politisi, dan lingkungan akademisi atas debat televisi ini luar biasa. Begitu banyak buku ilmiah sudah ditulis tentang debat itu, mengelaborasi berbagai dimensinya, seperti debat atas masyarakat pemilih (voting behavior), analisis,

respons media massa (media coverage), seputar permasalahan hukum di sekitar debat televisi, politik komunikasi, dan analisis penampilan, seni bahasa tubuh para calon presiden.

Tradisi jajak pendapat juga dimulai. Publik diminta menilai debat itu, siapa pemenangnya, kesan apa yang paling kuat dan paling lemah dari setiap calon, yang mana yang layak memimpin negara. Sebanyak 90% dari rumah tangga di Amerika Serikat menonton salah satu dari empat kali debat Kennedy-Nixon. Jumlah penonton televisi debat itu 20% lebih banyak dari program hiburan yang diganti oleh debat itu (Minow and Sloan, 1987).

Kennedy-Nixon menumbuhkan antusiasme masyarakat yang sangat besar aras kemampuan televisi mengubah kompetisi politik. Debat politik di depan televisi, setelah absen selama 12 tahun, terus berlanjut sampai era Bill Clinton dan Bob Dole sekarang.

Mengapa berdebat lebih baik daripada tidak? John Stuart Mill (1806-1873) menyediakan argumen filosofis. Menurutnya, jika kebenaran itu dapat ditemukan, maka perdebatan pastilah medium yang dibutuhkan. Melalui medium itu, berbagai ide akan bertarung, membuka kelemahan masing-masing, saling melengkapi, dan membawa kita pada basil akhir yang lebih meyakinkan. Ide yang satu menjadi cermin bagi ide lainnya.

Seandainya kebenaran itu tidak dapat ditemukan, perdebatan juga tetap dibutuhkan. Hanya melalui medium itu, ide yang buruk dapat dipisahkan dari kumpulan ide yang baik, dan ide yang baik dapat diseleksi dari kumpulan ide buruk. Baik ketika kebenaran itu dapat ditemukan ataupun tidak, perdebatan, menurut Mill, selalu merupakan pilihan yang lebih baik.

Kita tidak tahu, seberapa jauh perdebatan politik itu juga lebih baik bagi situasi kita di Tanah Air. Perdebatan publik membutuhkan tidak hanya kebebasan, melainkan juga kematangan. Hanya dalam kondisi yang relatif bebas, berbagai pikiran dan keyakinan dapat saling mengoreksi secara fair. Namun, tanpa kematangan, seperti

toleransi atas perbedaan dan sikap moderat atas keberagaman, debat politik dapat mengarah menjadi permusuhan. Yang tercipta kemudian bukan kompetisi, melainkan konflik. Bukan dinamika, melainkan fragmentasi. Bukan seleksi ide baik atas ide buruk, melainkan ide yang makin buruk karena ia didukung oleh kekuasaan, bukan oleh argumen.

Haruskah dikatakan masyarakat kita belum siap dengan debat politik? Jawabannya lebih maju. Tradisi debat publik harus tetap diperkenalkan, namun secara perlahan, sejalan dengan kemampuan masyarakat atas kebebasan dan kematangannya. Tanpa debat publik, akan banyak lahir kebijaksanaan publik yang cacat karena tidak disaring oleh berbagai kepentingan dan perspektif yang beragam.

Reformasi

GUS Dur yang dianggap sebagai kakak dan sahabat, sudah memberikan imbauan terbuka kepada Megawati. Langkah Megawati, ujar Gus Dur, sebaiknya dihentikan. Menuntut banyak pejabat tinggi pemerintah ke pengadilan, menurut Gus Dur, sudah menggeser persoalan, dari koreksi atas masalah internal PDI, la arah konflik yang lebih luas. Harga yang akan dibayar dapat mahal sekali, karena konflik yang diakibatkannya makin dalam dan bersifat nasional.

Saran Gus Dur, ada baiknya Megawati kini berdiam diri dulu. Diam itu pun sudah merupakan perlawanan. Pada akhirnya, ujar Gus Dur lagi, Megawati juga akan diminta kembali untuk terlibat dalam pembangunan nasional karena dukungan massa yang ia punya.

Namun Arief Budiman, rekan seperguruan Gus Dur Forum Demokrasi, memberi imbauan politik yang sebaliknya. Menuntut secara hukum pejabat tinggi pemerintahan, menurut Arief, adalah langkah efektif. Walau Megawati akan dikalahkan, pengadilan dapat

menjadi ajang pendidikan politik yang baik bagi banyak orang. Di sana berbagai penyimpangan politik, akan dipertontonkan. Pers pun akan mengulas dan menginformasikan-nya. Upaya perlawanan hukum Megawati sangat berharga bagi perubahan politik jangka panjang.

Siapakah yang harus diikuti Megawati untuk reformasi politik? Gus Dur atau Arief Budiman? Jawabannya, mungkin tidak keduanya. Yang harus didengar Megawati sekarang mungkin bukan politisi atau aktivis, melainkan boleh jadi seorang peneliti lapangan profesional. Orang itu adalah Samuel Huntington, pakar politik yang banyak melakukan riset tentang demokratisasi.

Huntington (1991) melakukan studi atas 35 negara yang melakukan reformasi politik ke arah demokratisasi sejak 1974. Ia menemukan adanya tiga pola utama reformasi yang dapat dibedakan berdasarkan pelaku utama dan kondisi politik setempat. Dari hasil penelitian ini, Megawati dapat merenungkan kembali berbagai langkahnya.

Pertama, adalah pola transformasi. Pelaku utama perubahan adalah para pembaharu yang sedang duduk di pemerintahan. Penyebab perubahan dapat beragam. Reformasi politik mungkin satu-satunya solusi untuk meluaskan legitimasi. Kebutuhan partisipasi politik masyarakat meningkat. Kebutuhan baru ini direspons agar makin banyak dukungan yang didapat. Mungkin juga ini berlangsung dalam rangka memperoleh sokongan ataupun menghindari tekanan internasional. Apalagi dalam era seperti sekarang, ketika demokrasi dan hak asasi makin menjadi bahasa standar dan etika global.

Menurut Huntington, ada sekitar 16 dari 35 negara (47%) yang melakukan reformasi politik dengan pola transformasi. Contohnya, antara lain: Brasil di bawah reformer Figueredo, dari eta Maret 1979 sampai 1985. Kondisi yang mencolok dari pola transformasi adalah pemerintah yang jauh lebih kuat dibanding dengan oposisi.

Kedua, adalah pola replacement. Dalam situasi ini, legitimasi pemerintah merosot secara kualitatif. Ini bisa disebabkan kerusakan ekonomi Indonesia yang parah. Atau adanya imoralitas di kalangan pemerintahan, seperti terbongkarnya skandal korupsi besar-besaran.

Atau ideologi negara mengalami krisis, tidak lagi mampu memecahkan persoalan. Dalam kondisi itu, pemerintah mengalami pembusukan, pelemahan, dan makin tidak populer. Sebaliknya, kelompok oposisi menyatu dan menguat. Melalui pergolakan politik, seperti *people power*, kaum oposisi memimpin perubahan dan mengambil alih pemerintahan. Reformasi politik ke arah demokratisasi pun dimulai.

Menurut Huntington, ada 6 dari 35 negara (19%) yang melakukan reformasi dengan pola ini. Antara lain Filipina di bawah oposisi Cory Aquino, serta Jerman Timur dan Rumania, yang terjadi pada paruh akhir 1980-an.

Ketiga, adalah pola transplacement. Krisis sistem politik ekonomi memang terjadi. Pemerintah tidak terlalu kuat untuk bertahan tetapi tidak pula mampu memimpin perubahan sendirian. Sebaliknya, oposisi pun tidak terlalu lemah untuk disingkirkan. Akibatnya, elemen progresif di pemerintahan kemudian bekerja sama dengan tokoh oposisi untuk memimpin reformasi ke arah demokratisasi.

Huntington mencatat sebanyak 11 dari 35 negara (32%) yang menempuh reformasi dengan pola ini. Contohnya, antara lain: Afrika Utara, ketika pemerintah (De Klerk) bekerja sama dengan tokoh oposisi (Nelson Mandela) pada 1989, untuk memulai reformasi.

Dari kasus reformasi yang terjadi di atas, sejak 1974, sebanyak 27 dari 35 kasus (80%) terjadi dengan melibatkan para reformis di tubuh pemerintahan sendiri. Dari data lapangan itu, para reformis di tubuh pemerintah ternyata memimpin dan mendominasi pola reformasi politik, bukan oposisi.

Dalam kondisi pemerintahan yang kuat, dan oposisi lemah, tidak mungkin oposisi itu mampu melakukan reformasi sendirian. Oposisi yang lemah yang memaksakan konfrontasi justru dapat menjadi kontraproduktif. Sistem politik keseluruhan dapat lebih represif untuk menghindari timbulnya gerakan oposisi serupa di kemudian ban. Kekerasan politik pun akan mudah terpancing akibat konfrontasi yang acap emosional.

Sistem politik kita pun berada dalam posisi yang sama. Pemerintah terlalu kuat. Oposisi terlalu lemah. Berdasarkan studi lapangan Huntington, untuk mengawali reformasi politik yang berhasil dalam kondisi Indonesia saat ini, jauh lebih mungkin jika Megawati bergandengan dengan para reformis yang masih berada dalam kekuasaan resmi. Lalu membangun jaringan bersama untuk memimpin perubahan secara perlahan dan terkendali. Dalam posisi yang lemah, tidak banyak hasilnya jika Megawati berdiri di luar dan melakukan konfrontasi frontal.

Konfrontasi dalam posisi yang lemah atas kekuasaan resmi hanya memberikan kesan keberanian moral yang teguh. Namun, reformasi politik yang sesungguhnya meminta kalkulasi politik yang lebih strategis. Inilah yang harus menjadi pertimbangan Megawati. Kecuali Megawati berharap munculnya berbagai surprise, di luar dugaan pengamat konvensional.

Uang dan Politik

Di Amerika Serikat, awal Desember 1996, berbagai media massa mempublikasikan surat pribadi Mochtar Riady, pengusaha Indonesia dari Grup Lippo, untuk Presiden Bill Clinton. Surat itu berisi, antara lain, nasihat Mochtar Riady agar Presiden Clinton menunjuk beberapa tokoh bisnis untuk beberapa posisi kunci diplomasi di Asia, dan agar Clinton menormalisasikan hubungan Amerika Serikat dan Vietnam,

Surat ini mengagetkan publik Amerika Serikat. Bukan saja karena adanya orang asing dari Indonesia yang ingin mempengaruhi kebijaksanaan politik Presiden Amerika, lembaga yang begitu dihormati dan dianggap paling berkuasa oleh rakyat Amerika Serikat. Surat ini dikaitkan pula dengan uang yang sudah diberikan keluarga Riady kepada Bill Clinton, bahkan sejak Clinton belum menjadi Presiden Amerika Serikat. Investigasi pun dilakukan makin intens, mengaitkan uang dan politik Riady untuk Clinton. Seberapa jauh sumbangan dana itu legal, kompensasi apa saja yang diminta keluarga Riady, dan seberapa jauh sumbangan itu mempengaruhi pilihan kebijaksanaan publik Bill Clinton.

Ini hanya cuplikan betapa luas dan sensitifnya masalah uang dan politik dalam sistem demokrasi modern. Pemilihan umum, mulai dari anggota Kongres, gubernur, dan presiden, yang sangat kompetitif, sudah sedemikian mahal. Pada 1996, di Amerika Serikat, biayanya sudah mencapai US\$ 64 milyar (Kevin Phillips, 1996) atau sekitar Rp 150 triliun berdasarkan nilai tukar saat itu. Negara Amerika Serikat yang kaya sekalipun tidak dapat membiayainya sendiri.

Peran kelompok swasta untuk menyumbang dana dibuka. Terlebih lagi sumbangan uang bagi politisi yang disukai merupakan bagian dari partisipasi dan hak politik warga negara. Namun, pada Mat yang sama muncul kekhawatiran. Jabatan politik mungkin tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik jika sang politikus terlalu berutang budi kepada kelompok bisnis yang membiayai kampanyenya, seperti yang dikhawatirkan Kevin Phillips (1996): apakah presiden kita yang akan datang sudah dibeli para pengusaha raksasa dan pelobi tingkat tinggi?

Sebuah kelompok di Amerika Serikat, The Center for Public Integrity, dibentuk untuk meneliti hubungan uang dan politik. Kelompok itu menerbitkan buku yang menjadi pembicaraan luas: *The Buying of the President* (1996). Banyak data yang diungkapkan secara terbuka tentang siapa menyumbang siapa, berapa banyak, dan apa kompensasinya dalam kehidupan politik di Amerika

Bagusnya Amerika Serikat memiliki mekanisme untuk meminimalisasi pengaruh uang swasta di dunia politik. Yang terpenting adalah aturan hukum *Federal Election Campaign Act of 1974*, Produk hukum ini hanya membolehkan sumbangan pihak swasta ke politisi dalam jumlah yang sangat kecil. Seorang individu hanya dibolehkan menyumbang uang ke seorang politikus paling banyak US\$ 1.000 (Rp 2,3 juta berdasarkan nilai tukar 1996). Jika individu itu menyumbang ke banyak politikus, total sumbangannya tidak boleh lebih dari US\$ 25.000 (Rp 57,5 juta) dalam satu masa pemilihan. Sebuah perusahaan hanya boleh menyumbang ke seorang kandidat US\$ 5.000 (Rp 11,5 juta).

Dengan aturan itu, tidak ada satu individu atau satu perusahaan pun yang punya kontribusi besar membiayai kampanye sang politikus. Jika sang politikus membutuhkan dana dalam jumlah sangat besar, ia harus mencari banyak penyumbang, yang kepentingannya begitu beragam. Produk hukum ini membuat sang politikus tidak merasa berutang budi kepada pihak swasta dan diharap tidak tunduk kepada satu kepentingan.

Suasana politik yang kompetitif, pers yang relatif bebas, dan dokumen tercatat bagi transaksi uang menjadi pengontrol yang afektif penerapan hukum di atas. Pelanggaran aturan itu oleh seorang politikus, individu penyumbang, ataupun perusahaan pemberi dana akan mudah dilacak berdasarkan dokumen tertulis penghasilan dan pengeluaran uang tiap pihak. Para pesaing dengan senang hati menelanjangi kesalahan lawannya. Pers pun mendapat santapan untuk mempublikasikannya. Sekali kesalahan yang berhubungan dengan uang tercium dan terbuka, karier politikus bersangkutan mudah berakhir. Mekanisme ini sangat efektif untuk mengontrol pengaruh uang dalam politik, walau masih banyak lubang di sana-sini.

Bagaimana dengan Indonesia? Di tanah air, situasi mengontrol uang dalam politik lebih sulit karena dua hal. Pertama, uang yang disusupkan ke dalam politik di sini punya fungsi yang lebih jauh dan terselubung dari sekadar biaya kampanye. Seperti dikatakan banyak pengamat, di sini uang juga punya fungsi sebagai penjaga stabilitas dalam konstruksi neopatrimonialisme. Untuk membeli loyalitas politik berbagai kelompok kepentingan yang beragam, distribusi jabatan politik dan kompensasi bisnis menjadi penting. Elite yang kecewa, yang diberi kompensasi bisnis, akan berkurang posisinya terhadap sistem. Keseimbangan elite dan konflik inter-nal mereka akan terjaga karena peran uang sebagai reward atau kompensasi.

Kedua, uang dalam politik di sini menjadi bagian dari state-led capitalism (rent seeking economy). Bentuk pembangunan yang berlangsung di sini lebih banyak dimotori birokrasi. Peran birokrasi

sangat besar, baik sebagai pemberi izin bisnis maupun perumus agenda pembangunan. Mereka yang berkepentingan dengan mudah dan sukarela bersedia memberikan reward uang untuk mendapatkan izin dan privilege bisnis dari birokrasi. Uang menjadi integral dalam konstruksi ini.

Namun, cepat atau lambat, ekonomi kita akan makin rasional dan terbuka. Berbagai distribusi uang yang tidak halal ke dalam politik, baik dalam proses pemilihan umum, neopatrimonialisme, maupun state-led capitalism, akan makin tidak fungsional) dan tidak sesuai dengan sistem ekonomi yang rasional dan efisien. Membuat mekanisme yang mengatur sirkulasi uang dalam proses politik, agar lebih transparan dan terkontrol oleh publik, agaknya sudah hams dipikirkan.

Politik 1996

APA yang terjadi dengan politik Indonesia sepanjang tahun 1996? Jawabannya sederhana : sedang terjadi sebuah pembalikan kecenderungan. Berbagai gerakan yang mengidentitaskan diri sebagai gerakan prodemokrasi dan aksi prates mengalami pelemahan. Awal dari pelemahan ini adalah Hutu-hara 27 Juli 1996. Sebaliknya for-mat politik Orde Barn yang ingin diubah gerakan itu justru mengalami konsolidasi dan makin kuat. Mengapa gerakan prodemokrasi itu gagal?

Sejak akhir 1995, gerakan prodemokrasi mulai ramai dengan beberapa gejala. Pertama, lahirnya berbagai kelompok baru, baik yang mengklaim sebagai lembaga swadaya masyarakat, yayasan sosial, maupun partai politik. Berbagai nama kelompok bertaburan dengan hiruk-pikuknya masing-masing, mulai PNI Baru, Masyumi Baru, Partai Rakyat Demokratik, sampai Komite Independen Pengawas Pemilu. Berbagai tokoh masyarakat terlibat dalam antusiasme kelompok baru itu, mulai dari purnawirawan ABRI, mantan pemimpin redaksi, politisi senior, buruh, intelektual

ternama, sampai aktivis mahasiswa. Kesan cepat pun lahir. Ini gejala bangkitnya civil society yang pada waktunya akan menuntun dan melahirkan demokrasi di Indonesia.

Kedua, makin menyatunya gerakan itu di bawah satu pemimpin. Sejak awal 1996, nama Megawati mulai memasuki pentas politik nasional sebagai pemimpin alternatif. Mitos atas Megawati mulai lahir. Ia mulai dihubung-hubungkan dengan Cory Aquino yang memimpin perubahan di Filipina. Sungguhpun Megawati belum menunjukkan kepiawaiannya dalam politik praktis, simbolnya sebagai pemersatu dan pembawa moralitas baru dalam politik makin dalam. Kesan yang lahir makin kuat lagi bahwa gerakan demokrasi di Indonesia sudah tiba waktunya.

Ketiga, adalah makin menajamnya isu politik. Tuntutan akan ditinjau kembali lima paket Undang-Undang Politik makin bergema. Undang-undang itu, yang antara lain membatasi partai politik, mengontrol organisasi masyarakat, dan menata pemilihan umum serta DPR, dianggap fondasi dari format politik Orde Baru. Terbatasnya partisipasi politik masyarakat dianggap dilegitimasi secara hukum oleh undang-undang itu. Di sisi lain, isu suksesi p rest Jen makin kuat berembus. Isu ini menambah kesan bahwa gerakan demokrasi akhirnya memang akan sampai juga di Indone-sia.

Namun Huru-hara 27 Juli 1996 membalikkan semua kecenderungan di atas. Pembakaran gedung dan potensi kerusuhan politik akibat buru-hara itu menjadi. legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan kontrol atas berbagai kelompok masyarakat. Pelemahan kekuatan masyarakat di atas itu pun terjadi. Sebagian dari mereka menjadi terdakwa di sidang pengadilan dengan ancaman hukuman penjara. Sebagian dari kelompok itu juga dilabel sebagai lembaga yang bermasalah. Spirit perlawanan pun menurun akibat direduksinya basis kekuatan politik mereka.

Pertanyaan yang lebih akademis pun muncul: mengapa gerakan itu gagal di Indonesia, padahal gerakan yang sama berhasil di

berbagai dunia ketiga lainnya? Mengapa format politik Orde Baru justru mengalami konsolidasi, dan tidak berhasil ditekan untuk bertransisi menuju demokrasi, sebagaimana diminta berbagai kelompok masyarakat di atas?

Menarik untuk disimak penelitian Hazard dan Kaufman (1996) untuk dikaitkan dengan situasi politik di Indonesia. Dua ilmuwan itu melakukan penelitian empiris atas 12 negara yang berhasil bertransisi ke demokrasi sejak tiga dekade ini, di samping beberapa negara yang tetap otoritarian.

Dua dari banyak faktor yang Haggard dan Kaufman anggap paling menentukan perubahan politik adalah krisis ekonomi dan kekuatan lembaga eksekutif. Krisis ekonomi dapat membuat konstelasi politik berubah akibat berkurangnya insentif dan profit ekonomi yang dapat diberikan sistem itu ke berbagai kelompok politik. Kelompok elite yang sedang berkuasa dengan mudah mengalami fragmentasi dan konflik internal. Massa makin mudah diradikalisasi. Sementara itu oposisi, yang mempunyai program mengubah sistem, mendapat daya tarik yang lebih besar.

Namun perubahan sistem tidak cukup kuat didorong jika lembaga eksekutif sistem lama masih mampu mengontrol kekuatan politik utama. Dari kasus yang diteliti Haggard dan Kaufman, kekuatan terpenting bagi lembaga eksekutif adalah dukungan militer dan peran partai politik. Selama partai politik yang berkuasa masih mampu mengkooptasi dan dukungan militer terjaga, konsolidasi sistem lama juga terjaga.

Dua hal di atas lah yang dapat menjelaskan mengapa gerakan prodemokrasi di Indonesia tahun ini bukan saja tidak berhasil, melainkan juga mengalami pelemahan. Gairah politik di kalangan masyarakat luas tidak bertemu dengan krisis ekonomi nasional. Akibatnya, kelompok yang ingin terlibat dalam perubahan sangat terbatas karena kenyamanan ekonomi yang dapat diberikan sistem. Di samping itu, lembaga eksekutif masih sangat kuat. Wibawa

Soeharto begitu tinggi dan berhasil menyatukan bukan saja militer dan Golkar sebagai partai yang berkuasa, melainkan juga kelompok dominan masyarakat, seperti kelompok Islam.

Tamat kah gerakan prodemokrasi di Indonesia? Yang frontal boleh jadi memang melemah, tetapi tidak dengan gerakan reformasi yang lebih sabar dan strategis, dengan memilih perubahan perlahan dan bekerja sama dengan reformis yang berada di tubuh pemerintahan sendiri, sebagaimana terjadi di banyak negara lain.

Fleksibel?

SALAHKAH Tony Blair? Mei 1997 ini ia terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru. Namun sebagaimana Bill Clinton di Amerika Serikat, ia mendatangkan kontroversi yang dilematis. Ia memenangkan pemilihan umum dengan banyak mengadopsi program partai lawan dan meninggalkan platform partainya. Salah kah pemimpin yang berupaya mengikuti selera publik seraya meninggalkan keyakinan lamanya?

Sebagaimana dilakukan Bill Clinton. Blair memiliki tim untuk membaca kecenderungan bam publik. Tim ini terdiri dari para ahli statistik yang melakukan pol pendapat di masyarakat luas ataupun eksperimen dalam fokus grup. Bersama para ahli strategi, tim ini memberi masukan kepada Blair tentang isu-isu dan visi politik yang disukai publik. Juga berbagai saran tentang seberapa jauh Blair hams meninggalkan prinsip lama partai, dan mengadopsi visi politik yang baru, agar memperoleh dukungan mayoritas.

Berdasarkan riset itu, Blair mendapat bahan yang penting untuk menulis ulang konstitusi partai, mengubah ideologi dan visi partai, serta merumuskan isu-isu baru untuk menarik pendukung. Ia meyakinkan pendukung lama partainya bahwa zaman sudah berubah dan ia harus mengubah visi partai. Ia meyakinkan masyarakat banyak bahwa partai yang dipimpinnya adalah partai dengan wajah baru.

Kini kita mungkin hidup di sebuah zaman ketika ideologi tidak lagi dikeramatkan dan dipertahankan mati-matian. Zaman berubah cepat. Political mood publik juga cepat berganti. Para politikus yang karirnya bergantung pada opini publik cenderung memilih keyakinan politik yang pragmatis dan eklektis. Berbagai prinsip yang tadinya ditentang dapat diambil dan dimodifikasi karena publik mulai menyukainya. Tidak penting dari mana sumber prinsip itu, dari ideologi yang kekiri-kirian atau yang kekanan-kananan, sejauh ia mendapat dukungan publik.

Inilah yang terjadi pada Partai Buruh Inggris. Awalnya partai ini ingin mengkombinasikan program ekonomi sosialisme dengan politik demokrasi. Mereka menginginkan keadilan ekonomi, sebagaimana dijanjikan sosialisme, tetapi tidak menyukai politik totalitarian negara sosialis seperti Uni Soviet. Lalu sejak tahun 1930-an, ideologi sosial demokrasi tersebut berkembang menjadi *wel-fare state*, yang menghendaki peran aktif pemerintah untuk memajukan ekonomi dan mendistribusikan kekayaan.

Pada tahun 1960-an, mereka mengadopsi prinsip kebudayaan baru sebagai pasangan program politik ekonominya. Di zaman yang dijuluki *Flower's Generation*, berkembang berbagai sentimen anti-establishment terhadap kemapanan dan agama, serta seruan atas kebebasan. Isu hak asasi, emansipasi wanita, hak minoritas, masyarakat multikultur, dan gerakan homoseksual, serta kultur sekuler tumbuh pesat. Prinsip itu menjadi agenda kebudayaan mereka.

Namun sejak dekade 1980, dengan tampilnya politikus konservatif Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat, situasi berbalik. Dua figur raksasa ini membawa perubahan mendasar dengan mengubah public mood zamannya untuk lebih konservatif.

Kini sebagian besar doktrin lama buruh itu sudah diluluhlantakkan. Demokrasi dalam sistem ekonomi sosialisme adalah hal yang mustahil. Welfare state dikritik sebagai sumber kebangkrutan ekonomi. Nilai tradisi dan agama yang mereka tentang justru kini tengah bangkit dengan gagah, seperti nilai keluarga.

Menghadapi perubahan political mood publik ini, apa yang harus dilakukan seorang pemimpin yang ingin dipilih oleh mayoritas publiknya? Haruskah ia bertahan dengan keyakinan lama partai, dan berharap suatu ketika akan kembali mengobati political mood publik? Jika melarutkan diri dalam selera baru publik dan menentang keyakinan lamanya, tidakkah ia berkhianat dan menjadi seorang oportunis?

Tony Blair di Inggris dan Bill Clinton di Amerika Serikat menjawab: tidak. Keduanya memilih berubah mengikuti political will publik dan menentang keyakinan lama partainya. Tony Blair dan Bill Clinton mengubah banyak ideologi partainya yang kiri (liberal) dan mengadopsi berbagai visi politik yang kanan (konservatif)- Dan keduanya memenangkan pemilihan umum.

Blair, misalnya, mengumumkan bahwa ia tidak lagi percaya pada prinsip yang dulu menjadi landasan partainya, seperti peran pemerintah yang besar dan program kesejahteraan. Ia menarik jarak dari serikat buruh, yang dulu menjadi pendukung utama partainya. Ia memberi tempat untuk kalangan bisnis dan nilai-nilai keluarga, yang dulu hanya menjadi platform partai saingannya. Ia mereformasi total visi partai. Hal yang kurang lebih sama terjadi pada Clinton.

Untuk menjadi politikus populer di zaman ini, agaknya orang tidak mungkin lagi bersikap layaknya seorang ideolog, yang punya kesetiaan bulat-bulat pada satu ideologi. Untuk menjadi pemimpin

masyarakat yang beragam, mungkin dituntut sejenis fleksibilitas dalam berhubungan dengan dunia ide, sebagaimana yang ditampakkan Tony Blair.

Konflik Kepentingan

PARA anggota DPR-RI kini sedang disorot, karena sebagian dari mereka mendapat tambahan penghasilan berupa honor jutaan rupiah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Padahal mereka sudah memperoleh honor resmi dari negara sebesar Rp 750.000, untuk membahas sebuah RUU. Tentu saja mereka menerima gaji setiap bulan.

Tetapi kasus ku sebenarnya bukan khas Indonesia. Amerika Serikat, yang terkenal sangat ketat menjaga “kebersihan” wakil rakyat atau pejabat negara, pernah mengalami kasus serupa. Kira-kira 90 tahun silam, tepatnya pada 1903, Senator Joseph Weldon Bailey mengaku mendapat tambahan keuntungan pribadi yang sama dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Ketika didesak publik mengapa bersedia menerima imbalan tambahan untuk sesuatu yang memang menjadi tugasnya, Bailey menjawab enteng. “Jika rakyat yang memilih saya menginginkan wakil rakyat harus bersedia miskin, dengan asumsi agar dapat

bekerja dengan baik, maka sebaiknya rakyat memilih orang lain. Saya sengaja mencari tambahan uang sebanyak-banyaknya secara sah, tanpa harus mengganggu dan mempengaruhi tugas saya sebagai wakil rakyat," kata Bailey.

Kini zaman sudah berubah. Amerika Serikat telah memperkenalkan konsep baru bagi mereka yang bekerja sebagai pejabat publik, baik di legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Itu disebut sebagai konsep konflik kepentingan (*conflict of interests*). Berdasarkan konsep itu, Bailey dengan mudah dituduh melanggar kode etik pejabat publik atau bahkan melakukan tindak kriminal korupsi, sebab telah memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik (wakil rakyat) untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam bentuk tambahan kekayaan di luar gaji resmi.

Dalam sejarah Amerika Serikat, konsep konflik kepentingan mulai diperkenalkan seiring dengan tumbuhnya bisnis besar pada awal abad ini. Mengingat kegiatan bisnis terasa begitu berkuasa dan cenderung mengeksploitasi keuntungan materiil sebanyak-banyaknya, timbul pemikiran untuk melindungi kepentingan publik dan mengimbangi pengaruh bisnis besar. Dan pemerintah dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menjaga dan melindungi kepentingan publik itu.

Posisi di pemerintahan dibuat impersonal. Siapa saja yang menduduki jabatan tertentu harus melupakan kepentingan pribadi dan harus berperilaku sebagai wakil kepentingan publik. Ini tentu bukan hal mudah. Seorang pejabat adalah seorang pribadi juga, yang pasti mempunyai kepentingan pribadi. Maka acapkali muncul konflik kepentingan setidaknya dalam diri para wakil rakyat apakah sah bila mereka menerima penghasilan tambahan dari kegiatan di luar tugas sebagai wakil rakyat.

Kegiatan apa saja yang menjadi sumber penghasilan tambahan itu dan berpotensi menyulitkan para wakil rakyat di Amerika Serikat? Pertama, jika wakil rakyat itu memiliki sumber penghasilan

di luar pemerintahan. Misalnya bekerja atau memiliki saham di sebuah perusahaan swasta. Dengan sendirinya, sang wakil rakyat itu berkepentingan membuat keputusan yang menguntungkan perusahaannya.

Kedua, jika wakil rakyat mendapat imbalan materiil dari pihak swasta yang berupaya mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan publik. Imbalan dapat diberikan dengan cara kasar atau balm. Yang kasar, misalnya, imbalan itu diberikan secara langsung, yakni setelah sang wakil rakyat berhasil menggolkan kepentingan pengusaha. Yang halus, imbalan itu diberikan tersamar, misalnya sang wakil rakyat diminta memberikan ceramah di kalangan komunitas tertentu, lalu diberi honor yang sangat besar. Dengan demikian, diharapkan orang akan mengira honor itu adalah imbalan ceramah.

Maka, untuk mengontrol dan mengantisipasi hal-hal tersebut, Amerika Serikat membuat mekanisme yang membatasi kegiatan wakil rakyat. Antara lain, wakil rakyat tidak boleh bekerja atau memiliki saham di perusahaan swasta yang dapat dipengaruhi kebijaksanaan publik. Wakil rakyat juga tidak boleh menerima imbalan materi tambahan dari pihak swasta untuk pekerjaan yang memang menjadi tugasnya, seperti bersidang untuk menggolkan sebuah undang-undang.

Namun mereka boleh mendapat honor tambahan dari pekerjaan yang tidak mempengaruhi tugasnya, seperti mengajar, memberikan ceramah, atau menulis buku. Guna mengontrol agar jangan sampai honor tambahan tersebut merupakan kamufase untuk menyogok wakil rakyat, jumlah honor itu dibatasi maksimal 15% dari gaji tetapnya. Berbagai pemberian materiil kepada wakil rakyat, seperti hadiah ataupun ucapan terima kasih, dibatasi tidak melebihi jumlah tertentu. Lebih dari itu, wakil rakyat diminta membuat laporan keuangan secara tertulis yang siap dievaluasi, dicek oleh akuntan publik.

Sebuah komite dapat dibentuk untuk memeriksa wakil rakyat yang dicurigai membuat laporan keuangan palsu ataupun tidak lengkap. Pers yang relatif bebas siap menginvestigasi berbagai potensi korupsi ataupun pelanggaran etik wakil rakyat. Sementara itu, persaingan yang tinggi di antara wakil rakyat dan politisi di Amerika Serikat pun membuat mereka berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan jika tidak ingin karier hancur. Mekanisme yang keras itu relatif berhasil mengontrol konflik kepentingan wakil rakyat di Amerika Serikat.

Agaknya mekanisme untuk mengontrol konflik kepentingan para pejabat publik di Indonesia sudah harus dipikirkan dan diterapkan sebelum kepercayaan publik atas lembaga negara makin memudar.

MELEWATI TRANSISI POLITIK

ABRI di Era Baru

MUNGKINKAH ABRI di era reformasi ini akan berkembang seperti militer di berbagai negara Amerika Latin? Sebagaimana ABRI, militer di negara Amerika Latin, sebelum bertransisi menuju demokrasi, sangat terlibat aktif di dunia politik. Bahkan, lebih dari ABRI, beberapa negara di sana pernah dipimpin langsung oleh junta militer.

Sebagaimana di Indonesia, sisi gelap peran politik militer itu juga terjadi di sana, bahkan jauh lebih mengerikan daripada di Indonesia. Untuk banyak kasus, pelanggaran hak asasi di Amerika Latin jauh lebih buas. Di Argentina, misalnya, dari 1976 sampai 1979, sebanyak 10.000-30.000 orang dinyatakan *desaparesidos* -istilah Latin untuk menyebut orang hilang sebagai korban politik militer. Pihak militer menamakan era itu sebagai “perang suci” (holy war). Setelah 20 tahun berlalu, era itu disebut “era barbar” (dirty war).

Namun, pada 1980-an, negara-negara di Amerika Latin melakukan transisi ke demokrasi. Berbagai perubahan mendasar di bidang politik dilakukan, kurang lebih sama dengan apa yang akan

dilakukan di Indonesia sekarang, di bawah pemerintahan Presiden IJ. Habibie- Partai politik dan militer di Amerika Latin melakukan si internal secara mendasar. Secara bertahap, pihak militer berubah dari militer politik menjadi militer profesional, yang meninggalkan panggung politik. Militer menyerahkan urusan politik kepada kompetisi demokratis para pemimpin sipil. Sebagaimana pegawai negeri, mereka memilih netral dan tunduk pada supremasi sipil.

Akankah ABRI melakukan hal yang sama? ABRI tentu menghadapi kesulitan besar untuk membuat perubahan mendasar atas perannya. Namun, kesulitan yang dihadapi ABRI juga dialami militer di berbagai negara lain. Samuel Huntington (1991) melakukan studi khusus tentang kesulitan perubahan peran militer dari negara otoritarian menuju negara demokrasi.

Huntington membagi perubahan peran militer ke dalam tiga jenis negara otoritarian. Pertama, perubahan peran militer di bekas negara sistem satu partai. Contohnya Taiwan, Polandia, Rumania, dan berbagai negara bekas komunis di Eropa Timur. Semula negara-negara itu adalah negara diktator satu partai. Penguasa tunggal adalah partai. Militer menundukkan diri pada partai.

Ketika negara-negara itu bertransisi ke demokrasi, peran militer pun berubah. Sistem satu partai berubah menjadi sistem multipartai. Militer lalu mengambil jarak yang sama terhadap partai. Misi militer diubah dari pendukung partai menjadi pendukung negara. Dalam tipe ini, praktis perubahan peran militer tidak terlampau sulit. Sejak awal, sejak dalam sistem satu partai, militer memang sudah menundukkan diri pada supremasi sipil.

Kedua, perubahan peran militer dari negara diktator tunggal (personal dictatorship). Contohnya Filipina di era Marcos, Yunani, Sudan, dan Nigeria. Dalam tipe negara ini, militer sangat dipolitisasi dan dijadikan alat penguasa untuk mengekang bahkan melakukan teror terhadap gerakan oposisi. Ketika ripe negara ini bertransisi menuju demokrasi, pihak militer lebih punya kesulitan dibandingkan

dengan militer dari tipe negara satu partai. Mereka terbiasa dipolitisasi, dan kini ingin diasingkan dari medan politik. Berbagai keistimewaan yang selama ini mereka terima akan menghilang, bersamaan dengan hilangnya peran politik mereka.

Respons militer pada tipe negara ini sangat berbeda. Huntington, misalnya, mencatat bahwa terjadi beberapa kali percobaan kudeta militer terhadap pemerintah demokratis yang baru. Namun, kudeta itu umumnya gagal. Di era sekarang, sangat sulit mencari dukungan internasional untuk kudeta militer. Kelompok sipil yang kuat cenderung memusuhi kudeta militer. Bahkan, petinggi militer pun tidak menganggap kudeta sebagai pilihan politik yang berharga. Tidaklah mengherankan jika kudeta itu umumnya dipimpin oleh hanya perwira menengah, seperti Kolonel Gregorio Honasan (Filipina) atau Letnan Kolonel Antonio Tejero (Spanyol).

Ketiga, perubahan peran militer dari negara rezim militer. contohnya bisa dilihat di berbagai negara di Amerika Latin, seperti Cile, Argentina, Peru, dan Brasil. Inilah perubahan peran militer yang tersulit. Pada tipe negara ini, militer sangat terlembaga dan kuat. Transisi ke demokrasi di kawasan ini bahkan banyak pula yang dipimpin oleh militer sendiri.

Manakala berbagai negara ini bertransisi, peran militer berubah lambat. Militer masih menginginkan hak-hak khusus, yang asing bagi prinsip demokrasi. Misalnya, hak untuk mendeklarasikan undang-undang darurat berada di tangan komando militer, bukan pemimpin sipil. Atau membantu institusi pemerintahan baru, yang didominasi aparatur militer, seperti Council of Revolution di Portugal. Atau mendominasi posisi kunci di kabinet pemerintahan sipil. Atau hak khusus mengintervensi politik untuk menjaga keselamatan negara.

Namun, kesulitan tersebut setahap demi setahap dapat diatasi pemimpin militer dan sipil di kawasan itu. Pelatihan, pendidikan, dan kurikulum atas militer muda yang menekankan etik militer profesional dan kontrol sipil atas militer dilakukan secara intensif.

Mereka pun diberi misi baru sebagai penjaga keamanan negara yang tidak berpolitik. Di kawasan itu, sekarang Menteri Penahanan dijabat sipil. Ini merupakan indikator bahwa kaum sipil adalah pengambil keputusan politik dan keamanan.

Jika demokrasi memang menjadi komitmen pemimpin ABRI dan sipil di Indonesia, maka kasus militer di Amerika Latin adalah pelajaran berharga. Norma dan etika militer profesional, serta supremasi sipil atas militer, telah meluas dan menjadi moral politik dunia. Pemimpin ABRI kini mempunyai kesempatan bersejarah untuk mereformasi perannya.

Manajer Reformasi

GERAKAN reformasi masa kini sangat memprihatinkan karena telah kehilangan manajernya yang efektif. Di era sebelum lengsernya Soeharto, kita masih punya dua manajer yang mampu Menyatukan dan memberi fokus perubahan. Pertama, Amien Rais, yang menjadi juru bicara dan bermain di tingkat elite. Kedua, gerakan mahasiswa, yang bergerak di level massa. Sekarang keduanya telah kehilangan momentum.

Amien Rais kini sudah menjadi pemimpin sebuah partai. Di era kompetisi partai, puluhan partai lainnya tidak lagi ingin menjadikan Amien Rais sebagai imam gerakan. Sebaliknya, Amien dipandang sebagai kompetitor yang mengancam. Amien tidak lagi menjadi figur sentral. Kewibawaan politiknya merosot jauh dibandingkan dengan sebelumnya.

Gerakan mahasiswa mengalami nasib yang serupa. Fragmentasi politik masyarakat kini juga memasuki dunia kemahasiswaan. Mereka yang dulu bersatu dalam gerakan moral kini terpecah belah dalam

aneka pengelompokan politik. Makin sulit bagi kelompok mahasiswa untuk membuat gerakan bersama. Kekuatan mereka, sebagai kelompok penekan, akibatnya merosot jauh. Simpati masyarakat kepada gerakan mahasiswa juga telah sangat berkurang.

Hilangnya manajer yang efektif mengakibatkan gerakan reformasi kini menjadi tumpul. Pada awalnya gerakan ini bagai air bah yang luar biasa kekuatannya. Hanya dalam waktu beberapa bulan, politik masyarakat yang sebelumnya begitu lemah mampu mentransformasikan diri secara sangat cepat, dan menjadi kekuatan politik yang sangat ampuh. Ujungnya, gerakan itu berhasil menjatuhkan sebuah rezim otoriter, salah satu rezim yang terkuat dan terlama di Asia.

Akibat gerakan itu, terjadi perubahan besar dalam politik di Tanah Air. Jelaslah, kini Indonesia udak dapat dikategorikan sebagai negara otoriter lagi. Kebebasan berorganisasi dan pers, hilangnya monoloyalitas pegawai negeri atas Golongan Karya (Golkar), serta pulihnya hak memilih dan dipilih para anggota PKI adalah perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini tidak terbayangkan oleh siapa pun tiga tahun lampau.

Namun, sebelum transisi ke demokrasi itu terjadi secara tuntas, gerakan reformasi telah kehilangan momentum. Akibatnya, kini kita hanya berada dalam kondisi transisi yang labil. Sistem otoriter sudah tertolak, namun demokrasi yang sejati belum diraih. Kekuatan penekan reformasi menuju demokrasi yang tuntas sudah keburu loyo. Di DPR, para wakil rakyat sudah tidak lagi berdebat tentang perlu tidaknya pengangkatan wakil ABRI sebagai anggota lembaga tersebut. Perdebatan sudah bergeser ke jumlah anggota ABRI yang harus diangkat. Sungguhpun pembahasan mengenai jumlah itu sangat alot, namun dari perspektif demokrasi, pembahasan tersebut tidak signifikan. Berapa pun jumlah yang diangkat telah membuat lembaga perwakilan rakyat itu tidak lagi merupakan representasi dari hasil kompetisi politik melalui pemilihan umum (pemilu) secara murni. Pemilu Juni 1999 makin berisiko pula. Benar bahwa

pemilu adalah satu-satunya mekanisme yang demokratis untuk mendapatkan legitimasi politik. Namun, pemilu tersebut selalu dibayangi oleh ancaman kerusuhan massal.

Pemilu tersebut terlalu mudah digagalkan oleh kerusuhan spontan masyarakat yang makin tinggi kemarahannya. Apalagi jika dikomando oleh provokator profesional, pencurian kotak suara dapat terjadi di banyak tempat, dan dengan mudah dapat dijadikan alasan untuk mengurangi legitimasi pemilu. Supremasi sipil atas militer belum mampu diwujudkan. Reformasi atas konstitusi UUD 1945 yang banyak cacatnya itu juga belum dapat dikerjakan. Netralitas pegawai negeri masih terus dalam perdebatan. Krisis ekonomi yang ada juga memperburuk pertarungan politik.

Perubahan yang baru mampu diraih oleh gerakan reformasi hanyalah demokrasi yang terbatas dan labil. Demokrasi yang terbatas seperti sistem sekarang itu tidak dapat secara otomatis berubah menjadi demokrasi yang penuh. Tidak ada jaminan pula demokrasi yang terbatas ini hanya untuk sementara di era transisi saja. Demokrasi terbatas tersebut dapat saja berlangsung selamanya. Turki adalah contoh negara yang menerapkan demokrasi terbatas sejak 1950-an sampai kini. Belum ada tanda-tanda Turki akan berubah menuju demokrasi penuh setelah 40 tahun lebih keluar dari negara otoriter. Apakah Indonesia akan mengikuti jejak Turki?

Memang, literatur demokratisasi mutakhir tidak lagi menyerahkan soal demokratisasi kepada perkembangan hal makro, misalnya kemajuan ekonomi, bertambahnya kelas menengah, atau menguatnya kultur liberal. Demokratisasi sepenuhnya dianggap persoalan craftsmanship. Yaitu persoalan kerja politik para aktor. Adalah kepiawaian, strategi, pilihan nilai para aktor politik itu sendiri yang akan menentukan demokratisasi, bukan aktor lainnya. Peran seorang manajer yang efektif sangatlah sentral dalam menyatukan para aktor perubahan tersebut. Ironisnya, justru manajer efektif itulah yang kini absen, Kini kita terombang-ambing. Sistem otoriter lama memang telah kehilangan pemimpin efektifnya. Namun,

gerakan reformasi juga mengalami hal yang sama. Orde Baru agaknya memang terlalu kuat untuk roboh hanya dalam sekali pukul.

ABRI, Perubahan Ideologi

SEJAK Soeharto lengser, ada beberapa reformasi internal yang dilakukan ABRI. Kebijakan yang terakhir adalah memisahkan polisi dari ABRI, serta memensiunkan ABRI yang aktif di sektor sipil. Sebelumnya, ABRI sudah mengurangi perwakilannya di parlemen.

Apakah ini perubahan dalam gradasi Dwifungsi ABRI, ataukah perubahan bertahap menuju ideologi ABRI yang baru? Jika hanya perubahan gradasi, berarti tidak akan ada perubahan ideologi - ABRI tetap berpolitik, walau udak seluas dan seintensif dulu. Jika ini gejala perubahan ideologi secara bertahap, ada kemungkinan ABRI keluar dari politik, menjadi tentara profesional sebagaimana layaknya di negara demokrasi modern.

Di negara berkembang yang bertransisi menuju demokrasi, ada dua jenis perubahan ideologi militer. Pertama, model perubahan ideologi di Filipina. Kedua, model Turki. Di Filipina, setelah jatuhnya Marcos, secara bertahap militer meninggalkan politik. Di Turki, setelah 40 tahun menyelenggarakan pemilu demokratis, militer tetap saja berpolitik.

Filipina dan Turki memiliki ideologi militer yang berbeda. Filipina adalah bekas koloni Amerika Serikat yang kuat dalam tradisi supremasi sipil. Di era Marcos, tentara memang dilibatkan dalam namun hanya menjadi mitra junior, bukan pemain. Setelah tumbang Marcos, tentara dengan lebih mudah digiring kembali ke barak.

Turki tidak pernah kuat dengan tradisi supremasi sipil. Turki negara dengan peradaban Islam yang mendalam. Kemal Ataturk, "Bapak Turki Modern", ingin mengubah Turki menjadi negara modern yang sekular, bukan negara Islam. Secara khusus, militer diberi peran politik untuk menjaga kelangsungan negara sekuler itu.

Militer di Indonesia agaknya di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada desakan kuat agar ABRI keluar dari politik. Lalu, Indonesia mengikuti negara Filipina untuk berdiri di atas prinsip supremasi sipil. Negara tetangga kita lainnya, seperti Malaysia dan Singapura, juga melarang militer berpolitik.

Tetapi, di sisi lain, para pimpinan ABRI khawatir terjadinya disintegrasi bangsa akibat konflik etnik, ras, dan agama. Kasus Ketapang, Ambon, dan Sambas akan terus menjadi bayangan buruk. Sementara itu, ancaman kembalinya aspirasi negara Islam juga belum sepenuhnya dianggap hilang.

Sebagaimana di Turki, alasan ini dapat membuat ABRI ingin tetap berpolitik dengan misi khusus dan penting. Yaitu menjaga negara kebangsaan Indonesia yang utuh, dan tidak berubah menjadi negara agama. Turki menjadi kiblat ABRI. Berdasarkan literatur ada tiga kesulitan besar jika militer masih tetap

Pertama, militer yang terlibat dalam politik akan merusak kompetisi politik. Negara demokrasi mempunyai banyak partai politik. Jika partai politik itu berkompetisi secara politik, ada yang menang dan yang kalah. Partai yang menang akan mengendalikan pemerintahan, yang kalah akan menjadi oposisi.

Namun, negara demokrasi hanya punya satu korps militer. Jika dikalahkan secara politik, mustahil militer menjadi oposisi. Keamanan negara dan monopoli senjata perang berada di tangan militer. Jika militer dibiarkan terlibat dalam politik, maka sistem kompetisi politik akan rusak. Padahal, kompetisi politik adalah elemen penting demokrasi.

Kedua, militer yang terlibat politik akan mendistorsikan kebijakan politik. Negara demokrasi memisahkan secara tegas antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan politik. Pengambilan kebijakan politik diserahkan kepada partai yang menang pemilu.

Semua pihak dimungkinkan mengambil kebijakan politik negara dengan cara mengikuti dan memenangkan pemilu. Sedangkan pelaksana kebijakan politik diserahkan kepada aparatur negara, dalam hal ini birokrasi dan militer. Karena sifatnya sebagai aparatur negara, militer dinetralkan secara politik.

Jika sebagai aparatur negara, militer juga berpolitik, apa jadinya jika politik militer berbeda dengan partai yang memenangkan pemilu? Bayangkan jika pemimpin partai yang menang pemilu memiliki kebijakan politik A. Sedangkan militer sebagai pelaksana di lapangan memiliki kebijakan yang anti-A. Maka, warna kebijakan politik itu akan dirusak pada tingkat pelaksanaannya.

Ketiga, militer sudah ditugaskan untuk menjaga keamanan negara. Jika militer juga diberi peran politik, militer dapat menjadikan keamanan negara itu sebagai kartu truf dalam rangka bargaining politik keamanan, dan kerusuhan itu dapat digoyang-goyang dalam rangka bargaining politik. Itu jelas membahayakan keselamatan negara.

Kini, saatnya pemimpin ABRI menegaskan model reformasi internalnya. Model Filipina atau Turki? Jika ABRI ingin mengikuti arus dunia, tentu model Filipina itu yang harus dijadikan pilihan. Lalu, pemimpin ABRI membuat jadwal yang dapat dikontrol, kapan keluar dari politik.

Habibie Berburu Singa, Ditelan Singa

DALAM sejarah, banyak tokoh yang melakukan pembaruan dan inovasi politik. Hanya sebagian yang berhasil. Kemal Ataturk di Turki, Suarez di Spanyol, dan Cory Aquino di Filipina termasuk inovator yang berhasil. Gorbachev di Uni Soviet dan Alexander Dubcek di Cekoslovakia termasuk yang gagal.

Bagaimana dengan Habibie? Sudah cukup banyak pembaruan politik yang Habibie lakukan. Pers sudah bebas. Partai politik dapat didirikan siapapun. Kasus terakhir yang paling mengguncangkan publik adalah referendum bagi Timor Timur. Akankah Habibie sukses seperti Cory Aquino atau gagal seperti Gorbachev?

Kita khawatir, Habibie terkena "Gorby Syndrome". Istilah ini dilabelkan kepada para pembaharu politik yang kemudian mengalami komplikasi dan kesulitan sebagaimana yang terjadi pada Gorby, panggilan akrab Gorbachev.

Gorbachev melakukan aneka pembaruan politik di Uni Soviet, Namun, ia tidak menyiapkan struktur pendukung yang memadai bagi

perubahan yang terjadi. Akibatnya, pembaharuan dan perubahan yang dilakukan menghasilkan efek samping yang rumit. Perubahan terjadi di luar kendali Gorbachev, dan menimbulkan kemarahan massal. Bukannya mendapatkan kredit politik, Gorbachev malah ditinggalkan publiknya dan terjungkal dari kekuasaan.

Sebagaimana Gorbachev, Habibie kini menghadapi komplikasi dan kesulitan serupa akibat inovasinya. Referendum di Timor Timur dan kebebasan pers sebagai contohnya. Dari sisi demokrasi dan konstitusi negara, tidak ada yang salah dengan memberikan referendum bagi rakyat Timor Timur. Prinsip self-determination (hak komunitas untuk menentukan nasibnya sendiri) celah menjadi sokoguru peradaban modern. Langkah Habibie menawarkan referendum adalah inovasi politik penuh risiko yang gemilang. Walau kini ia dikecam, generasi mendatang akan mengenangnya dengan pujian.

Kesalahan Habibie lebih pada kesalahan strategi dan prosedur politik, bukan pada isi politik. Habibie tidak menyiapkan strategi yang jelas jika rakyat Timor Timur memilih merdeka. Akibatnya, kemarahan publik yang kaget atas “kekalahan” Indonesia ditimpakan ke atas pundak Habibie. Seandainya Habibie mengajak MPR terlebih dahulu untuk mendukung kebijakannya, efek dari kemarahan publik itu sebagian besar akan dipikul MPR.

Kesalahan lain, Habibie tidak menyiapkan perangkat keamanan yang memadai pasca referendum. Padahal, Timor-Timur saat itu menjadi tontonan dunia. Aneka kekerasan yang berdarah, yang menyebabkan tewasnya puluhan manusia, menambah buruk citra Habibie. Ia yang tadinya mendapat pujian internasional karena Keberaniannya menawarkan referendum, kini balik dikritik.

Hal yang sama terjadi dengan kebebasan pers. Kebijakan Habibie atas pers setelah jatuhnya Soeharto terbilang luar biasa. Pers kini dapat mengusut dan mempublikasikan berita secara telanjang dan bebas. Pers yang bebas adalah pilar terpenting terbentuknya pemerintahan yang terkontrol oleh publik.

Kesalahan Habibie, kebebasan pers itu tidak ia barengi dengan kebersihan pemerintahannya sendiri. Akibatnya, kebebasan pers yang Habibie Berburu Singa, Ditelan Singa ia bahkan berbalik menghantam aneka skandal pemerintahannya. Habibie yang membuka kebebasan pers, kini menjadi korban pal-ing ganas dari kebebasan pers itu sendiri. Skandal Bank Bali adalah contohnya. Satu per satu pembantu dekatnya ditelanjangi pers. Makin keterlibatan pejabat pemerintah ditutupi, makin banyak hal yang tidak masuk akal. Makin bergairah pula pers mengungkapnya.

Mengapa Habibie sebagai pembaru terkesan tidak sekuat Kemal Ataturk atau Cory Aquino? Dua hal yang menjadi sebab. Penama, warisan politik dan ekonomi Orde Bam sudah sedemikian mengakar. Warisan ini tidak dapat dicabut secara cepat, apalagi oleh Habibie yang turut terkait dalam warisan itu.

Untuk kasus Timor Timur, proyek integrasi itu sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Kepentingan politik dan bisnis politisi sipil atau militer sudah tertanam kuat di sana. Sentimen nasional Indonesia sudah pula dihidup-hidupkan di kalangan sebagian dice Timor-Timur. Begitu besar kepentingan yang terganggu akibat perubahan politik yang akan dibuat oleh kelompok prokemerdekaan. Mereka yang terganggu itu akan melawan Habibie.

Untuk kasus Bank Bali, money politics sudah mentradisi selama 32 tahun berkuasanya Orde Bam. Stabilitas politik yang begitu terjaga, dan ketokohan Soeharto yang tidak tergugat, dibangun berdasarkan money politics itu. Penguasa politik membeli dukungan dan loyalitas politik melalui distribusi aneka proyek negara dan uang publik. Pendukung utama Habibie yang juga adalah elite utama Orde Baru era Soeharto menerapkan pola yang sama. Habibie terperangkap dalam pola itu. Bedanya, pers di era Soeharto dapat dibungkam, pers di era Habibie dapat menggonggong sekerasnya.

Kedua, hal ini juga disebabkan oleh kapasitas politik Habibie sendiri. Seandainya Habibie lebih lihai secara politik, dan lebih kuat,

manuver yang dilakukannya akan berbeda. Kasus Timor Timur adalah cerminan kurang canggihnya permainan politik Habibie.

Jika sejak awal ia melibatkan MPR, Habibie tidak akan terpuruk sendirian seperti sekarang. Sedangkan skandal Bank Bali membuktikan kurang kuatnya Habibie untuk mempengaruhi lingkungan pendukungnya. Bukan visi inovasi Habibie yang mempengaruhi pendukungnya, melainkan "sentimen kriminal" pendukungnya yang mempengaruhi kebijakan pccih-rini.ih.in Habibie.

Habibie bagaikan berburu singa. Ia kurang terlatih dan hanya punya belati kecil. Akibatnya, justru ia yang ditelan singa.

Bondan Gunawan: Percikan Gunung Es

KETIKA Habibie naik ke puncak kekuasaan, banyak hal sulik yang bisa ia lakukan. Sistem politik Indonesia, yang sebelumnya berwatak otoriter, diubahnya menjadi liberal dan demokratis dalam kurun» waktu sangar cepat. Namun, penjarahan uang oleh elite kekuasaan tetap terjadi dan tidak dapat diatasinya. Kasus Bank Bali, yang melibatkan kalangan dekat istana, terbongkar dan tidak kunjung selesai sampai saat ini.

Ketika Gus Dur menjadi presiden, banyak pula hal sulit yang diatasi. Di bawah Gus Dur, militer bisa dikontrol, dan secara pasti akan digiring meninggalkan politik. Namun, sekali lagi, penjarahan uang oleh elite kekuasaan tetap terjadi. Kasus raibnya Rp35 milyar dana Bulog secara gamblang menunjukkan keterlibatan istana.

Dua tahun sejak maraknya gerakan reformasi, lanskap persoalan bangsa menjadi jelas. Menghilangkan korupsi dan penjarahan uang oleh elite penguasa ternyata jauh lebih sulit daripada mengendalikan militer ataupun meliberalkan sistem politik.

Jika Habibie gagal menghapus tradisi penjarahan uang, banyak yang mafhum. Bukankah sebagian besar dari elite di seputar Habibie bagian dari rezim Orde Baru yang sudah lama terserap dalam jarahan? Namun, bagaimana menjelaskan pemerintahan Gus Dur? Bukankah Gus Dur dan elite baru pemerintahan reformasi adalah tokoh masyarakat yang terkesan hidup sederhana? Bukankah sebagian besar dari mereka, sebelum berkuasa, sangat nyaring meneriakkan dan memprotes korupsi Orde Baru?

Dilihat dari sisi warisan budaya politik, sistem politik otoriter Orde Baru sama mengakarnya dengan peran politik militer, dan sama kuatnya dengan tradisi penjarahan uang. Dilihat dari sisi tekanan massa, aksi protes menentang politik otoriter sama kerasnya dengan demonstrasi menggugat politik militer dan korupsi. Lalu, mengapa memberantas korupsi di pemerintahan jauh lebih sulit daripada meliberalkan sistem politik dan mengendalikan politik militer?

Satu kemungkinan yang harus ditelusuri adalah variabel yang, dalam ilmu politik, disebut *the strategic choice of the leaders*, pilihan strategis para pemimpin. Menurut literatur ilmu politik yang berkembang sejak 1980-an, berhasil atau tidaknya sebuah transisi ke demokrasi sangat ditentukan oleh pilihan strategis para pemimpinnya. Demokrasi, termasuk di dalamnya praktek pemerintahan yang bersih, bukanlah hasil otomatis dari sebuah kondisi ekonomi tertentu atau produk dari kultur tertentu. Demokrasi hanya menjadi kenyataan jika ia dipilih secara sadar dan diperjuangkan dengan gigih oleh para pemimpin utamanya.

Dalam literatur ini, yang dikembangkan oleh Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, peran dan pilihan elite sangat menentukan produk akhir corak sebuah rezim. Tentu saja, kondisi di luar elite itu, seperti tekanan massa, warisan rezim lama, ataupun kondisi makro sosial politik, akan mempengaruhi. Namun, tetap elite itu sendiri yang paling menentukan apakah tekanan massa, warisan rezim lama, dan kondisi makro sosial politik dijadikan kendala atau justru insentif untuk mencapai target tertentu.

Berdasarkan cara pandang ini, kesimpulan kita menjadi terarah. Jika memang para pemimpin berkomitmen dan berjuang secara keras untuk membersihkan pemerintahan dari praktek penjarahan uang, praktek korupsi yang menyebabkan raibnya Rp 35 milyar uang Bulog itu dapat dihindarkan. Dengan kata lain, pemerintahan di era reformasi tidak benar-benar ingin memberantas korupsi, atau setidaknya keinginan itu tidak sekeras keinginan mereka untuk meliberalkan sistem politik, dan tidak seserius komitmen mereka untuk mengendalikan politik militer. Lebih celaka lagi jika sebagian elite itu ingin pula menikmati korupsi.

Mundurinya Bondan Gunawan adalah percikan dari gunung es corak birokrasi pemerintahan yang masih setengah hati atas praktek korupsi. Belum dapat dipastikan, apakah Bondan sendiri terlibat dan menjadi salah seorang mastermind dalam jaringan penjarahan uang itu. Namun, paling kurang, Bondan adalah korban 4lri kultur penjarahan itu, yang ternyata masih kokoh.

Karena pemerintahan Gus Dur sampai saat ini tidak menjadikan pemberantasan korupsi sebagai target utama, tidak bisa tidak, harus dicari kelompok lain yang dapat mengikis tradisi korupsi. Agaknya, kalangan pers yang paling berpotensi mengambil alih peran itu, melalui investigasi dan publikasi aneka kasus korupsi secara intensif. Pers dapat menjadikan kasus korupsi itu menjadi perhatian publik luas dan memberikan tekanan politik yang dahsyat. Mundurnya Bondan Gunawan adalah buah dari kerja pers semacam itu.

Di negara demokrasi yang sudah matang, seperti di Amerika Serikat, peran pers dalam menegakkan the good governance jauh lebih dahsyat ketimbang peran partai politik. Investigasi koran The Washington Post dapat menjatuhkan Presiden Richard Nixon. Investigasi dan publikasi pers atas sisi buruk kebijakan pemerintah ataupun para aktornya menjadi hukuman yang keras.

Melalui perjalanan waktu, pengadilan pers dapat membersihkan sistem politik dan pemerintahan. Para politisi yang ingin berkarier

panjang dalam politik akan makin mengontrol diri agar tidak ditelanjangi pers, dengan cara tidak membuat kesalahan.

Polarisasi Konservatif vs. Progresif

Di era reformasi ini, polarisasi dan perdebatan politik tidak hanya melanda kaum politisi. Perdebatan juga melanda kaum ulama. Makin lama, polarisasi ulama itu makin mencuat dan tajam. Tarik-menarik antar ulama itu akan menentukan bulat-lonjongnya demokrasi Indonesia di masa depan.

Di akhir Juni 1999, sebagian ulama dan kelompok Ulama Pesantren Nasional (UPN) berkumpul di salah satu pondok pesantren di Rembang, Jawa Tengah. Mereka menyatakan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) jangan terlibat dalam pertarungan politik kekuasaan yang tengah terjadi. Mereka juga mengkritik aksi-aksi yang mengatasnamakan Islam dan otoritas ulama untuk kepentingan golongan politik tertentu. Mereka pun sepakat bahwa wanita boleh menjadi presiden.

Beberapa waktu sebelumnya, ajaran Islam dan otoritas ulama selalu digunakan, namun untuk rekomendasi politik yang berbeda. Satu partai besar, PPP, misalnya, menyatakan bahwa mereka bersandar pada fatwa ulama ihwal wanita tidak bisa menjadi

presiden. Pendakwah kondang tampil dalam aneka seruan agar tidak memilih partai yang banyak didominasi calon anggota legislatif (caleg) non muslim. Partai yang berasaskan Islam pun menarik garis tajam dengan partai yang mereka label sebagai “nasionalis sekuler”.

Polarisasi di kalangan ulama ini agaknya terbagi dalam dua kubu, yang memang sudah mengakar sejak dulu. Untuk mudahnya, sebut saja, yang satu adalah kubu konservatif, yang lainnya kubu progresif.

Kubu konservatif disemangati oleh keinginan menampilkan Islam sebagai alternatif yang berbeda dengan prinsip demokrasi Barat. Bahkan, kultur Barat acapkali tidak saja dianggap sebagai sistem yang berbeda, melainkan sistem yang mengancam pula. Sebaliknya, kubu progresif menampilkan Islam sebagai sistem yang paralel dan mendukung prinsip demokrasi. Kultur Barat bahkan dianggap anak dari zaman keemasan Islam di masa silam.

Di Indonesia, dua kubu ini sudah menunjukkan perbedaannya di beberapa isu. Di samping soal boleh-tidaknya wanita menjadi presiden, juga soal apakah partai yang berbasiskan Islam sebaiknya menggunakan asas Islam atau asas kebangsaan, serta soal perbedaan reaksi atas caleg non muslim. Di masa datang, perbedaan posisi itu akan makin banyak, sejalan dengan makin banyaknya problem yang dihadapi masyarakat.

Polarisasi ulama tidak hanya terjadi di Indonesia. Itu terjadi juga negara lain yang mayoritas penduduknya Islam, seperti Mesir. Bahkan, polarisasi ahli dan otoritas agama tersebut juga terjadi di berbagai agama lain, seperti Kristen, dan Yahudi.

Penyebabnya, menurut aliran postmodernisme, akal manusia terbatas. Akal bukanlah cermin tempat kebenaran dapur memantulkan diri sepenuh-penuhnya. Latar belakang keilmuan, intelektual, sampai kecenderungan psikologis yang tidak sepenuhnya dapat dipahami akan turut mempengaruhi akal. Akibatnya, lima ahli dapat berakhir dengan lima interpretasi yang berbeda ketika mereka membaca teks dan sejarah.

Apa yang dialami oleh ulama di Indonesia kini sudah terlebih dulu dialami banyak ahli agama Kristen dan Katolik di Eropa dan Amerika Serikat. Berbagai negara Barat itu sudah terlebih dulu bersentuhan dengan Revolusi Industri beserta seluruh implikasi politiknya. Demokrasi yang merupakan anak kandung industri sudah meluluhlantakkan daratan Eropa dan Amerika Serikat sejak 200 tahun lalu.

Dari catatan sejarah, kita tahu, tidak mudah bagi penganut agama Kristen dan Katolik untuk merespons kecenderungan baru itu. Aneka perpecahan Internal, bahkan konflik kekerasan, acap terjadi di kalangan mereka, yang memang serius memeluk agama. Akhir pertarungan itu sudah kita ketahui bersama. Kubu progresif di kalangan Kristen dan Katolik tumbuh lebih dominan dan lebih diterima oleh mayoritas penganutnya.

Negara akhirnya dipisahkan dari doktrin Gereja. Kebijakan negara akhirnya juga dinetralkan dari perselisihan interpretasi agama, Kaum pemikir liberal juga membantu memecahkan persoalan itu dengan mengembangkan konsep public sphere (ruang publik) dan private sphere (ruang pribadi).

Untuk urusan pribadi, termasuk masalah interpretasi agama, negara dilarang turut campur. Itu adalah ruang dan hak sepenuhnya setiap individu. Namun, ruang publik adalah ruang bersama. Setiap warga negara diberi kedudukan dan hak-hak sosial yang sama di ruang publik, terlepas dari warna kulit, jenis kelamin, ras, serta agamanya. Prinsip liberal inilah yang kemudian menjadi esensi demokrasi.

Kini, di negara Barat itu, demokrasi mengalami konsolidasi. Prinsip demokrasi dianggap sebagai the only game in town, satu-satunya aturan main bersama yang disepakati. Elite yang berpengaruh menerima aturan main itu, dan tidak lagi mencari aturan main lainnya. Setinggi-tingginya konflik antar elite, mereka tetap bersepakat tentang aturan main demokrasi sebagai mekanisme penyelesaian perbedaan dan konflik di antara mereka.

Nasib demokrasi di Indonesia akan juga ditentukan oleh tarik-menarik antara dua kubu ulama itu. Baik kubu konservatif maupun kubu progresif sama-sama memiliki argumen, pijakan agama, dan pendukung. Berdasarkan pengalaman negara lain, demokrasi di Indonesia akan lebih mudah terlaksana jika kubu progresif tumbuh dominan. Sedangkan kubu konservatif, walaupun selalu akan hadir, hanya marjinal saja. Jika sebaliknya yang terjadi, lonceng kematian bagi gerakan reformasi akan berdentang keras.

Presidensialisme: Tetapi Kabinet Jatuh-Bangun

DALAM literatur ilmu politik sering dinyatakan bahwa kabinet sistem presidensialisme sangat stabil. Penyebabnya, presiden sebagai kepala eksekutif dipilih untuk jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan, misalnya lima tahun sekali. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, yang kepala eksekutifnya (perdana menteri) dapat dijatuhkan kapan pun mayoritas parlemen menghendaki.

Dalam sistem presidensialisme, presiden juga memiliki hak prerogatif untuk memilih kabinetnya sendiri. Kabinet di bawah sistem presidensialisme cenderung lebih solid dan kompak. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, yang susunan kabinetnya adalah hasil negosiasi aneka partai politik, yang cenderung labil.

Praktek politik sistem presidensialisme di negara kita, di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, agaknya mengalami penyimpangan. Kabinet jatuh-bangun, dirombak beberapa kali dalam waktu kurang dari dua tahun. Memang, pimpinan eksekutifnya tetap Gus Dur,

namun menteri penting, seperti menteri ekonomi dan menteri politik, acapkali berganti.

Secara akademis ataupun untuk kepentingan politik praktis, fenomena jatuh-bangunnya kabinet di bawah sistem presidensialisme ini sangat menarik perhatian. Mengapa di Indo-nesia kabinet presidensialisme itu lebih menunjukkan karakter kabinet parlementer? Akarnya mesti ditemukan dan disembuhkan. Jika tidak, walau presidennya berganti, sekali ada kemungkinan itu akan tetap terjadi. Pembangunan ekonomi dan politik menjadi terganggu.

Dua penjelasan dapat diberikan dan ini memberikan perspektif dan rekomendasi yang justru bertentangan. Penjelasan pertama menyatakan, jatuh-bangunnya kabinet disebabkan oleh tidak sempurnanya penerapan sistem presidensialisme di Indonesia. Memang benar, presiden dipilih untuk periode lima tahun. Namun, presiden dipilih oleh parlemen (MPR), tidak dipilih langsung. Ini menyebabkan posisi politik presiden tidak kuat jika berhadapan dengan parlemen (MPR). Padahal, dalam sistem presidensialisme murni, parlemen (legislatif/MPR) tidak berada di atas presiden. Jika presiden dipilih langsung, menurut pandangan ini, kabinet akan lebih stabil karena parlemen tidak dapat mengancam presiden agar tokoh tertentu diakomodasi masuk ke kabinet.

Di samping itu, di Indonesia, wakil presiden tidak dipilih dalam satu paket dengan presiden. Wakil presiden bias berasal dari partai politik yang berbeda dengan presiden. Akibatnya, akan ada konflik kepentingan wakil presiden, antara harus membantu presiden dan pesaing yang dapat merebut posisi presiden jika presiden dijatuhkan. Keretakan politik antara presiden dan wakilnya mudah mengguncangkan kabinet.

Susunan kelembagaan seperti ini cenderung mendorong wakil presiden kelak menjadi "Brutus". Yaitu tokoh yang terus berusaha menggoyang presiden, karena ia berasal dari partai politik berbeda,

dan tentu ingin pula menikmati kursi presiden. Jika presiden dan Wakil presiden dipilih dalam satu paket dan berasal dari satu partai, menurut pandangan ini, konflik antara presiden dan wakil presiden akan jarang terjadi, dan kabinet lebih stabil.

Penjelasan ini juga menyalahkan tidak adanya lembaga supreme court yang berdaulat di Indonesia. Dalam sistem presidensialisme yang murni, jika presiden dan parlemen terlibat dalam konflik menafsir konstitusi, supreme court -sebagai lembaga ketiga yang neutral- dapat menengahi. Posisi hukum presiden akan lebih aman dalam konstruksi seperti itu, dan makin tidak perlu bernegosiasi dengan parlemen dalam soal kabinet.

Namun di Indonesia, Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang menengahi atau menafsir konstitusi. Akibatnya, presiden selalu khawatir konflik dengan parlemen (DPR/MPR) dalam hal menafsir konstitusi, karena presiden akan cenderung dikalahkan, mengingat kekuasaan konstitusional ada di tangan MPR.

Singkatnya, menurut penjelasan ini, jatuh-bangunnya kabinet disebabkan oleh tidak sempurnanya penerapan sistem presidensialisme. Jika ingin stabil, sistem kenegaraan kita harus diubah menjadi sistem presidensialisme murni dengan mengadopsi aneka prinsip di atas.

Pandangan kedua, memberikan analisis dan rekomendasi yang justru bertentangan dengan pandangan pertama. Justru jika kita mengadopsi sistem presidensialisme murni, konflik antara presiden versus parlemen akan jauh lebih parah. Baik parlemen dan presiden, dalam sistem presidensialisme murni, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Legitimasi politik mereka sama besarnya. Padahal, selalu mungkin, apalagi dalam sistem multipartai, presiden dan wakil presiden berasal dari partai A, sementara di parlemen, partai A menjadi minoritas. Mayoritas parlemen menjadi beroposisi terhadap presiden, persis seperti yang terjadi dalam politik kita saat ini.

Jika kita menganut presidensialisme murni, posisi politik presiden akan jauh lebih kuat, mengganti presiden akan jauh lebih susah, dan malapetaka politik yang mengancam kita juga akan jauh lebih lama dan jauh lebih berbahaya.

Pandangan kedua menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan sistem yang kita anut sekarang. Persoalan jatuh-bangun kabinet, menurut pandangan ini, hanya bersumber pada kemampuan leadership dari presiden. Dengan gaya kepemimpinan presiden yang akomodatif, mampu memimpin koalisi, dan memegang konsensus, jatuh-bangun kabinet dapat dihindari. Para wakil rakyat dan pimpinan partai agaknya harus cepat memilih dan menerapkan satu dari dua pandangan di atas, agar kabinet di masa datang tidak lagi mudah jatuh-bangun.

Megawati: Riding The Tiger

GERAKAN reformasi baru berusia tiga tahun. Namun, setelah reformasi, kita sudah punya tiga presiden: B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Hampir setiap tahun kita memiliki presiden baru. Wajar jika muncul pertanyaan, bagaimana dengan 2002? Apakah kita akan kembali memiliki presiden baru? Apakah Megawati akan dijatuhkan? Apakah kerumitan persoalan di Indonesia saat ini melampaui kapabilitas leadership Megawati untuk mengatasinya? Akibatnya, Megawati akan terempas pula dari kekuasaannya?

Pertanyaan itu menghantui berbagai pihak yang berkepentingan memasuki Stun ban 2002. Menjadi presiden di Indonesia dalam kondisi krisis multidimensi seperti saat ini sama dengan riding the tiger. Dengan menjadi presiden, Megawati seolah sedang mengendalikan seekor macan besar. Sangat sulit menjinakkan macan itu, apalagi sang macan tengah luka dan lapar. Salah-salah, sang macan bahkan dapat memangsa Megawati sendiri.

Ada tip gugusan masalah besar yang kini dihadapi Megawati yang menjadi bebannya pada 2002. Pertama, warisan buruk pemerintahan dan kondisi masyarakat yang ia terima dari para pendahulunya. Kedua, persepsi publik yang buruk pada kinerja tiga bulan pertama pemerintahan Megawati. Ketiga, aneka masalah politik besar yang kini terus menggelinging dan terus membesar. Ketiga gugus masalah besar ini tidak hanya mengancam pemerintahan Megawati, melainkan juga masa depan reformasi, bahkan masa depan eksistensi negara Indonesia sendiri.

Masalah warisan buruk Megawati mewarisi kondisi dan sistem politik yang sangat buruk. Setelah reformasi, memang kebebasan meledak luar biasa. Publik, dan aspek trum politik yang kanan (Islam konservatif) sampai yang paling kiri (populis sosialis) dapat membentuk partai politik untuk memperebutkan pemerintahan dalam pemilu. Pers juga dapat menurunkan berita yang begitu bebasnya. Bahkan, kehidupan pribadi presiden dapat dijadikan olok-olok dan diinvestigasi secara mendetail. Masyarakat bebas berorganisasi dan mempermainkan wacana, seperti ancaman terhadap warga Negara Amerika Serikat di Indonesia.

Namun, kebebasan itu tidak disertai hadirnya tertib politik memadai. Koordinasi pemerintahan dan kapabilitas pemerintah mengendalikan keadaan terasa sangat lemah. Akibatnya, kebebasan yang ada membuat pemerintahan terkesan tidak efektif. Bahkan, terkesan, pemerintah tidak mampu memerintah. Kendali pemerintahan pusat terhadap daerah sangat lemah. Aneka penyimpangan di daerah, dari pengambilalihan PT Semen Padang, penyimpangan peraturan daerah, hingga pemberlakuan syariat Islam di sejumlah kabupaten, terkesan gagal dikoreksi secara cepat pemerintah pusat.

Koordinasi pemerintahan pusat, antara presiden dan lembaga negara lain, terutama DPR, juga terasa lemah. Bahkan, di era Presiden Abdurrahman Wahid tempo hari, presiden dan DPR terlibat

dalam konflik kelembagaan yang susah diatasi. Hasil akhir, presiden membubarkan MPR/DPR. dan MPR memecat presiden.

Jika tempo hari TNI dan Polri pecah, satu membela presiden dan lainnya membela MPR/DPR, kita kini masih dilanda perang saudara. Disharmonisasi kelembagaan antar presiden dan MPR/DPR masih belum teratasi sampai saat ini. Seandainya kembali terjadi konflik kelembagaan di tahun 2002, deadlock yang sama dapat terulang.

Lebih mikro lagi, koordinasi di bawah jajaran pemerintah eksekutif sendiri belum pula tampak. Berulang-ulang Megawati secara publik menyampaikan komitmennya untuk anti-korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, Jaksa Agung belum terlihat mengangkat satu pun kasus korupsi besar. Bahkan, dalam kasus Buloggate II yang melibatkan Akbar Tandjung dan Golkar, Jaksa Agung terkesan ragu-ragu. Apa yang menjadi target presiden tidak diimplementasikan secara operasional oleh pembantu dekatnya sendiri. Akibatnya, presiden dianggap tidak benar-benar kuasa mengendalikan pemerintahannya sendiri.

Apalagi, Megawati membawahkan pemerintahan koalisi pelangi. Yang menjadi menteri di bawah Megawati bukan hanya anggota partainya dan para profesional. Mulai wakil presiden sampai menteri adalah anggota partai lain, bahkan pimpinan partai lain. Secara politik, mereka adalah pesaing Megawati kelak di tahun 2004. Di sinilah rumitnya pemerintahan Megawati. Ia membawahkan para pesaingnya sendiri, yang tentu saja dapat menjadi duri dalam daging. Mereka dapat membuat manuver untuk menaikkan atau menurunkan citra pemerintahan Megawati menghadapi Pemilu 2004.

Disamping kualitas buruk pemerintahan, Megawati juga mewarisi kondisi masyarakat yang sama parahnyanya. Sejak reformasi 1998, lebih dari 10.000 warga negara sudah terbunuh dalam huru-hara, dari Aceh hingga Irian Jaya, mulai Sabang sampai Merauke. Mereka tidak hanya terbunuh, melainkan juga dibunuh dengan kekejaman

yang tidak alang kepalang. Ada yang dibakar secara massal di rumah ibadah. Ada yang kepalanya dipancung secara massal. Media internasional menyebut kondisi ini sebagai kembalinya kekejaman Abad Pertengahan di milenium ketiga di Indonesia.

Menjadi pertanyaan, mengapa bangsa yang mengklaim sebagai warga yang sopan santun dapat terlibat dalam keganasan yang luar biasa? Mengapa negara yang menjadikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip tertinggi dapat membunuh anak bangsanya sendiri hanya karena perbedaan identitas?

Megawati mewarisi sebuah *divided society* pasca reformasi. Istilah ini merujuk pada kondisi masyarakat yang punya riwayat konflik komunal yang panjang karena isu primordial. Basis identitas menjadi sumbu konflik, seperti muslim versus non-muslim, pri versus non-pri, dan suku pendatang versus penduduk asli.

Konflik komunal ini menjadi masalah laten yang selalu potensial untuk lahir kembali. Apalagi di era krisis ekonomi. Orang-orang yang lapar dan kehilangan masa depan dengan mudah dapat dipicu kemarahannya dan berubah menjadi kerumunan yang ganas, siap meluluhlantakkan golongan lain sebagai kompensasi.

Disamping warisan buruk itu, pemerintahan Megawati sudah pula mendapatkan persepsi publik yang buruk. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk mengetahui persepsi publik kecuali melalui survei dengan metodologi yang bersifat acak.

Yang paling baru dan komprehensif adalah survei yang dilaksanakan harian Kompas, akhir Oktober 2001. Survei itu hanya mengambil responden yang memiliki telepon. Kelas menengah yang menjadi sasaran utama, dan provinsi-provinsi Sumatera, Jawa, Sulawesi, sampai Kalimantan. Sungguhpun hanya dari kelas menengah, survei ini layak diperhatikan, karena kelas menengah memiliki sumber daya untuk membuat pemerintahan Megawati stabil atau rapuh.

Lebih dari 50% responden kecewa dengan kinerja ekonomi pemerintahan Megawati. Kabinet ekonomi Megawati, yang pada awalnya dijuluki "the dream team", berubah menjadi "the dreaming team". Kekecewaan mayoritas publik ini didukung oleh indikator ekonomi. Jumlah pengangguran kini sudah lebih dari 40 juta manusia. Urang menumpuk. Anggaran membayar utang lebih besar daripada anggaran untuk pembangunan. Kurs rupiah terhadap US\$ naik-turun. Kini, angka Rp 10.000 per US\$ sudah terlampaui. Tidak ada jaminan bahwa kurs itu tidak akan naik ke angka Rp 11.000, Rp 12.000, bahkan Rp 15.000 pada 2002.

Lebih dan 60% responden kecewa dengan kinerja penegakan hukum pemerintahan Megawati. Tidak terlihat adanya satu kasus besar korupsi yang diangkat. Komitmen Megawati untuk anti-KKN belum terbukti, dan masih berupa retorika. Sementara laporan dan lembaga Transparency International makin menyesak dada. Sebelum reformasi 1998, Indonesia ada di peringkat keenam negara paling korup di dunia. Kini, setelah reformasi, pada 2001, peringkat Indonesia bahkan lebih buruk.

Reformasi bukannya mengurangi korupsi. Sebaliknya. reformasi membuat korupsi makin parah, terdistribusi makin merata. Jika dulu umumnya KKN terjadi di lingkaran istana dan kerabat, kini meluas ke Gedung DPR, ke kalangan partai, dan bahkan meluas ke pemerintahan daerah. Laporan terakhir, sebesar 40% dari dana alokasi umum untuk daerah sudah diselewengkan untuk keperluan lain. Money politics dalam pemilihan bupati, gubernur, dan penilaian atas laporan tahunan pejabat di daerah juga makin marak.

Dalam hal politik keamanan, memang pemerintahan Megawati dianggap lebih nyaman. Secara umum, kurang dari 50% yang kecewa dengan kinerja politik keamanan pemerintahan Megawati. Namun, jika angka itu ditelusuri dan dilihat segmentasinya, yang tidak kecewa umumnya datang dari basis politik Megawati sendiri yang nasionalis sekuler serta abangan. Tetapi, komunitas Islam dan partai lain justru menunjukkan kekecewaan kepada Megawati di atas 50%.

Kemudian, peristiwa-peristiwa politik besar yang kembali muncul pada 2002 akan makin memberatkan pemerintahan Megawati. Buloggate II akan menjadi bola panas yang dapat menggelinding ke mana saja. Diketahui secara luas, ada ratusan milyar uang non-bujeter. Bulog di bawah Rahardi Ramelan yang layak ditelusuri. Penerima dana diisukan tidak hanya Partai Golkar, melainkan juga banyak partai besar lainnya.

Kasus Buloggate II niscaya menjadi dilema pemerintahan Megawati secara politik. Untuk meningkatkan citranya di bidang MMN, agar dinilai konsisten, Megawati harus melayani permintaan populer. Ia mesti mendorong kasus itu dibongkar secara tuntas, Pihak yang bersalah mesti mendapatkan sanksinya. Namun, karena korupsi selalu jalin-menjalin, di mana orang penting yang satu juga memiliki dokumen tentang korupsi orang penting lainnya, pembongkaran kasus Buloggate II secara tuntas akan menenggelamkan banyak tokoh penting dan partai penting.

Skenario bumi hangus dapat terjadi. Tidak ingin "mati" sendirian, tokoh yang tersangkut membongkar kasus korupsi lain. Bahkan, tidak kepalang tanggung, dokumen yang membuktikan korupsi di tubuh PDI Perjuangan (PDI-P) sendiri (jika memang ada) akan dibongkar oleh pihak yang dikecewakan. Akibatnya, pemerintahan koalisi di bawah Megawati akan kembali gonjang-ganjing. Dapat pula sebagian pihak kembali menggunakan DPR sebagai alat untuk mempersulit presiden, seperti di era Gus Dur.

Di samping kasus Buloggate II, yang dapat membuat PDI-P berhadapan dengan Golkar, pada 2002 akan berlangsung sidang tahunan MPR. Dalam mandat dinyatakan, 2002 adalah tahun terakhir amandemen konstitusi. Celakanya, dalam berbagai isu penting, PDI-P, partai presiden, berhadapan secara frontal dengan PPP, partai wakil presiden. Baik untuk isu utusan golongan, pemilihan presiden langsung di putaran kedua, maupun isu Piagam Jakarta, PDI-P menjadi musuh PPP. Sedikit banyak konfrontasi ini

akan mengganggu juga hubungan presiden dan wakil presiden, yang masing-masing menjadi ketua umum partai yang berhadapan itu.

Segudang persoalan kini dihadapi Megawati. Selalu menjadi pertanyaan, apakah Megawati memiliki kapabilitas dan leadership yang diperlukan untuk membawa negara kita keluar dari krisis? Krisis tidak dapat diatasi oleh presiden jika kualifikasinya amat biasa. Krisis memerlukan seorang pemimpin dengan spirit inovator, dengan visi masa depan yang jelas, pengambil inisiatif, dan memiliki social skills untuk memelihara koalisi, serta mengarahkan koalisi mencapai target tertentu. Adakah Megawati ripe pemimpin yang dimaksud? Ataukah kita harus mencarinya pada pemimpin lain? *

Gejolak Politik 2003

BAD time, goad policy. Mungkin pernyataan ini yang paling pas menggambarkan situasi politik pada 2003. Dibandingkan dengan 2002, tahun 2003 jauh lebih bergolak. Namun, justru karena pergolakan itu, kebutuhan akan sebuah desain politik makro yang lebih baik dirasakan oleh masyarakat politik.

Setidaknya, ada tiga persoalan yang membuat 2003 akan lebih bergolak. Pertama, pada tahun ini akan mulai disidangkan kasus teror Bom Bali dan Abu Bakar Ba'asyir. Pengadilan ini niscaya tidak hanya mendapatkan perhatian Indonesia, tetapi juga dunia. Terorisme sudah menjadi hot issue nomor satu di dunia internasional. Bagi politik dalam negeri, pengadilan itu memberikan percikan api tambahan. Mereka yang dituduh terlibat bom Bali, dan bom lainnya yang melibatkan Abu Bakar Ba'asyir, memainkan sentimen Islam.

Para tokoh agama dari Islam mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sejak awal mengatakan, terorisme itu tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Namun, para tertuduh,

terutama pendukungnya, akan terus melemparkan kesan bahwa pemerintah pimpinan Megawati sedang berhadapan dengan politik Islam, khususnya politik Islam syariat.

Majalah Sabili, misalnya, menobatkan Abu Bakar Ba'asyir sebagai tokoh tahun ini. Ba'asyir dianggap memberikan keteladanan karena komitmennya untuk menegakkan syariat Islam dengan seluruh konsekuensinya. Jika Ba'asyir yang menghibahkan hidupnya untuk tegaknya syariat Islam disebut teroris, maka jadikanlah teroris sebagai cita-cita hidup kita, demikian iklan Sabili yang dimuat harian Republika, 20 Desember 2002.

Gegap gempita pengadilan bom Bali itu akan berjalan seiring dengan politisasi sentimen keislaman. Isu pengadilan atas terorisme bagi Pemerintah Republik Indonesia diubah nadanya menjadi isu Pemerintah Republik Indonesia dan Kafir Harbi melawan Islam. Intelektual kota dan kelas menengah mungkin tidak akan termakan oleh pengalihan isu itu. Namun, komunitas Islam di berbagai daerah mungkin akan bereaksi. Tentu ini tambahan beban instabilitas politik dalam negeri pada 2003-

Kedua, perkembangan bam di Amerika Serikat tidak pula menguntungkan politik Indonesia. Presiden dan Kongres Amerika kini dikuasai kaum Partai Republik. Dibandingkan dengan Partai Demokrat, Partai Republik lebih keras dan lebih militeristik dalam soal politik luar negeri. Sangat mungkin Amerika menyerang Irak. Seandainya pun tidak, secara retorika, pada 2003 Amerika akan makin menghangatkan perang global melawan terorisme. Di kalangan sebagian komunitas Islam internasional, perang Amerika ini akan digembar-gemborkan sebagai perang "Setan Besar" melawan Islam.

Indonesia tentu makin terjepit di tengah. Sebagian dari kultur Indonesia adalah kultur Barat. Kondisi politik dan ekonomi Indonesia mengharuskan kedekatan dengan Amerika. Namun, sebagian lagi, kultur Indonesia tergores sangat dalam dengan Islam. Sebagian dari komunitas Islam itu juga mengembangkan sentimen anti-Amerika

yang sangat dalam. Perlawanan terhadap Amerika bahkan dianggap sebagai panggilan agama. Perang global Amerika melawan terorisme dengan sendirinya ikut membelah Indonesia pada 2003.

Ketiga, 2003 akan pula mempertajam fragmentasi politik di kalangan elite. Konsolidasi politik, positioning, pencarian mitra politik, serta penajaman kritik sudah diagendakan dan sudah dijalankan pada 2003. Alasannya sederhana. Tahun berikutnya, 2004 akan dilangsungkan pemilu, di mana elite akan berspekulasi. Siapa yang akan bertahan, siapa yang akan naik, dan siapa yang akan terperental dari kekuasaan bakal ditentukan pada 2003.

Pemilu 2004 sudah akan menyulitkan pemerintahan Megawati pada 2003- Koalisi pelangi kabinet Megawati pada dirinya memang akan menjadi buruk menjelang pemilu berikutnya. Dalam politik praktis, koalisi pelangi semacam *sleeping with enemies*. Bagaimana tidak? Wakil presiden dan beberapa menteri dalam kabinet itu adalah bawahan Megawati. Namun, pada saat yang sama, mereka juga pesaing bagi Megawati menuju 2004.

Wakil presiden dan beberapa menteri itu kita yakini memiliki sikap kenegarawanan. Mereka ingin kabinet pelangi berhasil sampai 2004. Namun, para pendukungnya akan mengembangkan strategi lain. Jika kabinet pelangi berhasil, Megawati akan diuntungkan dan terpilih kembali. Padahal, mereka ingin pemimpin mereka menggantikan Megawati. Itu hanya mungkin terjadi jika Megawati gagal atau dibuat gagal, sehingga tidak lagi dipilih.

Maka, kita akan menyaksikan aneka manuver politik pada 2003. Politik Indonesia akan menjadi sejenis *variety show*. Berbagai akrobat politik, mulai yang paling kasar sampai yang paling elegan, akan dipertunjukkan. Ujungnya sama, memperlemah posisi politik lawan, sekaligus menaikkan citranya sendiri. Politik makin gonjang-ganjing.

Lengkap lah sudah bulat lonjong 2003. Bagi yang tidak suka ingar-bingar, 2003 akan sangat tidak nyaman. Tetapi, ada kemungkinan,

bad time di 2003 merangsang keperluan good policy. Yang kita harap lahir di 2003 adalah konfederasi partai, antara PDI Perjuangan, Golkar, dan PKB, membentuk semacam Barisan Nasional di Malaysia. Konfederasi tiga partai itu akan merangsang lawannya membuat konfederasi serupa. Pada jangka panjang, In-donesia akan mengarah menjadi bipolar multiparty system, punya banyak partai, namun terpola dalam dua kubu konfederasi.

Di tengah hiruk-pikuk partai politik yang kini berjumlah lebih dari 200, konfederasi partai yang bipolar menjadi satu-satunya solusi menuju demokrasi yang stabil. Di luar itu, demokrasi kita tidak akan pernah stabil. Semoga di bad time 2003 benar-benar melahirkan good policy, bukan justru bad policy, yang memperlama krisis.

Kontroversi Calon Presiden

BAIK setelah disahkan maupun ketika masih diproses, Undang-Undang (UU) Pemilihan Presiden membangkitkan kontroversi yang emosional. Tidak hanya di kalangan partai politik, juga dalam komunitas publik luas. Salah satu penyebabnya, DPR dan pemerintah terlalu “kreatif” dalam pengertian buruk. Mereka menambah-nambahi atau menukar syarat menjadi presiden di luar aturan konstitusi. Kini, sungguhpun secara praktis UU itu harus kita terima apa adanya, secara substansial UU ini sebenarnya melanggar konstitusi.

Kita dapat melakukan perbandingan dengan negara luar yang demokratis. Di Filipina, misalnya, hak warga negara untuk menjadi presiden dibuka seluas mungkin. Dalam konstitusi Filipina, bab pemerintahan eksekutif, dibuat lima syarat calon presiden yang sangat umum. Semua warga negara boleh mencalonkan diri sebagai presiden, sepanjang ia: 1) lahir dan menjadi warga negara Filipina, 2) pemilih yang terdaftar, 3) dapat menulis dan membaca, 4) setidaknya

berusia 40 tahun ketika hari pemilihan, 5) menjadi presiden di Filipina setidaknya 10 tahun sebelum pemilihan.

Dalam konstitusi Filipina secara tegas pula dituliskan bahwa Kongres tidak diberi wewenang menambah, mengurangi, atau merubah syarat yang sudah ditetapkan konstitusi. Dalam bahasa aslinya, aturan itu berbunyi, "It is beyond the authority of Congress to diminish, increase, or alter the above qualifications." Presiden adalah jabatan tertinggi dan demokratis di sebuah Negara. Hanya konstitusi yang boleh mengatur syaratnya. Tanpa dinyatakan secara tegas sekalipun, sudah jadi pengetahuan umum bahwa hanya pembuat konstitusi yang berwenang mengatur kriteria calon presiden. Kongres, DPR, atau presiden sekalipun dilarang turut campur dan "terlalu kreatif" menambah-nambah syarat itu.

Amerika Serikat, negara paling ma yang menerapkan pemilihan presiden secara langsung, punya aturan sama. Kriteria calon presiden di sana bahkan lebih sederhana. Semua warga negara dapat menjadi presiden sejauh: 1) warga negara yang lahir di Amerika Serikat, 2) minimal berusia 35 tahun, 3) sudah berdomisili di Amerika 14 tahun.

Hanya kriteria itu yang jadi patokan. Kongres ataupun presidennya tidak "terlalu kreatif" menambah daftar kriteria itu dengan aneka syarat lain, seperti pendidikan minimal atau syarat tidak menjadi terdakwa. Bukanlah kekuasaan Kongres dan Presiden Amerika untuk mengurangi kesempatan warga negara dengan berbagai kualifikasi tambahan. Hak itu hanya ada pada konstitusi.

Apakah karena itu menjadi Presiden Amerika demikian mudah? Untuk jadi calon presiden itu satu hal, namun untuk terpilih hal lain lagi. Memang mudah sekali bagi warga negara Amerika menjadi calon presiden. Ia bahkan tidak perlu tamat SLTA Namun, untuk terpilih, luar biasa susah. Publik menyusun kriterianya sendiri. Ada pula kendala publik mood yang berubah-ubah setiap zaman.

Sungguhpun tidak dilarang, kenyataannya selama 200 tahun kemerdekaan Amerika, tidak pernah ada presiden atau wakil

presiden wanita. Tidak pernah ada presiden atau wakil presiden yang bukan kulit putih. Tidak ada pula presiden dari partai kecil atau non partai, di luar Partai Republik dan Partai Demokrat. Tetapi, itu semua hasil pilihan bebas warga bukan karena aturan tambahan yang dibuat undang-undang.

Konstitusi Indonesia sebenarnya juga membuat aturan main calon presiden yang cukup umum. Pasal 6 dan Pasal 6A mematok kriteria yang sederhana saja, seperti: 1) warga negara Indonesia sejak kelahirannya, 2) tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas pilihannya sendiri, 3) tidak pernah mengkhianati negara, 4) mampu secara jasmani dan rohani, dan 5) dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai peserta pemilu.

Namun, DPR dan pemerintah terlalu “kreatif” menambah-nambah sendiri syarat itu. Ditambahkan lah syarat minimal level pendidikan. Yang lebih parah, ditambahkan lagi syarat persentase perolehan kursi di DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden. Jelaslah, DPR (dan pemerintah) mengurangi hak warga negara yang sudah dijamin konstitusi.

Mereka yang tidak tamat SLTA, misalnya, oleh konstitusi dibolehkan menjadi calon. Tetapi, oleh UU Pemilihan Presiden dilarang. Partai politik peserta pemilu semuanya dibolehkan konstitusi mencalonkan presiden. Tetapi, oleh UU yang dibolehkan hanya partai atau gabungan partai dengan perolehan kursi minimal 3% di DPR (tahun 2004) dan 15% (tahun 2009).

Tindakan terlalu “kreatif” ini yang menjadi pangkal kontroversi. Di samping telah melampaui wewenangnya (dalam kriteria calon presiden), DPR dan pemerintah dapat pula dituduh melanggar konstitusi (dalam hal membatasi hak partai politik peserta pemilu dengan syarat persentase).

Dalam Pasal 6 ayat 2 memang dinyatakan: “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Berdasarkan paham konstitusionalisme, ayat itu

lurus dibaca sebagai instruksi untuk mendetailkan aneka persyaratan teknis atas kriteria yang sudah ditetapkan UUD 1945. Misalnya, menjelaskan apa yang dimaksud dengan mampu secara jasmani dan rohani seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1. Ayat itu bukan instruksi untuk menambah, mengurangi, atau mengubah kriteria calon presiden yang sudah ditetapkan konstitusi.

Hanya konstitusi yang berhak mengurangi hak warga negara dalam partisipasi politiknya. Undang-undang dilarang membatasi atau mengurangi hak yang sudah diberikan konstitusi.

Warna-warni Pilkada

DUA pengamat politik sedang berbincang-bincang di kedai kopi. Keduanya mengamati secara saksama pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang sudah terjadi di ratusan wilayah pemilihan Indonesia. Mereka berdua melihat fakta dan data yang satu, namun memiliki perspektif berbeda. Terhadap prospek pilkada, pengamat yang satu sangat pesimistis. Sebaliknya, terhadap pilkada yang sama, pengamat lainnya justru sangat optimistis.

Pengamat yang pesimistis membuka perdebatan. "Semakin jelas pilkada ini akan membawa Indonesia lebih jauh ke jurang kehancuran," ujarnya. "Di berbagai wilayah, publik yang datang mencoblos di bawah 70%. Bahkan banyak pula tingkat pencoblosan ini hanya sekitar 50% dan angka pemilih yang terdaftar. Mereka itu orang yang cerdas. Buat apa mereka buang-buang waktu ikut kampanye atau memilih pemimpin jika kehidupan ekonomi mereka lebih sulit."

Sang pengamat ini lalu menyajikan data. "Sekarang ini BBM langka. Listrik lebih sering man. Busung lapar terjadi di banyak tempat. Persentase pengangguran naik. Harga kebutuhan pokok mulai naik lagi. Anak-anak banyak yang tidak lulus sekolah. Yang lulus juga kesulitan mencari pekerjaan. Ingin sekolah lagi, tetapi sekolah makin mahal."

"Pemimpin yang terpilih melalui pilkada demokratis ini belum tentu juga mampu memerintah secara afektif. Coba sekarang kita lihat, peran partai semakin kecil dalam memenangkan kandidat. Bukan partai yang menentukan, melainkan figur. Kandidat yang berasal dari partai kecil, jika ia populer, akan terpilih."

Masih belum puas, pengamat ini semakin menajamkan alasan pesimistisnya. "Belum lagi jika kita hitung intrik politik yang akan terjadi. Konflik elite di dalam partai terjadi hampir di semua partai politik. Elite di dalam satu partai saja dapat saling menghujat dan saling melukai."

"Apa yang akan terjadi dengan politik daerah yang terdiri dari banyak partai? Para elite daerah lebih beragam, dengan berbagai kepentingannya. Kultur intrik, konflik, dan saling menjatuhkan akan semakin membuat pilkada ini berantakan."

Namun, sambil bergurau, pengamat lainnya berkomentar. "Bung, sudah karakter An da meninjau segala hal secara pesimistis. Dengan perspektif seperti itu, Anda tidak bisa menikmati dunia yang berwarna-warni. Semua warna di mata Anda menjadi hitam semua," ujarnya sambil terkekeh-kekeh.

"Tidak ada masalah dengan rendahnya partisipasi publik yang datang ke TPS di pilkada. Di Amerika Serikat yang sering disebut embahnya demokrasi, voter turn-out juga rendah. Bahkan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, pemilih yang datang ke tempat pencoblosan hanya 50%-60%. Toll, demokrasi terus berjalan di sana. Pemimpin yang terpilih juga dapat memerintah secara efektif. Kemakmuran dan kesejahteraan di sana terus tumbuh."

Sambung pengamat yang optimistis ini, "Ini era kebebasan, Bung. Pemilih boleh datang boleh juga tidak ke TPS. Di samping itu, pemilih yang tidak datang tidak selalu berarti mereka apatis atau rendah antusiasmenya atas pilkada. Tidak bisa juga Anda artikan pemilih yang tidak datang itu tanda bahwa mereka mulai kecewa Pilkada dengan demokrasi. Apalagi jika Anda tafsirkan, ini bentuk awal mosi tidak percaya terhadap hasil pemilihan langsung oleh rakyat."

"Kadang pemilih tidak datang ke TPS hanya karena persoalan teknis. Mungkin mereka tidak punya kartu pemilih akibat persoalan logistik semata. Atau bahkan hanya karena minimnya sosialisasi, mereka tidak terinformasi mengenai syarat untuk memilih."

"Bahwa sekarang ini figur lebih menentukan ketimbang partai politik dalam memenangkan pilkada, Anda justru seharusnya gembira, bukan malah sedih. Itu artinya, calon pemimpin dalam demokrasi mendatang lebih luas dari sekadar kader partai. Sekaligus ini pelajaran bagi partai untuk membuka diri bagi tokoh independent

"Kita tidak perlu juga khawatir bahwa nanti kepala daerah akan menjadi tawanan DPRD hanya karena dicalonkan oleh kumpulan partai kecil. Jika mayoritas DPRD berposisi atas kepala daerah hasil pilkada, itu justru bagus. Akan terjadi check and balance agar pemerintah eksekutif dan legislatif saling mengontrol. Ini justru dapat mengurangi praktek korupsi berjamaah yang kiranya terjadi akibat kongkalikong kepala daerah dan DPRD."

Sambung lagi, "Anda tidak perlu pula terlalu membesar-besarkan intrik elite dan kultur konflik di kalangan partai politik yang akan meluas dalam pemerintahan daerah. Ini masa transisi, Bung. Semua butuh waktu menuju kematangan politik. Intrik itu justru bagus agar tidak ada lagi matahari tunggal seperti era Pak Harto tempo hari. Siapa pun yang mencoba mendominasi dengan cara yang salah akan terkena intrik."

"Jadi," ujar pengamat yang optimistis, "tidak ada masalah dengan pilkada saat ini." Lalu ia menambahkan, "Semua kekurangan yang

ada jangan dijadikan alasan untuk membunuh karakter demokrasi. Tanpa demokrasi, bangsa ini akan semakin terpuruk.”

Dua pengamat itu terus berdebat dan saling bantah. Mereka berdua mewakili kegembiraan ataupun kesedihan, optimisme maupun pesimisme publik luas atas pilkada saat ini. Itu perbedaan respons yang biasa bagi sebuah bangsa yang baru pertama kali mempraktekkan pemilihan langsung.

**MEMBANGUN INSTITUSI
POLITIK**

Perlunya Partai Dominan

UNTUK cepat keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, Indonesia memerlukan satu partai politik yang sangat dominan. Partai itu diharapkan memenangkan pemilihan umum (pemilu) yang bebas, setidaknya selama 15 tahun berturut-turut atau dalam tiga kali pemilu.

Di masa mendatang, Golongan Karya (Golkar) agaknya sulit untuk tampil menjadi partai dominan dimaksud, sebab berbagai calon utama pendukung Golkar sudah meninggalkannya. Golkar pun terlalu dekat dengan citra rezim lama yang telah kehilangan legitimasi. Jika Golkar saja sulit, apalagi dua partai lainnya, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Maka diharapkan, lahir satu partai baru yang dominan dari tangan para tokoh reformasi.

Cukup dikemukakan satu alasan saja, mengapa Indonesia memerlukan partai dominan. Perbaikan ekonomi sangat membutuhkan kesinambungan program ekonomi. Suatu kebijakan

ekonomi membutuhkan konsolidasi dan waktu yang untuk membuah hasil. Jika setiap lima tahun sekali partai yang memenangkan pemilu berbeda, dengan program ekonomi yang berbeda bahkan bertentangan pula, kesinambungan program ekonomi itu tidak terjadi. Krisis ekonomi akan lama sembuh, bahkan mungkin lebih buruk.

Contohnya Inggris. Setelah Perang Dunia II pada 1950-an sampai 1980-an, Inggris mengalami kemunduran ekonomi secara relatif. Para ahli mencoba menjelaskan, mengapa pertumbuhan ekonomi Inggris sangat lambat. Padahal, Inggris adalah negara industri pertama di dunia. Saru penyebabnya adalah tidak adanya partai dominan. Pemilu di Inggris dimenangkan hampir secara bergantian oleh Partai Buruh dan Partai Konservatif. Dua partai ini terpolarisasi sangat tajam secara ideologis. Partai Konservatif mewakili kepentingan kaum kapitalis besar, sedangkan Partai Buruh mewakili kaum pekerja. Yang satu mewakili spektrum politik ekonomi kanan, sedangkan yang lainnya kiri.

Jika Partai Buruh menang, kebijaksanaan ekonomi yang dipilih adalah menasionalisasikan banyak perusahaan swasta yang besar. Perusahaan itu dijadikan sebagai perusahaan negara. Namun, jika Partai Konservatif yang menang, diberlakukan kebijaksanaan ekonomi sebaliknya. Berbagai perusahaan negara diswastakan kembali. Sebagai misal, perusahaan mobil Roll Royce berulang-ulang dinasionalisasikan dan kemudian diswastakan lagi, tergantung partai mana yang menang. Ketidaksinambungan ini tidak memberikan suasana kondusif untuk berbisnis.

Absennya partai dominan memang tidak secara otomatis membuat tiadanya kesinambungan kebijaksanaan ekonomi. Amerika Serikat dan banyak negara Eropa Barat lain juga tidak memiliki partai dominan. Di berbagai negara tersebut, partai politik sangat kompetitif. Namun, umumnya partai politik yang bersaing itu memiliki platform kebijaksanaan ekonomi yang hampir sama.

Secara ideologis, Indonesia lebih terbelah ketimbang Inggris, apalagi dibandingkan dengan Amerika Serikat dan negara Eropa Barat lain. Situasi di Indonesia dapat seperti ini: partai A memiliki platform kebijaksanaan ekonomi populis dan nasionalis. Partai B mempropagandakan kebijaksanaan ekonomi liberal. Sementara itu, partai C punya komitmen kepada massanya untuk bereksperimen ekonomi Islam. Belum lagi partai lain yang kini bermunculan bagai jamur.

Karena tidak ada partai dominan, partai A, B, dan C secara bergantian memenangkan pemilu. Kebijakan ekonomi populis, liberal, dan eksperimen ekonomi Islam diterapkan bergantian per lima tahun sekali. Apa jadinya?

Karena alasan itu, di masa yang akan datang, hadirnya partai dominan di Indonesia menjadi kebutuhan. Sistem politik yang ideal untuk itu adalah Jepang dalam periode 1955 sampai 1993- Pada periode itu, Jepang memiliki satu partai dominan, Liberal Democratic Party (LDP), yang selalu memenangkan pemilu dan berkuasa lebih dari 35 tahun.

LDP berbeda dengan Golkar. Di Indonesia, Golkar berkuasa lebih dari 25 tahun, tetapi memenangkan pemilu dalam sistem yang tidak bebas. Saat itu, partai politik di sini dibatasi dan Golkar mendapatkan perlakuan khusus, seperti bantuan birokrasi dan militer. Namun, LDP menang dalam pemilu yang bebas. Setiap pemimpin di sana dibolehkan mendirikan partai. Birokrasi militer di Jepang juga dinetralkan. Mereka tidak diharuskan oleh sistem untuk mendukung LDP.

Ada dua sebab yang membuat LDP dapat menjadi partai dominan. Pertama, partai ini mampu membina dukungan luas dari berbagai kelompok kepentingan. Dukungan terpenting adalah dari kalangan bisnis, baik yang besar maupun kecil. Sebagai imbalan, kebijaksanaan ekonomi LDP membantu pengusaha kecil ataupun besar. Ada semacam kontrak sosial yang saling menguntungkan partai dominan dan kalangan bisnis.

Kedua, para politikus LDP mampu berkomunikasi secara akrab dengan masyarakat di distriknya masing-masing. Politisi itu tidak hanya mengunjungi para pemilih di kala pemilu. Politisi LDP kadang datang mengajak pemilihnya untuk piknik bersama. Kadang politisi itu mengirimkan hadiah ulang tahun kepada pemilihnya. Tidak jarang, politisi itu datang dalam acara kematian keluarga masyarakat pemilih. Mereka merayakan keakraban yang emosional dengan politisi LDP. Gaya kampanye yang informal dan kekeluargaan ini sangat efektif, terutama di distrik pedesaan.

Karena LDP menjadi partai dominan, berkuasa selama lebih dari 30 tahun tanpa terinterupsi, dalam sistem pemilu yang bebas, kebijaksanaan ekonomi yang konsisten dengan sasaran jangka pendek ataupun panjang dapat dilakukan. Karena itu, demokrasi dan kompetisi partai politik secara bebas tidak mengganggu kontinuitas kebijaksanaan ekonomi. Jepang pun tumbuh dari negara yang hancur dalam Perang Dunia II menjadi superpower ekonomi. Masalahnya, mampukah berbagai tokoh reformasi di Indonesia melahirkan partai dominan semacam LDP?

Partai Islam

BAGAIMANAKAH sebaiknya politik Islam mengambil tempat dalam era reformasi di Tanah Air sekarang? Ini penting diperdebatkan secara serius, setidaknya karena dua alasan. Pertama, tidak bisa dimungkiri, Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia. Sentimen keislaman sangat mudah memberi motivasi dan menggugah massa. Kedua, belum ditemukannya format yang pas antara politik Islam dan prinsip demokrasi modern yang memuaskan, baik bagi pendukung demokrasi maupun pembela politik Islam.

Di kalangan umat Islam di Indonesia pun kini ada dua kubu yang berbeda jalan. Kubu pertama secara sangat baik dipresentasikan Nurcholish Madjid. Kubu kedua diwakili Deliar Noer. Dua tokoh ini dikenal sejak dulu dalam pergerakan Islam. Integritas pribadi dan wibawa sosial keduanya juga dihormati. Pengetahuan mereka tentang politik Islam tidak ada pula yang meragukannya. Dan keduanya adalah doktor yang mengenyam pendidikan Barat, tamat dari universitas terkemuka di Amerika Serikat. Tetapi keduanya bersimpang pendapat.

Di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, akhir juni 1998, Deliar Noer bersama sejumlah rekannya mendeklarasikan berdirinya Partai Ummat Islam (PUI). Partai ini akan diikuti dalam pemilihan umum (pemilu) 1999.

Sebelum itu, sudah lama Cak Nur -panggilan Nurcholish Madjid-menganjurkan, sebaiknya jangan memunculkan komunisme dalam pendirian partai baru. Anjuran Cak Nur ini adalah kelanjutan sikap politiknya sejak dulu: "Islam yes, partai Islam no". Cak Nur mengakui, pendirian partai yang berlandaskan agama adalah hak asasi warga negara dan dijamin dalam prinsip demokrasi. Namun, dari sisi kemanfaatan dan kesiapan masyarakat, partai yang ada sebaiknya berdasarkan pada platform isu sosial ekonomi, seperti keadilan atau kebinekaan. Sedangkan agama harus tetap sebagai sumber moral publik yang tidak dipolitisasi dalam kancah pertarungan politik.

Sayang, sejarah belum menyediakan contoh yang memuaskan, bagaimana sebuah negara demokrasi yang mayoritas penduduknya beragama Islam berurusan dengan kebebasan pendirian partai Islam. Satu-satunya contoh yang tersedia -ini pun tidak begitu memuaskan- adalah Turki.

Turki dianggap sebagai satu-satunya negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang menerapkan prinsip demokrasi modern. Sejak 1920-an, Kemal Ataturk ingin membangun Turki menyerupai negara Barat, yang modern dan sekuler. Namun, berbeda dengan negara Barat, Turki secara mendalam digores oleh agama dan sejarah Islam. Kerajaan Islam yang berskala internasional terakhir bertempat di Turki. Akibatnya, Turki harus menempuh jalan sendiri yang sedikit banyak berbeda dengan Barat.

Ada dua hal penting yang ditinggalkan Ataturk. Pertama, diadopsinya konstitusi modern yang dimodifikasi. Konstitusi ini menjamin kebebasan berserikat dan mendirikan partai. Pemilu yang bebas dengan sistem multipartai diadakan secara periodik sejak 1950. Namun, berbeda dengan Barat, konstitusi Turki melarang

pendirian partai yang berlandaskan etnik, agama, ataupun ideologi komunis.

Kedua, dibangunnya militer yang sangar kuat dan setia pada cita-cita negara sekuler. Disiplin militer ditumbuhkan secara sangat ketat. Kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya, dilarang diselenggarakan dalam gedung resmi militer. Kalangan militer tidak pula merekrut anggota baru yang lulus dari sekolah keagamaan. Berbeda pula dengan Barat, militer diberi hak terlibat dalam politik untuk menjaga kelangsungan negara Turki yang sekuler.

Situasi politik di Turki menjadi sangat unik. Dalam tataran formal kelembagaan politik, Turki sangat sekuler. Namun, di arus bawah masyarakat luas, sentimen keislaman selalu muncul dalam wacana politik. Akibatnya, di setiap dekade, sejak 1970-an, militer selalu terlibat dalam kudeta ataupun intervensi, yang melarang dan mencabut izin sebuah partai politik, yang mereka duga ingin mendirikan negara Islam.

Pada 1970, Turki memiliki partai yang kuat, National Order Party. Partai ini dipimpin Erbakan dan didukung Mehmet Zait Kotku, pemimpin gerakan Islam dari Naksibendi Order. Pada 1971, setelah mereka melakukan kudeta militer, pengadilan konstitusi melarang partai ini. Erbakan kemudian meloloskan diri ke Swiss dan tinggal di sana sampai 1972. Sepeninggal Erbakan, rekan-rekannya mendirikan partai baru, National Salvation Party. Erbakan kembali memimpin partai ini. Kemudian partai ini kembali dilarang setelah terjadi kudeta militer pada 1980.

Kelompok yang sama lalu mendirikan partai baru: Refah Party. Setelah 1987, Erbakan kembali memimpin partai ini. Kejutan besar terjadi. Pada 1995, Refah Party memenangkan pemilu. Erbakan terpilih sebagai perdana menteri pertama yang berasal dari partai yang berspirit Islam. Namun, militer kembali bereaksi. Erbakan dijatuhkan dengan mosi tidak percaya lewat parlemen. Di awal 1998, pengadilan konstitusi sekali lagi melarang Refah Party.

Alasan pelarangan ketiga partai tersebut selalu sama. Partai ini dikhawatirkan mengganti konstitusi Turki yang sekuler dengan sistem negara Islam. Pihak yang menjegal partai itu juga sama, yakni militer yang ingin tetap setia pada cita-cita negara Turki yang sekuler.

Kita mungkin dapat menerapkan sistem yang lebih luwes ketimbang Turki. Partai Islam dibolehkan berdiri sesuai dengan prinsip demokrasi modern. Namun, partai itu harus menyatakan kesetiannya secara tertulis terhadap konstitusi negara: UUD 1945. Meski demikian, UUD 1945 pun harus dilengkapi dengan amandemen, yang memasukkan secara eksplisit prinsip demokrasi modern dan hak asasi manusia. Militer ditugaskan mengawal konstitusi yang sudah diperbaharui itu. Partai mana pun yang memberikan indikasi ingin melanggar konstitusi segera dikenai sanksi.

Prospek Golkar

MUNGKINKAH Golongan Karya (Golkar) di bawah Akbar Tandjung mengikuti sukses Partai Kuomintang di Taiwan? Seperti halnya Golkar, Kuomintang adalah partai pemerintah sebelum negara itu bertransisi menuju demokrasi. Kuomintang mengendalikan pemerintahan otoriter Taiwan selama lebih dari 40 tahun. Sementara itu, Golkar mendominasi Orde Baru yang tidak demokratis selama lebih dari 30 tahun.

Sejak 1990-an, Taiwan bertransisi menuju demokrasi dan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) bebas multipartai untuk pertama kalinya. Badan internasional yang sangat kritis seperti Freedom House bahkan memberikan skala sangat tinggi bagi penyelenggaraan demokrasi di Taiwan era baru. Skala itu dibuat berdasarkan kriteria kompetisi politik, partisipasi politik, dan civil liberties.

Berbagai pembenahan sistem dan reformasi politik dilakukan di Taiwan, persis seperti yang akan dilakukan di bawah Presiden Habibie

di Indonesia saat ini. Undang-undang politik Taiwan diperbarui demi mendukung pemilu bebas. Berbagai tahanan politik dikeluarkan dan dibebaskan untuk mendirikan partai politik. Partai baru bermunculan dan dibolehkan mengikuti pemilu. Sedangkan berbagai organisasi masyarakat dan pers diberi hak bersuara.

Di luar dugaan, Kuomintang, partai rezim lama yang otoriter, memenangkan pemilu yang bebas dan kembali berkuasa. Pada 1992, Kuomintang memenangkan pemilihan parlemen. Pada 1994, partai ini memenangkan pemilihan gubernur. Dan pada 1996, Kuomintang kembali memenangkan pemilihan presiden. Semuanya dimenangkan Kuomintang dengan perolehan lebih dari 50% suara. Partai-partai besar lainnya, seperti Democratic Progressive Party dan New Party, dikalahkan secara telak.

Pada 1999 Indonesia akan melaksanakan pemilu multipartai. Dalam Pemilu 1999 akan dipilih para anggota parlemen. Beberapa bulan berikutnya, presiden dan wakil presiden baru dipilih. Dapatkah Golkar mengulang kejayaannya seperti halnya Partai Kuomintang di Taiwan, yakni kembali memenangkan pemilu untuk parlemen, kemudian memenangkan pemilihan presiden, dan kembali berkuasa dalam era Indonesia baru yang demokratis?

Ada dua hal yang membedakan kondisi Golkar dengan Kuomintang. Perbedaan ini membuat pemimpin baru Golkar harus bekerja ekstra keras untuk mengikuti kisah sukses Partai Kuomintang.

Pertama, transisi Taiwan dari otoritarianisme ke demokrasi tidak disebabkan oleh krisis ekonomi ataupun rusaknya legitimasi pemerintahan lama. Transisi ke demokrasi di Taiwan dipimpin langsung oleh Partai Kuomintang untuk mengakomodasikan perkembangan baru di Taiwan. Kendati ada ketidakpuasan atas rezim lama, legitimasi dan kepemimpinan moral Partai Kuomintang tidak rusak. Mereka dapat membuat klaim, atas inisiatif sendiri mereka memimpin perubahan politik.

Hal ini berbeda dengan Golkar. Transisi di Indonesia didahului dengan krisis ekonomi dan membusuknya sistem politik Orde Baru. Kondisi ini menyebabkan kebencian masyarakat terhadap sistem lama secara meluas. Golkar tidak beruntung karena dianggap penopang utama pemerintahan lama. Transisi itu pun tidak dipimpin Golkar sejak awal, melainkan oleh kelompok oposisi yang dimotori gerakan mahasiswa.

Berbeda dengan Kuomintang, citra Golkar di mata publik jauh lebih buruk. Untunglah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang baru datang dari kubu reformasi. Ini cukup menolong, walau tidak dapat menghapus sepenuhnya kemarahan massa atas sepak terjang Golkar pada era sebelum reformasi.

Kedua, Taiwan sama sekali tidak memiliki pengalaman demokrasi. Transisi ke demokrasi di Taiwan benar-benar dari tradisi militerianisme. Oposisi menjadi lebih sulit untuk mempengaruhi masyarakat pemilih, karena tradisi mengambil jarak apalagi berseberangan dengan partai pemerintah- tidak pernah dilembagakan.

Indonesia berbeda. Kita mempunyai pengalaman dengan demokrasi pada 1950-an. Pada era ini, begitu banyak partai yang kuat berdiri. Walau berbagai partai itu sudah hilang ataupun dilarang berdiri sebagai partai, loyalitas komunitas terhadap aliran politik (partai lama masih kuat. Akibatnya, pada era reformasi, partai itu dapat bangkit lagi dan mengambil kembali para pemilih yang selama ini memberikan suara kepada Golkar.

Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Soekarnoism yang memiliki massa sangat besar mungkin akan mempunyai partai sendiri yang bersaing dengan Golkar. Akbar Tandjung harus bersaing pula dengan tokoh-tokoh yang mempunyai daya tarik massa, semisal Megawati Soekarnoputri (Soekarnoism), Abdurrahman Wahid (NU), dan Amien Rais (Muhammadiyah). Inilah alasan mengapa sulit buat Golkar untuk mengikuti kisah sukses Partai Kuomintang di

Tai-wan. Kondisi dua partai itu sangat berbeda. Namun, kemampuan pemimpin dalam berpolitik dapat mempengaruhi hasil akhir.

Ada dua strategi yang dapat dilakukan pemimpin baru Golkar. Pertama, meyakinkan masyarakat pemilih bahwa Golkar sekarang adalah Golkar baru, yang berbeda dengan Golkar sebelumnya. Ini berarti, harus ada kebijaksanaan politik yang drastis dari Golkar, yang membuat publik yakin bahwa Golkar baru sudah menarik jarak sejauh-jauhnya dari rezim lama dan tampil secara lain.

Kedua, Golkar harus mampu menampilkan dan merekrut calon yang berdaya tarik kuat bagi komunitas Soekarno, NU, dan Muhammadiyah. Para calon ini diharapkan dapat menjadi lokomotif yang menarik gerbong massa. Suka atau tidak, tiga komunitas itulah yang kini memiliki massa yang besar dan mengakar. Berhasil atau tidaknya Golkar mengikuti sukses Partai Kuomintang sangat ditentukan oleh kelihaihan politik para pemimpinnya memainkan dua strategi itu.

Koalisi Partai: Dua Ganjalan Besar

KOMUNIKE bersama antar partai kini sedang trendi. Ada dua komunike yang menjadi harapan banyak orang. Pertama, komunike yang berbasiskan tokoh massa, antara PDI Perjuangan (Megawati), PAN (Amien Rais), dan PKB (Gus Dur). Kedua, komunike yang berbasiskan politik aliran, dalam hal ini Islam modernis. Yakni, antara PAN, PPP, dan Partai Keadilan (PK).

Seandainya koalisi itu terjadi baik PDI Perjuangan-PKB-PAN, atau PAN-PPP-PK dan partai Islam lainnya, ataupun PDI Perjuangan-PKB-PAN-PPP-PK ada dua ganjalan besar yang dengan mudah menghancurkan koalisi itu. Sandungan pertama adalah mekanisme ketatanegaraan. Kedua, permainan elite tingkat tinggi menjelang Sidang Umum MPR.

Secara ketatanegaraan, istilah koalisi partai itu berasal dari sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensial ataupun kuasi presidential seperti sistem kita sekarang. Dalam sistem parlementer, koalisi partai di parlemen mampu mengontrol pemerintah eksekutif

[yang diketuai perdana menteri). Parlemen memiliki senjata “mosi ndak percaya” yang secara seketika dapat menjatuhkan pemerintahan ini mendesak dipilihnya pemerintahan baru.

Koalisi partai dalam sistem ini sangat strategis dan kuat. Beberapa partai yang berkoalisi dapat bernegosiasi, baik mengenai penjataan jabatan kekuasaan maupun program pemerintahan eksekutif. Berbagai partai berkepentingan menjaga harmoni dan kesepakatan. Sebab, sekali ada p.mai di dalam koalisi dikecewakan, partai itu dapat menggalang “mosi tidak percaya” yang kemudian menjatuhkan pemerintah, dan membentuk koalisi serta pemerintahan baru.

Dalam sistem presidensial dan kuasi presidensial, koalisi partai di parlemen tidak memiliki kekuatan. Dalam sistem ini, parlemen tidak dilengkapi dengan kekuatan “mosi tidak percaya” yang dapat menjatuhkan presiden. Fungsi koalisi seperti ini ibarat pendorong mobil belaka. Sekali mobil bergerak (presiden terpilih), koalisi dapat ditinggalkan.

Katakanlah koalisi tiga partai bersepakat mencalonkan si A menjadi presiden. Partai lain bersedia berkoalisi karena dalam kesepakatan itu, baik tertulis maupun tidak, si A menjanjikan pos beberapa menteri bagi pimpinan partai yang berkoalisi itu, dalam pemerintahan baru kelak.

Namun, setelah si A terpilih, dengan mudah ia meninggalkan koalisi dan membatalkan janjinya. Ia tidak dapat dikontrol lagi oleh koalisi. Atau, dapat pula si A benar-benar mengangkat pimpinan partai itu sebagai menteri. Setelah setahun, si A mungkin saja memecat sang menteri itu dan menggantinya dengan pimpinan dari partainya sendiri.

Itu sebabnya, sistem presidensial yang murni tidak mengenal koalisi. Presiden dibuat untuk tidak dipilih oleh parlemen, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Legitimasi presiden tidak tergantung koalisi partai di parlemen. Perubahan koalisi partai di parlemen tidak akan menjatuhkan presiden.

Kita memang tidak menerapkan sistem presidensial murni, Presiden kita tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi, sebagaimana dalam sistem presidensial murni, presiden tidak dapat dijatuhkan parlemen. Karena tidak dapat menjatuhkan presiden, koalisi partai 3i parlemen tidak akan kuat.

Hambatan kedua adalah riil politik. Dalam politik praktis, tingkah laku politik massa dan politik elite sangat berbeda. Untuk kepentingan kampanye, agar memperoleh suara banyak, semua partai berkonsentrasi membujuk massa, Mereka akan menjual semua isu yang laku, seperti isu reformasi, anti-Soeharto, anti-Habibie, anti-Golkar, sentimen agama, dan figur Bung Karno.

Setelah pemilu usai, riil politik dapat berbalik 180 derajat. Begitu terpilih, anggota MPR tidak lagi terikat dengan massa pemilihnya. Para elite itu memiliki kepentingan politiknya sendiri, yang akan lebih digerakkan oleh "siapa mendapat apa". Politik uang dan janji kursi kekuasaan menjadi mesin utama. Koalisi atau komunike bersama antarpartai, yang dibuat sebelum atau sesudah pemilu, dapat hancur di detik-detik terakhir pemilihan presiden.

Lalu, apa solusinya? Haruskah sistem presidensial diubah menjadi sistem parlementer? Tidak. Sistem parlementer sangat rentan untuk jatuh dan bangun. Kita hanya akan mengulangi kegagalan sistem demokrasi parlementer di tahun 1950-an.

Solusi jangka panjang adalah amandemen UUD 1945 untuk memilih presiden secara langsung dalam pemilu lima tahun mendatang. Sedangkan untuk pemilu kali ini, kekuasaan presiden dalam memilih para men ten perlu dibatasi. Misalnya, pengangkatan dan pemberhentian beberapa pos menteri tertentu yang penting harus disetujui oleh DPR dulu. Sehingga, koalisi partai yang berkuasa di DPR tetap punya peranan untuk menentukan perwakilan partai di pemerintahan eksekutif. Aturan seperti itu akan membuat koalisi partai tidak mudah dikhianati oleh presiden terpilih kelak.

Kemenangan Partai Terbuka

DARI perhitungan sementara hasil pemilu, ada pola yang menarik. Pemilu kali ini agaknya dimenangkan oleh partai terbuka. Empat dari lima partai teratas adalah partai yang berasaskan Pancasila (PDI Perjuangan, PKB, PAN, Golkar). Di antara lima partai teratas, hanya PPP yang menjadikan Islam sebagai asasnya. Partai berasaskan Islam yang lain berada dalam peringkat lebih rendah.

Peringkat seluruh partai yang berjumlah 48 itu masih mungkin berubah. Namun, untuk lima partai teratas tadi, dominasi mereka sulk bergeser. Ini menjadi fenomena menarik. Mengapa yang menduduki peringkat teratas adalah partai terbuka, bukan partai yang berasaskan Islam? Bukankah mayoritas pemilih (sekitar 90%) beragama Islam?

Mengapa partai yang berasaskan Islam malah menduduki peringkat lebih rendah? Padahal, seminggu sebelum pencoblosan, gerakan anti partai yang banyak calon anggota legislatif nonmuslimnya gencar dilakukan. Berbagai partai yang berasaskan

Islam sudah pula merapatkan barisan, untuk menggabungkan sisa suara, dan melabel kelompok lain sebagai nasionalis sekuler.

Hasil pemilu adalah gambaran keinginan politik masyarakat Indonesia. Ada empat penyebab mengapa yang menang pemilu kali ini adalah berbagai partai terbuka.

Pertama, masih berlanjutnya apa yang disebut Geertz dengan dikotomi Islam santri dan Islam abangan. Dalam Pemilu 1955, jumlah Islam abangan ini lebih dari 50%. Jumlah ini diambil dari pemilih Islam yang tidak menyalurkan suaranya ke partai Islam.

Islam abangan adalah Islam statistik. Mereka memang beragama formal Islam, namun tidak mempunyai aspirasi politik Islam. Secara kultural, Islam abangan bukanlah mereka yang taat dalam ritual agama. Bahkan, tidak jarang, pemahaman agama bersinkretasi (bercampur) dengan agama dan kepercayaan lain. Aspirasi politik Islam, termasuk motif membangun komunitas politik Islam, tidak kuat dalam kelompok abangan. Kelompok Islam abangan ini lebih tergetar oleh partai yang berasaskan nasionalisme dan kerakyatan. Dalam pemilu kali ini, mereka yang termasuk dalam Islam abangan lebih tertarik memberikan suaranya ke partai terbuka, seperti PDI Perjuangan, PKB, Golkar, dan PAN.

Kedua, Islam santri mengalami perubahan. Islam santri dilabelkan kepada penganut Islam yang taat secara ritual dan digerakkan oleh sentimen keislaman. Namun, sejak Orde Baru, terjadi mobilisasi kesejahteraan ekonomi serta pendidikan. Sebagian dari mereka terekspose ke dunia global, simbol modernisasi dan ideologi dunia seperti demokrasi. Mereka sendiri mungkin menjadi motor reformasi dan pluralisme. Akibatnya, sebagian dari Islam santri ini tidak pula tergerak memberikan suara mereka ke partai yang berazaskan Islam. Apalagi jika mereka merupakan bagian dari kelas menengah kota. Mereka cenderung memberikan suaranya kepada partai terbuka, seperti PAN, Golkar, atau PKB.

Ketiga, pengaruh para tokoh Islam. Tiga tokoh Islam yang paling berpengaruh saat ini adalah Gus Dur, Amien Rais, dan Nurcholish Madjid. Gus Dur adalah pemimpin organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama. Amien Rais pernah memimpin Muhammadiyah. Setelah menjadi tokoh reformasi, ia lalu menjadi ketua partai. Sedangkan Nurcholish kini menjadi suhu dalam komunitas Islam yang pandangannya banyak didengar.

Massa Islam yang dipengaruhi ketiga tokoh itu tidak memberikan suaranya ke partai yang berasaskan Islam. Jika takzim ke Gus Dur, suara mereka berikan kepada PKB, partai terbuka. Jika kagum pada Amien Rais, PAN akan mereka pilih. Jika mereka terpesona oleh Nurcholish, bukan partai Islam pula yang mereka dukung. Nurcholish sejak dulu memberikan "fatwa" bahwa "Is-lam, yes, Partai Islam, no".

Keempat, variabel terakhir adalah derasnya angin reformasi, Umumnya, kelas menengah kota dan kelas bawah mendukung partai terbuka, dengan alasan berbeda. Kelas menengah kota sudah lama diromantisasi oleh isu demokrasi, hak-hak asasi, dan reformasi.

Mereka menyadari bahwa isu itu melampaui batas dan sekat agama. Partai terbuka lebih sesuai dengan reformasi yang berlandaskan pluralisme, ketimbang partai Islam.

Sedangkan bagi kelas bawah, keterimpitan ekonomi dan ketidakpuasan atas kesejahteraan membuat mereka menjadi golongan pemarah yang anti sistem. Kemarahan mereka lebih dapat ditampung oleh berbagai tokoh yang sudah telanjur dilabel reformis, seperti Megawati, Gus Dur, dan Amien Rais, yang kini menjadi pemimpin partai terbuka.

Empat variabel itu mampu menjelaskan mengapa partai yang berasaskan Islam justru tidak populer di mata pemilih yang 90% beragama Islam. Justru partai terbuka yang menikmati panen besar dalam pemilu kali ini, padahal partai itu (terutama PDI Perjuangan) mendapat serangan para ulama secara tajam.

Sebaiknya memang partai terbuka yang mendominasi pemerintahan baru. Partai terbuka adalah Indonesia dalam bentuknya yang mini. Sebagaimana Indonesia, dalam partai terbuka, seseorang tidak akan dibedakan hanya karena perbedaan warna kulit, jenis kelamin, ras, atau agama yang dipeluknya.

Etika Warga Bukan Urusan MPR

SIDANG Tahunan MPR 2001 membahas rancangan ketetapan (rantap) yang tidak biasa, yakni Rantap tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat. Rantap ini bermaksud memberikan pedoman pada semua bidang kehidupan, dan kehidupan sosial dan budaya, pemerintahan dan politik, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum, kultur ilmu pengetahuan, sampai kepada disiplin nasional. Karena diikat dalam bentuk ketetapan, tentu kedudukan hukumnya sangat tinggi, hanya setingkat di bawah konstitusi.

Dua hal yang membuat rantap etik ini tidak biasa. Pertama, di negara demokrasi modern, pemerintah tidak mengurus etik masyarakat. Setiap komunitas bebas memiliki etikanya sendiri. Keberagaman visi dan persepsi publik acapkali berujung pula pada keberagaman etik. Keberagaman etik itu dijamin oleh negara dan tidak ada niat negara untuk membuatnya homogen. Yang dilakukan negara hanyalah membuat aturan hukum tertulis, yang berlaku untuk semua warga negara tanpa diskriminasi. Aturan hukum ini dibuat

dengan supervisi dan sanksi. Negara modern memang mengurus hukum, bukan etik.

Kedua, membuat etik nasional seraya mengharap etik ini dapat mengontrol perilaku warga jelas harapan yang mubazir. Kita sudah berpengalaman dengan pembakuan moral Pancasila dan penataran P4 yang dilakukan secara masif. Tidak ada penataran yang lebih intensif dan tersistem secara nasional dibandingkan dengan penataran P4 era Orde Baru. Namun, Idea melihat korupsi dan pelanggaran hak asasi terjadi di mana-mana. Bahkan, para pengajar P4 itu juga menjadi bagian dari sistem Orde Baru yang represif dan korup. Apa arti etik nasional Pancasila itu? Jika hukum dengan sanksi saja acapkali dilanggar, apalagi etik nasional.

Kehendak baik membuat ran tap etik itu dapat dipahami. Ada konteks sosial yang secara sekilas membutuhkannya. Transisi menuju demokrasi membuat sebagian masyarakat dan pemimpin kebilangan orientasi. Konflik horizontal yang terjadi setelah reformasi telah membunuh ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu anak bangsa, dari Aceh sampai Irian Jaya, dari Sabang sampai Merauke. Fanatisme agama, ras, ataupun kedaerahan dijadikan alasan kemarahan massal.

Akibatnya sungguh di luar perkiraan. Ada yang dibakar massal dalam rumah ibadah. Ada yang dipancung secara massal. Berbagai media internasional menyoroti kasus di Indonesia itu sebagai kembalinya kebidaban Abad Pertengahan di zaman modern. Kasus itu menyadarkan kita, betapa di balik sopan santun budaya Timur, dan masyarakat yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama ideologi negara Pancasila, tersembunyi keganasan primitif yang tidak alang kepalang.

Sementara, justru di era reformasi, kultur pemerintahan masih memprihatinkan. Para pejabat negara yang diberi fasilitas dan gaji dari uang rakyat berperilaku tidak sepatutnya. Hari pertama sidang tahunan MPR diwarnai adegan tawuran wakil rakyat yang terhormat itu di lembaga tertinggi negara yang terhormat pula. Di sisi lain,

justru dalam persidangan untuk membahas kebijakan publik, para wakil rakyat itu sering absen. Sidang-sidang komisi hanya dihadiri kurang dari separuh anggota. Di mana komitmen dan rasa malu para wakil rakyat itu?

Dunia ekonomi juga menunjukkan realitas yang sama memprihatinkannya. Banyak pengusaha besar yang tumbuh bukan karena kompetisi yang bebas dan semangat kewirausahaan sejati. Mereka tumbuh seperti benalu yang menggunakan koneksi dengan pejabat negara dan fasilitas publik. Kredit macet dalam bilangan trilyunan turut membuat Indonesia terpuruk dalam krisis ekonomi. korupsi merajalela, membuat Indonesia termasuk negara paling korup di dunia.

Lalu, soal penegakan hukum, apa yang dapat diharapkan? benteng terakhir penegakan hukum adalah polisi, Jaksa Agung, dan Hakim Agung. Namun, menurut survei yang dilakukan Partnership for Governance Reform in Indonesia tahun 2001, para pejabat ini justru dipersepsikan publik sebagai yang paling korup. Mahkamah Agung merekomendasikan kepada presiden agar grasi kepada Tommy Soeharto tidak dikabulkan. Namun, Mahkamah Agung yang sama membebaskan Tommy melalui peninjauan kembali. Tidak mengherankan, akhirnya masyarakat sering main hakim sendiri. Penjahat kelas teri seperti pencuri motor sering dibakar hidup-hidup oleh masyarakat sendiri.

Bisa dimengerti jika buruknya realitas yang ada membuat MPR mengambil inisiatif untuk memberikan arahan. Namun, seberapa efektifkah arahan tersebut? Seberapa mampu ketetapan itu mengatasi kompleksitas kebobrokan moral yang ada? Tidakkah ketetapan itu kelak melahirkan kemunafikan baru, seperti halnya P4 di era Orde Baru?

Seandainya MPR memang ingin membuat etik, seharusnya itu dibatasi dalam kode etik bagi anggotanya sendiri. Dalam kode etik itu, ada dewan kehormatan yang diberi wewenang penuh untuk

melakukan supervisi dan hukuman. Anggota MPR bahkan seharusnya dapat dipecat oleh dewan kehormatan jika ia melanggar kode etik secara serius. Jika MPR kekurangan anggota yang berwibawa, dewan kehormatan dapat diisi juga oleh tokoh masyarakat di luar MPR yang dikenal reputasi baiknya.

Sementara, biarkan masyarakat mengembangkan etikanya sendiri-sendiri. Negara bukanlah the big brother yang mengurus semua perilaku warga. Yang perlu diperhatikan MPR bukan etik, bahkan bukan aturan tertulis setingkat undang-undang. MPR mengurus yang jauh lebih mendasar. Yaitu reformasi konstitusi yang merupakan kontrak sosial baru. Jangan sampai MPR gagap dalam menjalankan tugas utamanya mereformasi konstitusi, namun merambah wilayah etik warga yang bukan urusannya.

Anggota DPR: The Untouchables

SUNGGUH nyaman menjadi anggota DPR di era reformasi. Apa pun yang dilakukan, mereka seolah menjadi the untouchables, tidak tersentuh oleh hukum. Seorang anggota, suatu ketika mungkin tersangkut skandal traveler's cheque. Diduga ada kasus penyuaipan anggota DPR melalui cek itu yang ditemukan petugas cleaning service. Awalnya publik dan pers memang heboh. Namun, semua reda kembali dan sang anggota yang tersangkut aman-aman saja.

Suatu ketika, mungkin anggota DPR melakukan tur ke luar negeri dengan alasan studi banding. Yang membiayai mereka adalah perusahaan asing peserta sebuah tender. Mereka pergi tanpa sepengetahuan ketua DPR, bertentangan dengan yang diatur dalam kode etik. Kembali, publik dan pers ribut. Toh akhirnya semua kembali reda. Para anggota DPR dalam rombongan itu kembali bertugas di DPR, seolah tidak terjadi sesuatu.

Mereka dapat saja bersusah payah membuat undang-undang, mengatur kewajiban lapor harta kekayaan bagi pejabat publik.

dibentuk pula lembaga KPKPN yang bertugas menerima dan memverifikasi laporan itu. Tetapi, separuh dari anggota DPR itu tidak melaporkan kekayaannya, melanggar apa yang diperintahkan undang-undang.

Atau lebih buruk lagi, sebagian mereka makan gaji buta. Seperti yang banyak dilaporkan, 30% anggota DPR sangat jarang menghadiri rapat komisi. Bahkan, beberapa nama absen sama sekali dalam sidang secara berturut-turut selama periode yang panjang. Apa yang diperjuangkan anggota tersebut di DPR jika mereka sangat jarang atau bahkan tidak pernah hadir dalam sidang? Publik dan pers kembali ribut. Seperti biasa, semua kembali reda. Tidak ada satu pun anggota DPR yang terkena sanksi berat.

Banyak lagi contoh lain yang dapat dikemukakan. Tentu saja publik luas yang dirugikan. Dalam waktu setahun, DPR hanya menghasilkan sekitar 40 undang-undang. Secara kuantitatif, jumlah ini sangat sedikit. Padahal, era reformasi membutuhkan secara cepat ratusan undang-undang baru untuk memberikan basis legal formal sebuah sistem yang baru. Sebagai perbandingan, Kongres Amerika Serikat dalam setahun dapat menghasilkan 500-1.000 undang-undang baru.

Apa yang menjadi sebab perilaku buruk anggota DPR itu? Bagaimana mengatasinya? Banyak pula anggota DPR yang sejati, idealis dan murni. Namun, citra mereka dapat ikut rusak karena perilaku koleganya. DPR sebagai sebuah lembaga akan ikut pula terperosok.

Perubahan lembaga DPR di era reformasi dibukit terlalu ekstrem. Mereka sendiri dan masyarakat politik yang berpengaruh tidak menyiapkan aneka kontrol internal DPR yang efektif. Di era sebelum reformasi, DPR ada di ekstrem yang satu. Soeharto membuat DPR secara politik tersubordinasi. Diperkenalkan lah instrumen recalling. Pengurus partai dapat mengganti anggota DPR di tengah jalan. Instrumen recalling ini di satu sisi dapat mengontrol disiplin anggota.

Namun, maksud sebenarnya untuk menjinakkan anggota DPR secara politik. Sekali anggota itu menjadi vokalis, pengurus partai dapat menggantinya di tengah jalan.

Setelah reformasi, DPR berada di ekstrem lainnya. Instrumen recalling itu sudah dihapus dengan alasan semangat reformasi. Partai tidak lagi mampu mengontrol anggotanya di DPR. Bahkan, jika anggota itu mbalelo, atau melawan partai dengan mendirikan partai kembar, tidak ada pula yang dapat dilakukan. Partai memang tidak dapat lagi menjinakkan politik anggotanya di DPR. Namun, pada saat yang sama, partai juga kehilangan instrumen untuk mendisiplinkan anggotanya.

DPR kemudian menyusun kode etik untuk mengontrol perilaku anggota. Namun, kode etik itu terlalu umum, tidak rinci, dan tanpa sanksi yang tegas. Dewan Kehormatan yang ditugasi menjadi supervisi kode etik juga tidak bergigi. Begitu banyak prosedur yang baru dilalui sebelum terbentuknya Dewan Kehormatan mengingat ia hanyalah lembaga ad hoc. Lembaga Dewan Kehormatan tidak pula berwibawa mengingat komposisi keanggotaan dan kewenangannya.

Reformasi harus dimulai di DPR, karena lembaga ini satu-satunya yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Kode etik dan tata tertib DPR mesti dinaikkan statusnya menjadi undang-undang. Pelanggaran kode etik akan menjadi pelanggaran undang-undang yang konsekuensinya jauh lebih berat.

Dewan Kehormatan mesti pula lebih didayagunakan. Sebaiknya lembaga ini dijadikan lembaga yang permanen, yang bertugas tidak hanya menerima laporan. Lembaga ini ditugaskan pula mencari dan mengawasi secara aktif para anggota DPR. Tindakan pencegahan melalui pengawasan aktif dan din selalu lebih baik. Untuk meningkatkan wibawa, anggota Dewan Kehormatan sebaiknya terdiri dari lebih banyak unsur masyarakat di luar DPR. Mereka adalah tokoh masyarakat yang sudah dikenal reputasi dan integritasnya.

Kewenangan Dewan Kehormatan diperbesar. Lembaga ini, melalui prosedur yang ketat, harus dimungkinkan memecat anggota DPR. Hukuman yang berat atas satu atau dua anggota kadang dibutuhkan untuk pelajaran bagi ratusan anggota lainnya. Hanya dengan restrukturisasi perangkat itu, perilaku buruk anggota DPR dapat diminimalkan. Kinerja DPR dapat pula ditingkatkan. Para anggota DPR pun tidak lagi menjadi the untouchables. DPR memang bukan jaringan mafia.

Guncangan Internal PDIP

MAKIN hari PDIP makin harus membuka sikapnya atas isu hangat yang butuh solusi: mulai pembentukan Pansus Buloggate II, pencalonan Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta, sampai amandemen UUD 1945 yang harus tuntas Agustus 2002. Namun, publik menyaksikan, di setiap isu besar itu, terjadi guncangan in-ternal di PDIP

Soal Pansus Buloggate II, misalnya. Secara resmi, PDIP menyatakan menolak pembentukan pansus itu. Namun, komposisi sum PDIP dalam absensi dan voting atas pansus menunjukkan pertentangan. Dari 150 anggota Fraksi PDIP, 92 anggota memilih abstain. Sebanyak 50 anggota memilih tidak hadir tanpa alasan resmi. Yang setuju pansus lima anggota, dan yang menolak tiga anggota. Meliono Suwondo dengan vokal berkata, dia berseberangan dengan partainya sendiri, bahkan siap untuk dipecat. Menurut dia, mengkhianati rakyat lebih berat daripada mengkhianati partai.

Soal pencalonan Sutiyoso sebagai Gubernur DKI, secara resmi, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta partai solid mendukungnya. Sebagian dari pimpinan dan aktivis PDIP yang tadinya kontra dengan Sutiyoso, sudah mengubah haluan. Roy B.B. Janis, misalnya, sudah mundur dari pencalonan gubernur. Namun, Tarmidi Suhardjo akan terus mencalonkan diri. Menurut Tarmidi, itu ia lakukan justru untuk menyelamatkan PDIP agar tidak ditinggalkan oleh pemilih Jakarta ataupun kader partai yang marah dengan Sutiyoso.

Masalah amandemen UUD 1945 tidak kalah panasnya. Proses amandemen UUD 1945 dipimpin oleh Jakob Tobing, salah satu tokoh PDIP Berulang-ulang Jakob Tobing menyatakan, karena diamanatkan oleh reformasi dan disepakati dalam aneka Sidang Tahunan MPR, amandemen akan dituntaskan. Namun, banyak pimpinan PDIP yang terus menggugat amandemen itu.

Apa yang sebenarnya terjadi pada PDIP? Mengapa dinamika internal dan pembangkangan terjadi dalam menghadapi banyak isu besar? PDIP sedang berada dalam tahap transisi. PDIP sebenarnya belum lahir sebagai sebuah partai yang terlembaga. PDIP belum memiliki sebuah platform partai yang dihayati oleh para pimpinan ataupun aktivisnya. Secara formal memang platform partai sudah dirumuskan. Namun platform itu masih bernilai nominal, tidak benar-benar menjadi roh partai. Satu contoh saja, istilah PDIP sebagai "partai wong cilik" tidak tergambar dalam kebijakan resmi partai yang kongkret atas isu-isu nasional.

Karena belum ada platform yang disepakati dan dihayati, PDIP lebih tampil sebagai forum politik. Kebijakan apa yang akan lahir dalam forum politik itu sangat ditentukan oleh tokoh dan individu yang aktif dan berpengaruh. Tokoh dan individu yang berpengaruh di PDIP berasal dari kelompok dan pengalaman yang beragam pula. Ada kelompok nasionalis tua yang masih tersisa di partai. Mereka adalah kawan junior dan pengagum Bung Karno. Walau tidak menjabat, mereka masih dituakan dan suaranya masih dihormati.

Para nasionalis tua ini akan lebih ideologis dan kaku dalam merekomendasikan kebijakan partai.

Ada pula kelompok nasionalis yang lebih muda. Mereka datang dari generasi pasca-Bung Karno. Berbeda dengan nasionalis tua, kelompok ini lebih berwawasan global. Kelompok muda ini lebih dapat bernegosiasi dalam hal ideologi, dan lebih digerakkan oleh pendekatan yang pragmatis.

Ada pula kelompok hijrah, yang berasal dari kekuatan lain. Sebelum reformasi, mereka dikenal sebagai tokoh atau aktivis Golkar. Setelah reformasi, mereka hijrah dari Golkar dan berdiam di PDIP sebagai tokoh pula. Tentu mereka membawa serta kepentingan dan pilihan politiknya sendiri. Tidak hanya sipil, banyak pula tokoh purnawirawan militer yang hijrah ke PDIP. Dibandingkan dengan sumber daya PDIP yang asli, tentu saja para mantan militer ini lebih menguasai strategi lapangan, sehingga mereka lebih terpakai.

Tidak kurang pula, ada pengusaha dan aktivis yang bergabung ke PDIP menjelang reformasi. Dibandingkan dengan semua yang lain, para aktivis ini lebih liberal dalam pandangan politik. Sedangkan pengusaha akan lebih kapitalis dalam pandangan ekonominya.

Dengan beragamnya tokoh di PDIP dan belum terkonsolidasinya platform partai, niscaya sebagai forum politik, sikap PDIP sebagai partai atas isu apa pun sangat susah dibuat. Masing-masing kelompok akan mengembangkan visi, komitmen, pilihan taktis, dan kepentingan masing-masing.

Hampir di setiap isu besar, PDIP mengalami dinamika dan polarisasi. Yang idealis ingin membongkar korupsi, jika perlu dengan pembentukan Pansus Buloggate II. Yang pragmatis lebih mementingkan dukungan Golkar bagi Megawati, sehingga pansus jangan sampai dibentuk. Yang liberal ingin amandemen UUD 1945 secara tuntas. Yang konservatif ingin kembali ke UUD 1945 dengan amandemen sesedikit mungkin. Yang peduli opini publik tidak ingin mencalonkan Sutiyoso. Yang lebih mementingkan prerogatif ketua

umum ingin Sutiyoso diperjuangkan mati-matian agar terpilih menjadi gubernur.

Leadership Megawati kini berada dalam ujian. Petinggi di PDIP perlu memikirkan membentuk brain trust, semacam dapur pemikir. Brain trust bertugas membantu ketika umum, untuk merespons isu besar dan melembagakan partai agar makin mendekati partai ideal. Jika tidak, PDIP akan dianggap publik meninggalkan agenda reformasi. Pada gilirannya, gerakan reformasi yang akan meninggalkan PDIP.

Anggota DPR, Kerja Sambilan

SEBERAPA banyak anggota DPR yang bekerja full time sebagai wakil rakyat? Seberapa besar porsi anggota DPR yang menjadikan kerja sebagai wakil rakyat sebagai satu-satunya pekerjaan yang ia geluti? Mereka tidak ngobek atau cari proyek di luar pekerjaannya sebagai wakil rakyat. Mereka tidak ingin tenaga, waktu, dan pikiran juga dikuras oleh kegiatan lain yang dapat mengurangi perhatian dan komitmennya.

Tidak ada data ilmiah mengenai jumlah itu. Namun, mereka yang cukup bergaul dengan banyak anggota DPR segera tahu, begitu banyak anggota DPR yang nyambi atau punya “pekerjaan” di luar tugas sebagai wakil rakyat. Mereka, misalnya, tetap praktek sebagai pengacara. Mereka memang tidak muncul di persidangan, tetapi masih aktif cawe-cawe mengurus perkara.

Mereka juga ada yang sibuk dengan proyek properti, jual-beli mobil, sampai menjadi broker politik. Untuk sebagian, menjadi anggota DPR tidak harus menghalangi mereka menggeluti kerja di

bidang lainnya. Bahkan, ada pula yang memberlakukan keanggotaan BPR hanya sebagai kerja sampingan. Posisi di DPR sangat strategis untuk mendukung bisnis di luar sana. Mereka aktif seadanya di DPR. Waktu, tenaga, dan pikiran lebih banyak dicurahkan untuk kerja yang lain itu.

Tidak mengherankan, publik begitu sering melihat sepinya sidang paripurna. Sebagai forum tertinggi, dalam banyak kasus, sidang paripurna tidak mencapai kuorum. Akibatnya, pertemuan kembali ditunda. Bahkan, kadang-kadang keputusan terpaksa diambil walau jumlah yang hadir tidak mencapai persyaratan. Kerja DPR secara keseluruhan, terutama fungsi legislasinya sebagai pembuat undang-undang, juga sangat tidak produktif.

Mengapa fenomena DPR sebagai kerja sampingan terjadi? Bagi sebagian, gaya hidup menjadi wakil rakyat di Jakarta sangat mahal. Mereka harus rutin melakukan pertemuan dengan berbagai kelompok di hotel berbintang. Kerja melobi di aneka tempat mewah menjadi menu utama. Penampilan sebagai orang yang berkelas juga harus dijaga. Penampilan itu sering diartikan dengan punya mobil yang sangat luks, lengkap dengan setelan pakaian dan parfum yang "waft".

Belum lagi biaya untuk menjaga posisi politik. Kadang mereka harus menyumbang dana seadanya kepada kelompok anak muda atau mahasiswa yang menjadi junior. Kadang mereka harus pula mengeluarkan uang untuk menjaga kesetiaan konstituen. Belum terhitung pula masalah gengsi. Jika rekan sesama anggota DPR sudah menukar mobil Kijangnya dengan Mercedes terbaru, maka ia pun harus mengimbangi dengan punya BMW yang paling fresh, atau setidaknya Land Cruiser secondhand.

Semua gaya hidup itu jelas membutuhkan dana sangat besar. Gaji sebagai anggota DPR saja tidak pernah mencukupi. Apa daya, karena peluang terbuka, mereka "terpaksa" ngobek sana-sini. Apalagi, posisi sebagai anggota DPR acapkali sangat mempermudah mereka mendapatkan relasi dan kepercayaan.

Di samping itu, di DPR sendiri belum pula muncul kultur politik profesional. Kebanggaan dan prestise sebagai anggota DPR belum terkait dengan prestasi kerja wakil rakyat. Bekerja full time, hidup sederhana, produktif dalam menjalankan fungsi, malu dengan pelanggaran etika, apalagi pelanggaran hukum, belum menjadi kultur.

Bagaimana kultur politik profesional itu dapat berkembang? Oleh sebagian, fungsi sebagai wakil rakyat saja dapat dijadikan proyek. Kerja pengawasan atas BLBI atau divestasi BCA, atau BUMN yang bermasalah, dapat diubah menjadi ladang duit. bahkan, kerja legislatif untuk lahan yang “basah” dapat pula diproyekkan. Pasal untuk “mengancam” pihak tertentu dipasang dalam draf. Lalu, setelah ada negosiasi dan “saling pengertian” dengan pihak yang terancam, pasal itu dapat dicabut dalam proses finalnya.

Fungsi budgeting dan anggaran juga tidak kalah basahya. Daerah mana yang ingin mendapatkan jatah lebih besar dapat diatur. Tentu, itu dilakukan dengan praktek “tahu sama tahu” (TST). Tidak mengherankan, begitu seringnya kita mendengar isu korupsi terjadi di DPR. Namun, pada saat yang sama, tidak pernah ada kasus korupsi yang benar-benar terbongkar di sana.

Semuanya terjadi secara rapi. Korupsi dilakukan secara “berjamaah dan bergotong royong”. Dengan maraknya kultur TST, dan saling menutupi untuk kasus korupsi, bagaimana idealisasi kultur politik profesional dapat tumbuh? Siapa yang peduli kolega sesama DPR ada yang ngobyek di luar? Siapa yang mau menegur sesama kolega DPR bekerja sebagai wakil rakyat hanya sebagai Sambilan? Lha, wong sudah tahu sama tahu mereka butuh duit banyak. Yang penting, asal jangan saling mengganggu. Titik.

Kontrol terhadap penyimpangan di DPR sangat lemah. Absensi yang jelas-jelas disebut sebagai pelanggaran kode etik saja, yang sangar kasatmata, yang dapat didata secara kuantitatif, tidak pernah diberikan sanksi. Dewan Kehormatan sebagai lembaga pengontrol tidak pernah terbentuk. Bahkan, pimpinan partai politik tidak pula

dapat mengontrol anggotanya yang melakukan penyimpangan di DPR. Mumpung kontrol sangat lemah, kerja DPR sebagai sambilan jalan terus.

Tentu, tidak semua anggota DPR berperilaku “hitam” seperti itu. Banyak pula anggota yang “putih”. Namun, karena nila beberapa titik tidak hanya setitik rusak susu sebelanga. DPR tidak akan pernah berwibawa jika kerja sebagai wakil rakyat hanya diberlakukan sebagai kerja sambilan.

Politik Brutus Wakil Presiden

THOMAS R. Marshall, Wakil Presiden Amerika Serikat era Woodrow Wilson tahun 1920-an, acap kali dikutip. Dengan jenaka namun akurat, ia menggambarkan posisi politik wakil presiden. Menurut Marshall, ada kisah dua kakak-beradik yang pergi jauh tidak tentu kabarnya. Yang satu menjadi pelaut, yang lainnya menjadi wakil presiden (wapres). Sebagaimana pelaut, menurut guyonan Marshall, wapres tidak pernah terdengar kabarnya.

Untuk konteks politik di Amerika Serikat, posisi politik wapres memang hanya menjadi ban serep. Ia hanya mempunyai peran sejauh peran itu diberikan secara personal oleh presiden sendiri. Jangan pernah berharap wakil presiden dapat menggantikan posisi presiden di tengah jalan. Secara politik, posisi presiden di Amerika Serikat sulit untuk dipecat. Selama 200 tahun lebih sejarah Amerika Serikat, tidak ada satu pun presiden yang pernah berhasil dipecat. Sementara itu, jika presiden ingin maju kembali dalam pemilu, juga tidak ada tradisi bahwa wapres menantangnya untuk juga maju dalam pemilu.

Posisi politik wapres di Indonesia sama sekali berbeda. Konstitusi di Indonesia saat ini, berikut sistem kepartaian, dan sistem pemilihan wakil presiden, membuat posisi politik wapres sangat kuat. Ruang manuver politik wapres di Indonesia lebih luas. Wapres dapat otomatis menjadi presiden tanpa perlu lewat pemilu, dengan sedikit manuver politik. Kondisi ini memberikan rangsangan kepada wapres untuk menjadi Brutus, mengkhianati presidennya sendiri.

Ada dua alasan mengapa dalam politik Indonesia, wapres justru dirangsang untuk menjadi Brutus. Pertama, dalam konstitusi kita, dan sistem ketatanegaraan yang kini masih berlaku, terlalu mudah untuk menjatuhkan presiden di tengah jalan. Syaratnya sederhana. DPR mengajukan memorandum I, memorandum II, lalu sidang istimewa MPR. Kemudian MPR memecat presiden di tengah jalan, dan mengangkat wapres sebagai presiden baru. Semua prosedur dan proses itu mudah dilakukan, karena yang dibutuhkan hanyalah dukungan mayoritas dalam voting. Apakah presiden bersalah atau tidak secara hukum, tidak perlu terlalu diambil pusing. Salah atau tidak, akan diputuskan melalui voting.

Untuk memperoleh suara mayoritas di DPR dan MPR sangatlah mudah. Sehebat-hebatnya partai presiden di Indonesia, partai itu hanya memperoleh suara kurang dari 35%. Berarti ada lebih dari 65% suara di DPR yang bukan berasal dari partai presiden.

Kedua, dalam sistem pemilihan presiden dan wapres, dua tokoh ini tidak dipilih dalam satu paket. Yang dipilih terlebih dahulu adalah presiden. Kemudian wapres dipilih berikutnya dengan syarat presiden menerimanya. Sangatlah mungkin, wapres datang dari partai yang sama sekali berbeda. Itu yang terjadi di era Gus Dur, di mana Megawati yang menjadi wapres. Itu juga yang terjadi di era Megawati, di mana Hamzah Haz yang menjadi wapres.

Partai yang berbeda sangat mungkin pula punya cita-cita politik yang berbeda, bahkan bertentangan. PDI Perjuangan, partainya Presiden Megawati, menentang Piagam Jakarta. Sedangkan, PPP,

partainya wapres, justru memperjuangkan Piagam Jakarta. Karena punya cita-cita politik yang berbeda, sekali lagi wapres dirangsang untuk menjadi Brutus, mengkhianati presidennya di tengah jalan. Pengkhianatan itu boleh jadi tidak dimotivasi oleh ambisi pribadi, melainkan oleh tujuan mulia yang merupakan cha-cha politik partai.

Dalam kondisi konstitusi, sistem kepartaian, serta pemilihan wapres seperti sekarang, politik nasional akan mudah tidak stabil. Bagaimana tidak? Sistem yang ada justru memberikan dorongan wapres menjadi Brutus. Indonesia dianggap tempat yang paling tidak nyaman untuk menjadi presiden. Siapa pun presidennya, dan siapa pun wakilnya, politik kelembagaan yang ada akan selalu menyusahkan, baik bagi pendukung presiden ataupun pendukung wapres.

Pendukung Presiden Gus Dur selalu merasa bahwa Megawati selaku wapres telah menjadi Brutus. Pendukung Megawati juga tetap resah jika suatu saat nanti Hamzah Haz selaku wapres menjadi Brutus. Ketika Wakil Presiden Hamzah Haz dan Megawati tampak mulai berseberangan, kondisi politik menjadi lebih panas daripada yang seharusnya.

Dalam soal amandemen UUD 1945 tahun lalu, misalnya, partai wapres dan partai presiden berseberangan soal pemilihan presiden langsung. Tahun ini, soal amandemen Piagam Jakarta. Kini, ketika calon yang diajukan wakil presiden gagal menjadi sekretaris wakil presiden, wapres mungkin luka. Ketika calon Direktur Garuda dari PPP, Samudra Sukardi, gagal dilantik, luka wapres mungkin bertambah dalam. Ketika wapres mengunjunginya Jafar Umar Thalib di penjara, yang dituduh menghina presiden, presiden dan pendukungnya yang gantian luka. Publik pun ribut tentang kemungkinan wakil presiden benar-benar akan memainkan peran Brutus.

Padahal, adanya perbedaan politik dan kepentingan antara Hamzah Haz dan Megawati selaku politikus, adalah biasa. Perbedaan cita-cita politik antara partai presiden dan partai wakil presiden, juga

lumrah. Namun, konstitusi, sistem kepartaian dan sistem pemilihan presiden, membuat perbedaan di atas mengandung potensi bahaya. Agar Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi presiden, memang saatnya proses dan prosedur pemilihan presiden dalam konstitusi diubah.

Pertanggungjawaban Presiden

BAYANGKAN dua kelompok ahli strategi politik sedang berhadapan di Sidang Tahunan MPR 2003. Yang satu pendukung Megawati, yang lainnya penentang Megawati. Kedua kelompok itu sedang mengutak-atik kemungkinan pertanggungjawaban presiden pada 2004 nanti. Ibarat sedang bermain catur, mereka saling pasang taktik, umpan, dan jebakan.

Kelompok pendukung Megawati tentu berupaya agar pidato pertanggungjawaban presiden didesain sedemikian rupa supaya menguntungkan Megawati. Jika bisa, jangan ada celah dalam mekanisme pidato presiden itu yang bisa dimanipulasi pihak lawan. Sebaliknya, kelompok penentang Megawati membuat rencana yang jauh berbeda. Jika bisa, mekanisme ataupun waktu pidato pertanggungjawaban presiden membuka ruang untuk mengecilkan peluang Megawati terpilih kembali dalam Pemilu 2004.

Sebenarnya, secara ketatanegaraan murni, diterima atau tidaknya pidato pertanggungjawaban presiden tidak punya

konsekuensi hukum ataupun politik. Sang presiden yang ditolak pertanggungjawabannya, misalnya, tetap dibolehkan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden berikutnya. Namun, setidaknya sudah ada preseden. Pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak MPR pada 1999- Dengan jiwa kesatria, Habibie mengundurkan diri, menolak maju dalam pemilihan presiden berikutnya.

Kelompok lawan Megawati ingin mengatur siasat yang sama. Sebisa mungkin harus ada pidato pertanggungjawaban president hadapan MPR. Sehabis mendengar pidato, MPR sebisa mungkin didesain untuk menerima atau menolak pidato itu. Lalu diatur manuver, MPR menolak pertanggungjawaban. Dengan kata lain, Megawati "di-Habibie-kan".

Argumen untuk jebakan ini sudah dipersiapkan. Karena menerima mandat dari MPR, presiden harus pula mempertanggungjawabkan mandat itu. Karena sudah memberikan mandat, MPR harus pula menilai implementasi mandat itu, Menerima atau menolak pertanggungjawaban presiden adalah konsekuensi logis dari penilaian MPR selaku pemberi mandat.

Sebaliknya, kelompok pendukung Megawati menyusun rencana berbeda. Sebisa mungkin jangan ada lagi pidato pertanggungjawaban presiden di hadapan MPR. Jangan beri peluang pesaing politik bermanuver di masa kritis seperti Pemilu 2004. MPR 2003 dan 2004 bukan lagi MPR 2002 atau sebelumnya. Amandemen UUD 1945 sudah mengubah wajah MPR. MPR bukan lembaga tertinggi negara lagi. Presiden sudah akan dipilih secara langsung. MPR tidak membuat GBHN lagi. Sedangkan presiden bukan lagi mandataris MPR dan bukan pelaksana GBHN yang dibuat MPR.

Karena konstruksi ketatanegaraan sudah berubah, buat apa lagi ada pidato pertanggungjawaban? Buat apa lagi memberi wewenang pada MPR untuk menilai, menerima, atau menolak pidato pertanggungjawaban presiden? Toh, MPR kini bukan lagi

atasan presiden. Gagasan pidato pertanggungjawaban presiden harus ditolak.

Bagi kelompok penentang Megawati, jika bisa, pidato presiden itu kelak berpeluang untuk dimobilisasi melukai Megawati dalam Pemilu 2004. Hal ini jauh lebih mungkin dilakukan jika pidato pertanggungjawaban itu dilakukan sebelum pemilu presiden 2004. Kecaman MPR atau fraksi terhadap presiden dengan sendirinya dapat menjadi bahan kampanye mendiskreditkan Megawati kelak.

Pemilu presiden putaran pertama dilaksanakan Juni 2004. Putaran kedua sangat mungkin berlangsung pada Agustus atau Sep-tember. Bagi penentang Megawati, ideal sekali jika pidato pertanggungjawaban presiden itu dibuat sebelum Juni. Seandainya tidak mungkin, setidaknya dilaksanakan sebelum Agustus atau Sep-tember 2004.

Sebaliknya, pendukung Megawati menyiapkan rencana yang sangat berbeda. Jangan sampai ada pidato pertanggungjawaban presiden sebelum pemilu presiden 2004 dimulai. Argumen yang tidak kalah canggih juga disiapkan. Presiden harus menyampaikan pidato di akhir masa jabatannya. Agar tidak ada vakum kekuasaan, saat itu harus sudah terpilih presiden baru. Selesai presiden berpidato, Jerah terima kekuasaan dapat dilakukan. Tidak bisa tidak, memang pidato itu harus dibuat setelah pemilu presiden 2004 selesai. Dengan jadwal pemilu yang sudah dibuat, pendukung Megawati berupaya agar pidato itu dilakukan pada September atau Oktober 2004 saja. Saat itu, pemilihan presiden putaran kedua sudah selesai.

Demikianlah dua kekuatan itu, pendukung dan penentang Megawati, bermain tarik ulur. Apalagi, politik saat ini masih dalam masa transisi. Aturan ketatanegaraan masih bisa diinterpretasikan Kara berbeda.

Akhirnya, kompromi dibuat. Kesepakatan itu menguntungkan kelompok pendukung Megawati. Pidato pertanggungjawaban presiden tetap ada. Namun, MPR sebagai lembaga tidak lagi diberi

wewenang menerima atau menolaknya. Kompensasinya, masing-masing fraksi masih boleh menanggapi.

Kapan pidato itu disampaikan? Pidato disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR 2004 di bulan September. Saat itu, sangat mungkin sudah terpilih Presiden Indonesia yang baru. Buruk atau baiknya pidato pertanggungjawaban Megawati, sama sekali tidak mempengaruhi peluang Megawati untuk terpilih kembali.

Soal pidato pertanggungjawaban presiden, agaknya PD1 Perjuangan dan Megawati berada di atas angin. Namun, jangan lupa, di luar pidato masih ada sejuta amunisi yang dapat dimainkan untuk merepotkan presiden sebelum menghadapi Pemilu 2004.

Potret Politik SBY-JK

PROBLEM terbesar yang dihadapi SBY-JK di 100 hari pertama pemerintahannya adalah mengelola harapan publik. Yang mereka hadapi saat ini adalah sentimen publik yang sudah tujuh tahun hidup di masa transisi politik. Sudah tujuh tahun pula publik luas ini berkubang dalam krisis ekonomi. Mereka berharap pemerintahan baru bertindak selayaknya ratu adil dengan tongkat sihir, lalu hanya dengan satu kata *sim salabim*, situasi berubah drastis.

Publik Indonesia pernah berharap dengan era reformasi. Kini setelah lima tahun reformasi, harapan itu cepat sekali berubah menjadi kekecewaan. Survei opini publik sudah dilakukan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. Tampak sekali setiap tahun terjadi penurunan kepuasan publik atas situasi ekonomi dan politik era reformasi. Sebaliknya, publik semakin banyak yang bernostalgia mengenai "keindahan" pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik era Orde Baru.

Kini sekali lagi publik berharap kepada pasangan presiden baru. Mereka sudah terpesona dengan jargon perubahan yang dijual di masa kampanye SBY-JK. Apalagi pasangan ini adalah paket pertama yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung. Tanpa inovasi yang cemerlang dari pihak SBY-JK, harapan ini segera pula berujung kepada kekecewaan.

Publik di Indonesia sangat kejam dengan para presidennya. Semua presiden Indonesia selalu hanya dipuja di awal, namun dimaki di akhir jabatannya. Apa kurangnya Bung Karno? Toh, ia dijatuhkan publik di masa akhirnya. Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati juga mengalami masa buruk di akhir jabatannya.

Mengelola harapan publik yang besar dan cenderung kejam memang akan menjadi momok sendiri bagi presiden SBY-JK. Sebelum 100 hari ataupun setelah 100 hari, momok ini yang harus dikelola. Dalam politik elite ataupun politik publik luas, cukup tampak bahwa dalam 100 hari pertama, SBY-JK masih gagap menghadapi harapan publik itu.

Potret politik SBY-JK dapat dilihat dari dua kacamata, elite dan publik luas. Perspektif elite dapat ditelusuri dari analisis media massa besar. Melalui analisis isi media (content analysis), baik diteropong dari frekuensi berita ataupun analisis kecenderungan, potret elite itu dapat dibuat. Sedangkan perspektif publik luas dapat ditelusuri melalui survei opini publik yang biasa dikerjakan LSI. Hanya dengan sampel 1.200 responden, sejauh sampel ini dipilih secara random dan dikontrol kualitasnya, suara populasi seluruh Indonesia dapat dipotret.

Dalam 100 hari, perspektif elite memang didominasi oleh kekhawatiran hubungan Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dua tokoh ini dianggap dwitunggal yang saling melengkapi, sebagaimana Bung Karno dan Bung Hatta. Namun justru karena dwitunggal, dikhawatirkan nasibnya juga sama, berujung kepada perpecahan. Mulai dari hari pertama pembentukan kabinet, munas

Golkar, sampai kepada penanganan bencana Aceh, percakapan mengenai hubungan SBY-JK mendominasi.

Justru untuk merespons harapan publik yang sangat tinggi kepada pemerintahan baru, hubungan SBY-JK menjadi unik. Dua pemimpin ini memang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. SBY lebih tampak sebagai pemimpin visioner dan intelektual.

Sebelum mengambil keputusan, ia selalu mempertimbangkan banyak hal secara komprehensif. Keputusan diambil jika seluruh informasi yang diperlukan sudah tersedia, prosedur pengambilan keputusannya tepat dan waktunya pas pula.

Dengangayasepertiitu memang ada kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan SBY terasa sebagai pemimpin yang sangat matang, dan mempertimbangkan segala hal dari banyak sisi. Ditambah lagi oleh kepribadiannya yang santun dan sopan, keputusan yang diambil SBY acapkali menyenangkan banyak pihak. Namun kelemahannya, ia sering dianggap lambat mengambil keputusan. Bahkan oleh sebagian, ia dianggap indecisive, kurang cepat untuk seorang pemimpin di era krisis.

Sebaliknya, Jusuf Kalla justru menampilkan citra seorang pemimpin yang sangat berani mengambil keputusan. Sebagai seorang mantan pengusaha, ia tahu sekali bahwa waktu adalah peluang. Terlambat mengambil keputusan dapat berakibat hilangnya momentum dan peluang. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, adalah tugasnya mengambil keputusan cepat dan tegas.

Jusuf Kalla tampak sangat determinatif dan sangat decisive. Ia terkesan sebagai pemimpin yang mampu mengatasi masalah secara cepat. Namun kelemahannya, ia dapat terkesan tergopoh-gopoh. Bahkan mungkin teknis prosedur yang formal dan detail dapat terkesan diterabas. Untuk pemimpin yang formal dan tertinggi, kesan "terabas" itu menimbulkan masalah besar.

Dua perbedaan gaya pemimpin tersebut di satu sisi dapat saja saling melengkapi. Ketika SBY penuh pertimbangan, JK dengan sigap dapat mendorong agar lahirnya keputusan yang lebih cepat. Namun dapat pula terjadi sebaliknya. Karena keinginan memuaskan harapan publik secepat mungkin, JK justru terkesan menyalahi prosedur atau lebih dominan dibandingkan presidennya sendiri.

Seratus hari pertama SBY-JK sangat diwarnai oleh isu dominasi Wakil Presiden JK. Terlepas apakah isu itu benar atau tidak, persepsi publik yang terbentuk sudah seperti itu. Dalam citra publik dan politik, acapkali persepsi lebih penting daripada fakta. Apakah persepsi itu benar atau keliru, publik tidak terlalu peduli.

Sejak kabinet terbentuk, sudah mulai muncul isu bahwa SBY memimpin kabinet yang didominasi JK. Atau lebih jauh lagi, SBY dianggap kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan adalah JK. Lebih ekstrem lagi, SBY dianggap presiden simbol- Sementara JK adalah presiden rill. Setelah JK memimpin Golkar, partai politik terbesar, isu JK sebagai matahari kembar di istana semakin kuat.

Munculnya SK Wapres/ Rakernas menjadi picu mengenai matahari kembar itu. Surat edaran yang ditandatangani sekretaris wapres mengenai imbauan menteri tidak datang ke DPR semakin mengembuskan isu matahari kembar.

Isu rivalitas presiden dan wapres itu adalah persepsi paling negatif di 100 hari pertama pemerintahan baru di mata elite politik. Sedangkan persepsi paling positif di mata elite adalah menguatnya dwitunggal ini. Dengan dikuasainya Golkar, praktis Koalisi Kebangsaan sudah layu sebelum berkembang. Parlemen yang tadinya mampu melumpuhkan pemerintahan eksekutif segera dapat dikontrol. SBY-JK justru kini berpotensi menjadi pasangan yang sangat kuat sekali.

Namun bagaimana dengan persepsi publik luas di luar elit politik atas SBY-JK? Publik luas ini adalah pemilih presiden di bulan September 2004. Mereka berjumlah 150 juta dan tersebar di lebih

60.000 desa dan kota. Setelah 100 hari, akankah persepsi mereka atas SBY-JK berubah?

Survei akhir tahun LSI 2004 dapat memberikan indikasi awal persepsi publik mengenai SBY-JK. Ada sisi buram dan sisi cerah pemerintahan SBY-JK di mata publik. Sisi buramnya, popularitas SBY-JK menurun. Hanya dalam waktu sebulan, melalui perbandingan dua survei, di bulan November dan Desember 2004, popularitas SBY merosot 13 poin. Popularitas dalam survei ini hanya dikaitkan dengan tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY-JK.

Harapan publik yang tinggi kepada SBY-JK juga menjadi sumber kekecewaan. Di samping itu, dari hasil survei, kelemahan SBY-JK di 100 hari pertama memang ada pada komunikasi politik. Blunder yang terjadi selama ini memang lebih banyak pada sisi PR (public relations) itu.

Contoh yang paling kongkret adalah tabrakan di tol Jagorawi yang memakan korban. Tabrakan itu terjadi di seputar iring-iringan mobil presiden. Juru bicara Andi Malarangeng terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa kesalahan ada pada pihak lain. Mungkin saja secara faktual, Andi benar. Namun pernyataan itu dirasakan kurang pas dengan senti men publik yang sedang berduka.

Para ahli komunikasi segera melancarkan kritik yang keras sekali. Juru bicara dianggap melakukan kesalahan elementer. Akibatnya bukan simpati publik yang didapat. Sebaliknya kesedihan publik itu justru berubah menjadi kemarahan kepada presiden. Kasus Jagorawi itu berdasarkan hasil survey LSI adalah kasus yang paling tidak memuaskan publik, dibandingkan dengan aneka kasus populer lainnya. Kelemahan PR ini juga terjadi di banyak kasus lainnya.

Namun publik juga memotret sisi cerah SBY-JK. Dalam dunia persilatan politik, SBY-JK masih dianggap paket yang paling populer. Jika SBY-JK bertentangan dengan DPR, SBY-JK yang lebih diikuti oleh publik. Jika SBY berhadap-hadapan dengan para jawara lain, seperti Megawati, Amien Rais, Gus Dur, atau Akbar Tandjung, tetap

SBY yang dianggap paling berpengaruh. Jika Koalisi Kebangsaan bersatu melawan Koalisi Kerakyatan yang pro-SBY, tetap Koalisi Kerakyatan yang lebih banyak didukung.

Penyebabnya karena publik masih percaya kepada kualifikasi kepemimpinan dan personalitas SBY. Kepercayaan ini harus dirawat sampai tahun 2009 agar SBY tidak bernasib buruk sebagaimana presiden Indonesia lainnya, yang ditinggalkan publik di ujung kekuasaan.

**MENIMBA PELAJARAN
DARI LUAR**

Agama dan Politik

MENGAPA kini banyak kelompok agama di Amerika Serikat mentransformasikan diri sebagai kekuatan politik? Mereka membentuk barisan, mengorganisasikan diri, mempengaruhi opini publik, lalu ingin menjadi kekuatan penekan yang efektif bagi pengambil kebijaksanaan.

Louis Farrakhan, pemimpin Nation of Islam itu, hanya salah satu contoh. Ia memimpin gerakan One Million March, 16 Oktober 1995- ia menobatkan hari itu sebagai the day of atone-ment, hari penebusan dosa dan awal kebangkitan spiritual kulit hitam. Ratusan ribu kulit hitam dari berbagai negara bagian berbondong-bondong datang ke Washington, D.C., mendengarkan seruannya. Inilah jumlah massa terbesar di bidang gerakan civil rights dan minoritas dalam sejarah Amerika Serikat.

Berhari-hari media massa di Amerika Serikat membahasnya. Bahkan dua televisi, CNN dan C-SPAN, menyiarkan acara itu secara langsung sekitar 12 jam. Popularitas Farrakhan pun melambung.

Pol pendapat yang diselenggarakan CNN setelah acara itu selesai menobatkannya sebagai tokoh paling berpengaruh di kalangan kulit hitam, di atas Jesse Jackson dan Collin Powel.

Namun Louis Farrakhan rupanya tak ingin menjadi juru dakwah agama belaka. Ia ingin mentransformasikan dukungan yang didapatnya lebih jauh. Hari berikutnya, ia membuat pernyataan pers. Bukan partai politik ketiga yang ingin didirikannya, melainkan sebuah kekuatan politik baru. Ia memberi nama kekuatan baru itu: Exodus.

Pemilihan nama Exodus sendiri sudah mengundang imaj. Para pengikutnya akan langsung mengasosiasikan Farrakhan sebagai "Nabi Musa" bagi kulit hitam. Pemujanya yang fanatik makin

melihatnya tak hanya sebagai pemimpin agama biasa, melainkan punya nuansa "kenabian" untuk membebaskan sebuah kaum dari kesengsaraan. Sebaliknya, pengkritiknya makin khawatir. Permainan simbol keagamaan ini akan membuat Farrakhan makin berilusi untuk melahirkan kekuatan nasionalis dan separatist kulit hitam, yang memisahkan diri dari kulit putih, sebagaimana Nabi Musa memisahkan kaum Yahudi dari Mesir.

Di luar Louis Farrakhan dengan Nation of Islam-nya, Christian Coalition sudah lama berdiri. Kelompok ini bahkan sudah berkibar dengan kuat menjadi grass-root yang aktif di Partai Republik, partai mayoritas Amerika Serikat sekarang. Kuatnya Christian Coalition dapat dilihat dari pengaruhnya atas calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik tahun ini. Isu- isu konservatif, seperti family values dan anti aborsi, mendominasi para calon.

Tentang menjamurnya kelompok agama di dunia politik Amerika Serikat, Daniel J.B. Hofrenning dapat bercerita banyak. Ia membuat riset. Bahkan di Negara Bagian Minnesota saja — satu dari 51 negara bagian — ada sejumlah 31 kelompok. Latar belakang agama kelompok ini cukup beragam, mulai dari evan-gelical, mainline Protestant, sampai Roman Catholic.

Isu politik yang dipropagandakan atau yang dilawan sangat beragam. Mulai dari anti aborsi, anti hak-hak kaum gay, mendukung doa di sekolah publik, anti pornografi dan kekerasan di TV, charity untuk kaum miskin, sampai pertolongan kepada para pengungsi dari negara tertentu.

Ternyata 67% dari organisasi itu lahir setelah 1980-an. Mengapa kelompok agama dalam gerakan politik itu justru menjamur setelah 1980-an? Ada apa di tahun 1980-an di Amerika Serikat? Hofrenning tak menjelaskan.

Tahun 1980-an adalah era awal bangkitnya neo-konservatisme di Amerika Serikat. Ketika itu Ronald Reagan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Sebagaimana Presiden Roosevelt yang membawa perubahan mendasar di Amerika Serikat pada 1930-an, dengan welfare state-nya, Presiden Reagan membalikkan tradisi itu ke arah neo-konservatisme di tahun 1980-an. Roosevelt memimpin Amerika Serikat bergerak ke Kiri. Ronald Reagan membalikkan Amerika Serikat ke Kanan.

Di belakang Reagan, dan di belakang neo-konservatisme, berdiri para ekonom, filsuf, dan penulis. Di bidang ekonomi ada Milton Friedman dan A. Hayek. Di bidang filsafat ada Irving Kristol. Ada pula penulis, seperti William F. Buckley, Goldwater, dan George Will. Beberapa jurnal yang menjadi juru bicara dan penyebar gagasan mereka adalah National Review, Public Interest, Jan Commentary. Setiap hari kerja di ABC ada pula talk show Rush Limbaugh. Belum terhitung berbagai newsletters dan kolom media massa.

Di bidang kebudayaan dan agama, filsuf yang acap dirujuk adalah Edmund Burke dan Leo Strauss. Burke menegaskan pentingnya menjaga moral order yang berlandaskan pada keluarga dan agama. Sebuah masyarakat menjadi stabil jika ada institusi kukuh yang menjaganya. Institusi itu haruslah perwujudan dari nilai-nilai yang sudah lama tertanam dalam sejarah, seperti keluarga dan agama. Sedangkan Leo Strauss menggarisbawahi signifikansi

sistem moralitas yang lahir pra-era kapitalisme, seperti agama dan tradisi, untuk mengintegrasikan perubahan cepat yang dibawa industrialisasi.

Tingginya angka kriminalitas di Amerika Serikat, penuh sesaknya penjara, intensitas kekerasan domestik di keluarga, penggunaan obat terlarang, banyaknya anak-anak yang tumbuh dengan orangtua tunggal, perkosaan, pembunuhan, tumbuhnya mentalitas ketergantungan kelas bawah atas subsidi pemerintah, sakit psikologis, membuat pandangan kultural neo-konservatisme makin relevan dan menggaung. Agama dibangkitkan dan dimasukkan kembali ke politik.

Kerusuhan

BAGAIMANA menjelaskan meluasnya kerusuhan yang mewarnai Pemilu 1997 di Tanah Air? Kebrutalan massa, perkelahian, dan perusakan properti terjadi di berbagai tempat, mulai dari ibu kota negara, Jakarta, sampai ke Irian Jaya.

Padahal kompetisi partai politik di negara kita tidak tinggi. Tidak ada perbedaan yang tajam dalam program dan visi partai di sini. Partai di Tanah Air belumlah berkembang menjadi kendaraan politik untuk memperjuangkan sebuah ideologi pembangunan. Berbeda dengan negara lain, partai politik di sini sudah terhindar dari konflik ideologis. Partai politik juga sudah terhindar dari konflik nominasi kepemimpinan nasional, karena hampir dapat dipastikan: berbagai peserta pemilu yang ada akan mengajukan nama yang sama.

Namun mengapa proses pemilu menjadi lebih rusuh? Berbagai analisis dan spekulasi dapat diberikan, mulai dari kesenjangan ekonomi, konspirasi elite politik, sampai isu manuver penganut agama tertentu. Kolom ini mengelaborasi perspektif lain, yang

tengah populer dalam literatur ilmu politik. Yaitu pendekatan kultural yang menekankan apa yang diistilahkan dengan level of trust (Inglehart, 1988, dan Fukujama, 1995).

Inglehart, misalnya, menggunakan term itu untuk menjelaskan stabilitas demokrasi di berbagai negara Eropa. Fukujama menggunakannya untuk menjelaskan turun-naiknya kemakmuran negara. Sedangkan kita memakainya untuk menjelaskan kerusuhan pemilu.

Apa itu level of trust dan mengapa ia penting? Level of trust adalah rasa percaya dan rasa nyaman masyarakat dalam melihat perbedaan pandangan di antara mereka {sesama kelompok politik yang bersaing) dan dalam menghormati institusi politik yang ada (legitimasi atas pemerintahan yang tengah berkuasa).

Level of trust ini, misalnya, mempertanyakan seberapa jauh kelompok yang bersaing tetap terikat pada komitmen dan kepentingan bersama, sehingga perbedaan tidak hanya menjadi permusuhan yang ingin saling memusnahkan, dan kompetisi tidak harus menjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Umumnya warga, misalnya, percaya bahwa siapa pun yang memenangkan kompetisi, tetap terikat pada aturan main yang terbuka dan equal bagi semua. Dalam perbedaan yang ada, umumnya warga juga percaya bahwa tetap hadir ruang bersama yang dapat menjadi landasan bagi kerja sama antarkelompok yang berbeda dan beragam.

Level of trust juga mempertanyakan seberapa jauh sistem dan institusi pemerintahan yang ada mewakili rasa keadilan masyarakat. Umumnya warga, misalnya, percaya bahwa kekuasaan yang dipinjamkan ke pemerintahan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum, dengan memperhatikan kaidah-kaidah moral, hukum, dan hak asasi. Adanya rasa percaya kepada integritas pemimpin.

Makin tinggi level of trust dalam kesadaran publik, makin stabil dan damai masyarakat itu. Rasa percaya yang tinggi atas institusi

negara dan kelompok politik membuat kerukunan lebih mudah digalang, lebih harmoni, dan masyarakat makin produktif, karena makin rendahnya konflik dan kekerasan. Pemerintahan yang stabil adalah pemerintahan yang dipercayai publiknya. Kompetisi politik yang sehat adalah jika para peserta percaya pada aturan main dan niat baik setiap peserta.

Rendahnya level of trust berhubungan langsung dengan perasaan terancam dan rasa dizalimi (diperlakukan tidak adil, sewenang-wenang). Ujung dari perasaan itu adalah aksi protes, kekerasan, dan kemarahan kolektif. Bagaimana dapat nyaman jika kita merasa bahwa kelompok politik yang bersaing atau institusi pemerintahan yang ada hendak menzalimi kita?

Berdasarkan perspektif ini, sebuah hipotesis dapat ditarik untuk menjelaskan kerusuhan pemilu. Secara hipotetis kita katakan, kerusuhan pemilu itu disebabkan menurunnya level of trust masyarakat, baik ke sesama kelompok politik yang bersaing maupun ke institusi pemerintahan, di saat suhu politik justru meningkat karena pemilu. Akibatnya, peristiwa pemilu dijadikan panggung untuk mengekspresikan rasa ketakutan, ketidakpuasan, dan kemarahan kolektif itu. Berbagai picu dengan mudah menyalurkan perasaan itu menjadi kerusuhan dan kekerasan.

Berbagai peristiwa dua tahun ini menguatkan perkiraan bahwa level of trust & masyarakat kita sedang menurun drastis. Kewibawaan institusi pemerintahan terganggu, antara lain, oleh kasus Eddy Tansil, kolusi di Mahkamah Agung, kasus Megawati, meluasnya korupsi, serta nepotisme anak-anak pejabat dalam bisnis. Sedangkan harmoni antarkelompok masyarakat terganggu oleh berbagai kasus pembakaran rumah ibadah, pertokoan, dan isu-isu rasial serta sektarian yang makin meluas dan berdarah.

Jika hipotesis tersebut benar, maka kerusuhan itu hendak menyatakan bahwa banyak hal yang masih menghadang untuk membuat kita saling percaya sebagai sebuah bangsa. Tentu ini sebuah peringatan yang pilu.

Ekspor Demokrasi

APA kesulitannya jika sebuah negara superpower seperti Amerika Serikat ingin mengekspor demokrasi ke negara lain? Ini pertanyaan penting yang harus dijawab dulu agar diskusi antara Riza Sihbudi dan Rizal Malarangeng (Gatra 31 Mei, 7 Juni, dan 21 Juni 1997) bergerak ke akar persoalan.

Riza Sihbudi memaparkan inkonsistensi kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat untuk mendorong demokrasi di negara lain. Amerika yang seharusnya menjadi panutan dalam pelaksanaan demokrasi dan hak asasi, menurut Riza, justru menerapkan standar ganda. Negeri Paman Sam itu, misalnya, mendukung gerakan prodemokrasi di Indonesia, Myanmar, atau RRC, tetapi tidak melakukan hal serupa atas negara sekutunya, seperti Israel, Arab Saudi, dan Mesir.

Jika Amerika memang tidak ingin mencampuri urusan intern negara sekutunya, menurut Riza, jangan juga mencampuri urusan intern negara lain. "Seandainya para pemikir besar demokrasi, seperti Montesquieu, Voltaire, dan John Locke masih hidup, apakah

mereka juga akan menyebut politik standar ganda yang dipraktekkan Amerika selama ini seba.gal the real democracy? (Gatra, 21 Juni).

Saya menyetujui fakta yang dikemukakan Riza. Namun kerangka berpikirnya, dalam pandangan saya, ada yang keliru: Ia tidak mendefinisikan konsep demokrasi secara ketat. Jika argumen Riza itu dilanjutkan, konsekuensinya adalah "sebuah negara layak disebut the real democracy hanya jika kebijaksanaan politik luar negerinya konsisten untuk mendukung (atau tidak mendukung) gerakan demokrasi di negara lain". Sayang, harapan Riza tidak didukung oleh acuan standar pemikiran filsuf demokrasi. Konsep demokrasi, seperti yang dipercakapkan dalam dunia akademis, berbeda dengan yang diharapkan Riza.

Isi kebijaksanaan luar negeri, termasuk konsistensinya, tidak termasuk dalam kriteria demokrasi. Tidak ada satu pun pemikir besar demokrasi, mulai dari Plato sampai John Locke, atau yang terakhir Karl Popper, yang memasukkan isi ataupun konsistensi kebijaksanaan luar negeri sebagai bagian dari sistem politik demokrasi. Kita boleh setuju atau tidak atas kebijaksanaan luar negeri suatu negara, tetapi tidak ada sangkut-pautnya dengan kriteria demokrasi.

Pemerintahan demokrasi, sebagaimana pemerintahan otoriter, diktator, patrimonial, ataupun penguasa militer, adalah klasifikasi politik bagi suatu negara nasional. Dalam literatur politik, pemerintahan ini secara baku disebut jenis rezim. Layaknya suatu negara disebut demokrasi yang riil, semi-demokrasi, atau bahkan anti demokrasi ditentukan dari prosedur politik dalam memilih pemimpin, dan mekanisme membuat serta mengontrol kebijaksanaan publik.

Jika di negara tersebut ada kompetisi pemimpin politik dalam pemilu yang reguler serta ada jaminan hak sipil seperti kebebasan berorganisasi dan kebebasan pers, agar terjadi partisipasi politik publik negara itu layak masuk kategori negeri demokratis. Menjawab keraguan Riza, seandainya Montesquieu, Voltaire, dan John Locke masih hidup, mereka mungkin tidak menyetujui kebijaksanaan luar

negeri Amerika Serikat. Namun secara pasti, mereka akan tetap menganggap Amerika Serikat sebagai the real democracy. Syarat pemerintahan demokratis itu memang dipenuhi Amerika Serikat.

Riza Sihbudi melihat politik luar negeri Amerika Serikat secara hitam-putih. Riza tidak menghitung, misalnya, bahwa perbedaan (inkonsistensi) kebijaksanaan politik atas berbagai negara bisa disebabkan berbedanya kondisi berbagai negara target itu sendiri. Suatu kebijaksanaan yang tunggal dan sama justru dapat menjadi kontraproduktif jika diterapkan pada kondisi yang berbeda-beda itu. Ada kemungkinan, yang harus juga dilihat Riza, bahwa inkonsistensi tersebut bukan disebabkan sikap politik yang plin-plan, melainkan hasil perhitungan yang matang dan profesional atas berbagai kepentingan yang kompleks.

Dalam jurnal *The Washington Quarterly*, edisi musim gugur 1995, Thomas Corothers, menulis artikel yang bagus berjudul *Democracy Promotion Under Clinton* tentang kompleksnya kepentingan dan kondisi dunia internasional, sehingga dalam mempromosikan demokrasi, Presiden Clinton harus fleksibel.

Corothers menunjukkan bahwa ekspor demokrasi dalam pemerintahan Clinton harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas. Kebijakan itu berada dalam satu paket dengan pertimbangan keamanan regional dan kepentingan ekonomi Amerika. Dalam dunia politik riil, jelas tidak ada sinterklas yang bersedia memberikan bantuan cuma-cuma tanpa berpikir tentang kepentingan sendiri. Kepentingan nasional suatu negara adalah sah jika menjadi pertimbangan utama kebijaksanaan luar negerinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ekspor demokrasi bisa tidak menjadi prioritas jika hasilnya malah membahayakan kepentingan nasional negara pengekspornya, atau malah mengusik keamanan regional negara target.

Ekspor demokrasi juga harus mempertimbangkan kondisi lokal negara sasaran. Misalnya, seberapa jauh negara target siap untuk

bertransisi ke demokrasi berdasarkan kondisi ekonomi, kelembagaan politik, dan gerakan prodemokrasi di negara itu. Amerika Latin, misalnya, dinilai lebih siap ketimbang Timur Tengah. Eropa Timur dinilai lebih matang dari Afrika dan Asia. Prioritas ekspor demokrasi dan isi paket bantuan ke berbagai wilayah itu jelas menjadi berbeda, dan bisa jadi bertentangan.

Realisme, satu perspektif dalam politik internasional, mengatakan bahwa negara yang paling arif sekalipun akan banyak mengalami kesulitan untuk mempromosikan demokrasi di luar wilayah teritorialnya (Krasner, 1992). Sulit bukan berarti mustahil, tetapi akan banyak kendala yang harus membuat suatu negara fleksibel.

Bagaimanapun, saya menyetujui sikap kritis Riza atas permainan politik luar negeri Amerika Serikat. Terlebih lagi jika sikap kritis itu disertai dengan pemakaian konsep secara lebih ketat, dan tidak menyederhanakan hal yang memang kompleks.

Politik Orang Kaya

MUNGKINKAH orang superkaya di Indonesia bertindak seperti Ted Turner? Akhir September 1997 ini Turner mengumumkan, ia menyumbangkan uang sebesar US\$ 1 milyar (sekitar Rp 3 triliun berdasarkan nilai tukar 1997) dalam waktu 10 tahun kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Uang ini, ujar Ted Turner, harus digunakan buat mereka yang termiskin dari yang miskin, para pengungsi, lingkungan hidup, anak telantar, dan pro-gram perdamaian.

Dalam jamuan makan malam di New York, yang diselenggarakan Asosiasi PBB-Amerika Serikat, dan dalam wawancaranya dengan Larry King di CNN, Ted Turner mengemukakan tujuannya menyumbangkan uang sebesar itu, Manusia, kata Ted Turner, tidak lahir dengan bakat memberi, tetapi dengan insting yang mementingkan diri sendiri. Namun menurut Ted Turner, memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan membuat kebahagiaan tersendiri. Dengan memberi, kata Ted Turner, kita malah menerima

lebih banyak. Dan ia menantang orang-orang superkaya lain untuk juga memberi.

Ted Turner mewakili sisi lain masyarakat Amerika Serikat. Jauh sebelum Ted Turner, banyak penderma lain yang legendaris. Pada abad ke-19, misalnya, ada industrialis Andrew Carnegie. Selama hidupnya, Carnegie diperkirakan telah menyumbangkan uang buat kemanusiaan sebesar US\$ 350 milyar waktu itu. Dari uang itu, antara lain, telah didirikan sekitar 2.500 perpustakaan dan berbagai museum pending.

Ada pula John D. Rockefeller, pendiri Standard Oil, pada awal abad ke-20. Tanah yang sangat luas tempat kantor PBB sekarang di New York adalah sumbangannya. Para ahli menghitung, selama hidupnya, Rockefeller telah menyumbangkan uang sebesar US\$ 500 milyar sebelum tahun 1921. Jumlah itu lima ratus kali lebih besar dari sumbangan Ted Turner sekarang.

Sampai sekarang tradisi berderma di Amerika Serikat ini masih berlanjut. George Soros, yang di Indonesia dikenal sebagai spekulan mata uang, tercatat sebagai penderma terbesar di antara seluruh penderma yang masih hidup. Ia sudah menyumbangkan uang sebesar Rp 5 trilyun. Tahun lalu saja ia memberikan Rp 1 trilyun, termasuk untuk membantu menanggulangi para imigran ilegal, dan membangun secara cuma-cuma berbagai pusat internet di berbagai universitas di Rusia.

Juga Bill Gates, pendiri Microsoft, yang sekarang tercatat sebagai orang terkaya di dunia. Tahun ini ia mendermakan sebesar Rp 600 milyar, 1% dari kekayaannya, dengan menyediakan peralatan komputer di berbagai perpustakaan. Mengapa orang-orang superkaya tergerak mendermakan uang dalam jumlah yang banyak? Dalam buku *The Charity Business* (1993), Tom Lloyd mencatat, terjadi pergeseran dalam dunia derma, terutama dalam era persaingan bisnis seperti sekarang.

Awalnya derma untuk kemanusiaan adalah bagian dari keyakinan agama. Dalam tradisi agama samawi, Yudaisme, Kristen, dan Islam, berbagai kekayaan yang ada di muka bumi ini dianggap titipan Tuhan. Hak milik atas barang apa pun tidak bersifat mutlak dan harus diperlakukan sebagaimana dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan diyakini menghendaki semua kekayaan itu disucikan melalui sedekah, atau kegiatan yang membantu orang lain. Orang-orang yang ditipti kekayaan kemudian memberikan sumbangan, berderma, karena konsep pemilikan yang religius itu.

Namun kini derma itu terkait dengan kepentingan bisnis. Promosi yang paling baik buat orang superkaya ataupun perusahaan besar adalah kegiatan derma. Bagaimanapun, publik selaku konsumen tetap tersentuh oleh berita mengenai keluhuran, kebaikan, pertolongan, solidaritas, dan komitmen kepada mereka yang miskin, yang tersingkir, yang tidak berdaya. Publik pun tersentuh dengan upaya pengembangan fasilitas, riser, dan ilmu pengetahuan untuk tujuan kemanusiaan ataupun memajukan peradaban. Berbagai sumbangan di dunia ini akan memenangkan sentimen publik. Derma orang kaya itu akan menaikkan citranya, dan menambah kecintaan publik kepada produk bisnisnya.

Yang tidak dikatakan Tom Lloyd, derma pun terkait dengan sistem yang lebih besar. Di era yang serba diatur mekanisme pasar, ternyata tidak segala hal dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar. Dalam kompetisi kehidupan melalui mekanisme pasar, berbagai resources akan makin terpusat kepada mereka yang lebih efisien, lebih berpendidikan, lebih bermodal, dan lebih cekatan. Banyak yang tersingkir dari kompetisi, terutama mereka yang latar belakangnya memang sudah serba kekurangan.

Sampai tahun 1960-an, ketika konsep Welfare State berjaya, sempat diyakini bahwa pemerintah hams mengambil alih segala hal yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar. Distribusi kekayaan, penyediaan fasilitas umum, bantuan kepada rakyat miskin, dan penelitian ilmu dasar serta kesehatan hams dibiayai

pemerintah. Tidak realistis mengharapkan pihak swasta membiayai program itu, yang memang tidak memberikan keuntungan materiil secara langsung. Masyarakat itu sendiri yang harus membiayainya. Pemerintah adalah representasi masyarakat keseluruhan.

Namun kini disadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan. Di samping kemungkinan korupsi di kalangan birokrat, kerja pemerintah banyak yang tidak efisien. Kini para pekerja sosial dan ilmu pengetahuan kembali menoleh kepada swasta, terutama orang-orang superkaya, untuk membiayai melalui derma apa yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar. Derma orang superkaya menjadi fungsional dan terintegrasi dalam sistem kapitalisme.

Orang-orang superkaya di Indonesia akan banyak menolong citra mereka sendiri, sekaligus menolong masyarakat yang membutuhkan, jika mereka juga mulai berkompetisi dalam kegiatan derma.

Primordialisme Amerika

Di sekitar Gedung Putih, Washington, D.C., 4 Oktober 1997, ratusan ribu orang berkumpul, memenuhi jalan, menghadap ke sebuah panggung raksasa. Menurut CNN, ini salah satu kerumunan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika Serikat. Sebagian dari mereka kadang bersujud, menangis, mengucapkan sumpah, bersorak, bertepuk tangan.

Kerumunan itu bukan sedang menghadiri konser musik rock atau menyambut kedatangan pahlawan dan pasukan yang baru saja memenangkan perang. Mereka sedang mengikuti sebuah prosesi keagamaan. Mereka penganut Promise Keepers, sebuah sekte agama Kristen. Mereka datang secara berkelompok dari berbagai negara bagian dengan mencarter bus, kereta api, atau pesawat terbang, agar bisa menjadi bagian peristiwa religius yang kolosal itu. Setahun sebelumnya, sekte ini mengelilingi 20 negara bagian di Amerika Serikat. Mereka membuat ritual agama di stadion sepak bola yang berkapasitas 50.000 sampai 70.000 orang, di masing-masing negara bagian. Stadion itu selalu penuh sesak.

Di depan acara televisi C-SPAN, yang menyiarkan secara langsung acara di Washington itu selama enam jam, saya termenung lama. Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Mengapa Amerika Serikat, pusat peradaban sekuler, kini justru diguncangkan oleh kebangkitan berbagai kelompok agama?

Amerika Serikat saat ini, ujar Chip Berlet dan Quigley (1977), sedang dilanda perang kebudayaan. Kini tengah bangkit dengan perkasa gerakan politik sayap kanan yang menggunakan ajaran agama sebagai panduan politik. Tokoh utama gerakan ini adalah Pat Robertson, pendiri Christian Coalition, yang ingin mengubah Amerika Serikat menjadi sejenis "negara teokrasi otoritarian".

Robertson mengikrarkan perang terhadap sistem Amerika Serikat yang makin bobrok karena berlandaskan kebudayaan sekuler. Sebagai alternatif, Robertson menawarkan sistem yang berlandaskan agama yang diyakininya. "Tidak akan pernah ada rasa damai," ujar Pat Robertson, "sampai rumah Tuhan dan pengikut Tuhan diberikan haknya untuk memimpin dunia. Bagaimana ada rasa damai jika pemabuk, penganjur minuman keras, komunis, ateis, pemuja setan, dan sekuler humanis, diktator, spekulan uang, pembunuh revolusioner, dan homoseks berada dalam jajaran puncak kepemimpinan?"

Peace Keepers, yang hari itu berdemo di Washington dan didirikan oleh Bill McCartney di tahun 1990, memang terkesan jauh lebih moderat ketimbang kelompok Pat Robertson. Namun analisis politik melihatnya hanya sebagai strategi. Ada agenda politik yang disembunyikan, yang baru akan dimunculkan setelah gelombang gerakan menjadi besar.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa di Amerika Serikat telah terjadi pergeseran area konflik, dari persoalan ekonomi dan politik ke persoalan kultur dan gaya hidup. Tidak ada lagi perdebatan ideologis yang menyangkut sistem ekonomi dan politik. Kapitalisme sebagai model ekonomi dan demokrasi sudah mengakar dan diterima secara

luas. Kalaupun ada perselisihan di bidang ekonomi atau politik, sifatnya tidak mendasar. Paling-paling hanya menyangkut masalah graduasi, seperti seberapa besar pajak ditingkatkan atau diturunkan, dan seberapa besar keterlibatan pemerintah dalam ekonomi.

Namun dalam masalah kultur dan gaya hidup, konflik makin menganga, menyentuh ke masalah ideologis dan emosional. Isu kultur dan gaya hidup sedemikian mudahnya memecah belah masyarakat ke dalam pro dan kontra serta pemihakan. Misalnya, pro dan kontra atas aborsi, homoseksual, atau orangtua tunggal. Mereka yang kini aktif di berbagai kelompok agama, yang mengambil posisi seperti Pat Robertson, berseberangan dengan mereka yang tumbuh dalam kultur yang sekuler humanis.

Kelompok Pat Robertson dan Promise Keepers mendapat momentum dari persoalan besar yang kini tengah dihadapi Amerika Serikat, misalnya tingginya angka perceraian, maraknya tindak kriminalitas di kota besar, atau meluasnya gerakan homoseksual, yang semuanya dianggap mengancam kenyamanan hidup dan nilai-nilai konservatif.

Masalah di atas tidak lagi dapat diatasi dengan hanya mengubah institusi atau struktur sosial. Dibutuhkan respons yang berhubungan dengan filsafat hidup dan sistem makna perorangan. Dan agama yang sudah mentradisi adalah obat mujarab.

Persoalannya, Pat Robertson dan tokoh sejenisnya telah mempolitisasikan agama sedemikian rupa sehingga agama menjadi eksklusif. Berbagai gerakan politik agama yang di Amerika Serikat dicap sebagai politik kanan ekstrim itu memiliki ciri memomorduakan kelompok masyarakat tertentu. Ada yang menggunggulkan kulit putih dan mendiskriminasi kulit berwarna. Ada yang memuja patriotisme Amerika Serikat dan anti imigran. Promise Keepers, misalnya, hanya mencari pengikut lelaki dan memomorduakan wanita. Ada pula yang membuat diskriminasi berdasarkan agama.

Tidak mengherankan jika berbagai kelompok yang ingin memelihara keberagaman dan persamaan hukum bagi semua warga negara menganggap gerakan politik agama Pat Robertson dan Promise Keepers sebagai ancaman. Di dalam masyarakat sendiri tumbuh banyak organisasi yang siap melawan gerakan sejenis Pat Robertson. Mereka antara lain American United for Separation Church and State, Institute for First Amendment Studies, The Interfaith Alliance, dan Equal Partners in Faith. Kelompok lintas agama, ras, dan gender ini cukup efektif membentuk opini publik.

Ada baiknya jika tokoh masyarakat di Indonesia membentuk sejenis kelompok kerukunan antaragama, ras, ataupun etnik, seperti The Interfaith Alliance atau Equal Partners in Faith. Jika kelompok kerukunan ini mampu mengakar di massa, konflik primordial di negeri kita bisa dikurangi.

Kepentingan Publik

PARA politikus, pengusaha, dan aktivis di Indonesia yang antimonopoli boleh mendengar Janet Reno. Akhir Oktober 1997, melalui Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang dipimpinnya, Reno meminta Pengadilan Distrik di Negeri Paman Sam itu mengenakan denda US\$ 1 juta, atau sekitar Rp 3,5 milyar, per hari kepada perusahaan software terbesar di dunia, Microsoft. Ini adalah denda terbanyak yang pernah diminta divisi antitrust departemen itu sepanjang sejarah.

Berhari-hari kasus ini menjadi laporan utama media massa Amerika Serikat karena keunikannya. Ini ceritanya. Melalui kompetisi bebas, Microsoft menguasai pasar software komputer. Sebanyak 70% konsumen pemakai personal computer (PC) menggunakan sistem operasi Windows 95 yang diproduksi Microsoft. Di era internet dan e-mail, Microsoft juga memproduksi Internet Explorer sebagai sistem untuk menjelajahi dan mengeksplorasi kekayaan informasi yang disediakan dunia internet itu.

Persoalannya, Microsoft hanya bersedia menjual Windows 95, jika perusahaan yang sama memasukkan program Internet Explorer itu ke dalam program Windows 95- Otomatis, konsumen Windows 95 yang sangat dominan itu juga akan memiliki Internet Explorer.

Di Indonesia, persyaratan ini mungkin akan menjadi persoalan strategi pemasaran biasa. Sepintas memang tidak ada yang salah dengan strategi penjualan itu. Toh Microsoft tidak melarang perusahaan lain melakukan Hal yang sama dan tidak memaksa publik membeli. Semuanya masih dalam aturan kompetisi bebas dan mekanisme pasar.

Namun di Amerika Serikat, yang sangat sensitif dengan monopoli, hal itu menjadi lain. Microsoft dianggap melakukan sejenis gerakan bawah tanah untuk mematikan saingannya. Dunia internet selama ini dikuasai perusahaan lain, Netscape. Dua dari tiga pengguna internet selama ini memakai Netscape. Jika Internet Explorer dari Microsoft dapat diperoleh secara otomatis dengan membeli Windows 95, Netscape akan hilang dari pasaran. Pembeli Windows 95, yang jumlahnya sekitar 70% dari pemakai PC, tidak akan merasa perlu lagi membeli Netscape, karena program yang kurang lebih sama (Internet Explorer) sudah tersedia dalam Win-dows 95-

Lalu mengapa Pemerintah Amerika Serikat harus terlibat dalam persaingan bisnis antara dua perusahaan raksasa itu? Mengapa pemerintah harus peduli dengan adanya satu pihak yang akan sangat menguasai pasar dan pihak lain yang akan mati? Bukankah semuanya terjadi dalam persaingan bebas, dan pemerintah tidak membuat diskriminasi? Bukankah Microsoft menjadi superior bukan lantaran proteksi pemerintah ataupun lisensi khusus, melainkan sepenuhnya karena pilihan bebas konsumen sendiri?

Ilmu politik menyediakan satu jawaban untuk itu, yaitu konsep kepentingan publik (public interest}. Diyakini, kepentingan publik akan terlayani dengan lebih baik jika situasi kompetisi di segala bidang terpelihara. Jika ada satu pihak terlalu dominan menguasai

pasar walau itu diperoleh melalui kompetisi bebas dominasi itu dianggap berbahaya bagi kepentingan publik. Pemerintah sebagai penjaga kepentingan publik diwajibkan menetralkan dominasi itu melalui seperangkat regulasi.

Konsep kepentingan publik ini dalam sejarah Amerika Serikat mulai dipopulerkan sejak awal abad ini, antara lain oleh Theodore Roosevelt dan Walter Lippmann. Konsep ini menganggap bahwa dalam sebuah komunitas ada kepentingan sama yang dimiliki setiap individu sebagai anggota komunitas itu. Secara umum, kepentingan itu dirumuskan sebagai peningkatan kesejahteraan bersama berdasarkan aturan main yang kompetitif dan fair. Musuh utama yang dihadapi adalah bisnis besar yang berkecenderungan monopolistik dan anti kompetisi.

Menurut konsep ini, Microsoft sudah anti kompetisi. Microsoft, yang menguasai pasar sebanyak 70% dalam sistem operasi Windows 95, dianggap sudah berada dalam posisi mendekati monopoli. Melalui dominasi ini, Microsoft sudah mampu menekan pembeli untuk juga menggunakan produk Microsoft lainnya jika ingin mendapatkan Windows 95. Dominasi Microsoft dianggap merugikan kepentingan publik karena, sedikitnya, dua alasan.

Pertama, pilihan dan kebebasan publik untuk memilih akan makin terbatas. Publik makin mudah diarahkan, karena Microsoft pemilik eksklusif sebuah produk yang memang sangat dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan sistem operasi Windows 95.

Kedua, karena tidak lagi memiliki saingan berarti, Microsoft tidak lagi dipaksa pasar untuk menciptakan produk dengan metode yang seefisien mungkin. Padahal, kompetisi ketat dapat membuat publik mendapatkan produk yang lebih murah atau lebih berkualitas. Microsoft pun kini diserang dari berbagai penjurur agar menghentikan berbagai upaya untuk memanfaatkan posisi dominannya dalam sistem operasi Windows 95- Para senator di Kongres, misalnya Ted Stevens dan Craig Thomas, melayangkan surat ke Federal Trade

Commission untuk membuat penyelidikan atas strategi bisnis Microsoft yang anti kompetisi tersebut. Sementara itu, lembaga konsumen berpengaruh pimpinan Ralph Nader, Con-sumer Project on Technology, membentuk opini publik dan memberikan tekanan kepada divisi antitrust di pemerintahan untuk Bertindak. Pers pun tidak ketinggalan bersuara. Terbentuk suatu koalisi sukarela yang ingin melindungi kepentingan publik untuk mendapatkan suasana kompetisi dan hak memilih.

Konsep kepentingan publik itu agaknya perlu juga dipopulerkan di Indonesia agar makin mudah menumbuhkan kultur antimonopoli.

Jiang Zemin dan Amerika Serikat

AKHIR Oktober 1997, Jiang Zemin, presiden negara komunis terbesar, Republik Rakyat Cina (RRC), melawat selama sembilan hari ke Amerika Serikat, pusat negara kapitalis Barat. Dia, antara lain, mengunjungi Honolulu, Washington, D.C., New York City, dan Boston. Zemin berbicara dan bertemu muka dengan banyak kalangan di sana, mulai pengusaha, politikus, aktivis, demonstran, hingga artis. Ia berbicara di berbagai forum, mulai acara resmi di Gedung Putih sampai ke altar Universitas Harvard, pusat akademisi yang sangat bergengsi.

Jiang Zemin boleh jadi tertegun. Ia menerima respons yang tidak hanya berbeda-beda, melainkan juga bertentangan. Di Harvard dia disambut ribuan demonstran. Demonstrasi tersebut adalah yang terbesar di kampus itu sejak aksi protes Perang Vietnam pada tahun 1960-andan 1970-an. Berbagai isu serta poster yang mencaci-maki dilontarkan kepada Zemin, mulai masalah Tibet, pembebasan tokoh oposisi Wei Jingsheng dan Wang Dan, kerja rodi di penjara, pemalsuan software komputer, sampai masalah kebebasan beragama di RRC.

Tokoh di balik demonstrasi itu adalah Richard Gephard, Ketua Partai Demokrasi di Kongres Amerika Serikat. Gephard juga disebut-sebut sebagai salah seorang calon presiden terkuat Amerika Jiang Zemin dan Amerika Serikat

Serikat di masa depan. Menurut Gephard, pelanggaran hak asasi yang dilakukan Pemerintah RCC harus dibalas masyarakat internasional. Menurutnya, Amerika Serikat dapat memimpin aliansi untuk menjatuhkan sanksi ekonomi ataupun pembatasan impor barang-barang RCC di pasar Amerika Serikat.

Namun di kalangan pengusaha, terutama di California, Zemin mendapat sambutan yang sama sekali berbeda: hangat dan memuji. Dalam komunitas ini, Zemin tidak mendengar isu hak asasi. Pembicaraan bergulir mengenai aneka masalah bisnis serta kerja sama industri RCC dan Amerika Serikat pada masa kini dan akan datang. "Kami menganggap Cina sebagai sumber bisnis yang sangat penting untuk waktu yang lama." ujar Hughes, wakil presiden perusahaan teknologi Steve Dorman.

Komunitas bisnis yang hangat terhadap RCC dan tidak menyinggung masalah hak asasi juga didukung para politikus yang tangguh. Di antaranya adalah mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger. Menurut komunitas ini, kepentingan bisnis harus menjadi kriteria utama untuk merumuskan kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat. Di samping itu, tidak ada faedahnya mengaitkan isu hak asasi dengan sanksi ekonomi ataupun pembatasan perdagangan.

Di zaman yang makin global seperti sekarang, di mana tersedia banyak substitusi bagi setiap produk dan tersedia pula aneka pasar gelap, sanksi ekonomi dianggap tidak efektif. Lebih dari itu, jika dunia bisnis RCC makin berkembang, hak asasi manusia justru akan makin dianggap penting pula, sebab bisnis yang maju akan melahirkan kelas menengah dan kalangan terdidik, yang makin mandiri secara ekonomi, peduli terhadap hak asasi, dan ingin ikut

mengatur kebijaksanaan yang sebaiknya ditempuh rezim yang memerintah. Sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan justru kontraproduktif terhadap penerapan hak asasi manusia.

Mengapa terjadi perbedaan sikap yang mencolok di kalangan aktivis, politikus, dan pengusaha Amerika Serikat terhadap negara sepenting RRC, yang diperkirakan menjadi salah satu superpower pada abad ke-21, dan menjadi saingan terberat Amerika Serikat? Menurut Huntington (1997), sejak runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat kehilangan orientasi. Musuh lama Amerika Serikat, yakni Uni Soviet, sudah hilang. Namun musuh baru belum terumuskan. Selama 40 tahun, Perang Dingin itulah yang menjadi landasan seluruh kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat, sekaligus menjadi panduan dan kriteria pengambilan kebijaksanaan.

Berbagai program besar dirancang untuk menghadapi Perang Dingin, seperti Marshal Plan, NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara), pengembangan senjata nuklir, bantuan luar negeri, operasi intelijen, perdagangan bebas, program luar angkasa, aliansi dengan blok Barat dan dunia ketiga, pelatihan militer bagi negara lain, penyediaan pos militer di kawasan strategis, Perang Vietnam, pendekatan ke Cina, dan dukungan bagi Afghanistan.

Setelah Perang Dingin usai, Amerika Serikat kehilangan musuh besarnya. Kepentingan nasional akhirnya dirumuskan secara temporer, berdasarkan ancaman dan kebutuhan sesaat yang mudah berubah-ubah. Karena tidak ada lagi kerangka besar ideologis yang komprehensif, sebagian tokoh berpengaruh mereduksi kepentingan nasional hanya menjadi kepentingan bisnis.

Pemerintahan Clinton, misalnya, ujar Huntington, kini memberikan prioritas bagi diplomasi komersial, yang menjadikan promosi ekspor perdagangan Amerika Serikat sebagai tujuan utama. Prestasi di dunia bisnis kini menjadi kriteria utama keberhasilan duta besar Amerika Serikat di negara lain. Kepentingan bisnis kini mengalahkan tujuan lain, seperti ekspor demokrasi dan hak asasi.

Namun bagi sebagian politikus lain, kepentingan bisnis semata-mata akan membuat kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat kehilangan pesona moral. Men unit mereka, promosi kultur dan tradisi Amerika Serikat, seperti kebebasan, demokrasi, hak asasi, dan pemerintahan konstitusional, harus menjadi prioritas utama kebijaksanaan luar negeri, bukan kepentingan bisnis.

Akan makan waken lama bagi Amerika Serikat untuk menentukan kembali platform kepentingan nasionalnya yang baru, sekuat dan sekomprensif ketika Amerika Serikat masih menghadapi Perang Dingin. Sebelum platform itu terbentuk, perbedaan pendapat di kalangan tokoh pentingnya atas berbagai isu luar negeri, seperti kasus Cina, akan terus terulang, sebab situasi baru menghendaki platform kepentingan nasional yang baru. Ini berlaku bagi Amerika Serikat, juga bagi negara lain, termasuk Indonesia.

Krisis Asia

BAGAIMANA menjelaskan krisis yang tengah terjadi di berbagai negara Asia? Di Filipina, Malaysia, dan Jepang, krisis keuangan itu relatif bisa ditanggulangi. Tetapi di Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand, krisis keuangan yang berlarut-larut berdampak besar pada dunia sosial dan politik.

Thomas Friedman menulis kolom di New York Times pertengahan Desember 1997 dengan menceritakan pengalamannya di Thailand. Kaus oblong paling laku di Thailand sekarang di bagian mukanya bertuliskan "Bekas orang kaya". Ini sebuah sinisme masyarakat terhadap dirinya sendiri, yang pernah kaya dan kini jatuh miskin. Sirivat Voravetvuthikun adalah simbol perubahan yang mendadak karena krisis itu. Ia dulu memiliki kondominium mewah. Krisis membuatnya rugi besar. Kini, untuk bertahan hidup, ia menjual sandwich di pinggir jalan.

International Monetary Fund (IMF) memang sudah memberikan paket pinjaman kepada Thailand sebesar US\$ 17,2 milyar. Tetapi krisis

keuangan terus berlanjut. Sebanyak 56 dari 58 investment house di Thailand ditutup. Lebih dari 20.000 pekerja kerah putih (white-collar worker] kehilangan pekerjaan. Dari krisis ini diperkirakan, Thailand akan mempunyai 2 juta penganggur. Bom pertumbuhan ekonomi yang dinikmati Thailand selama 10 tahun kini berakhir. Krisis ini sudah pula meminta korban politik. Perdana Menteri Chavalit Yongchaiyudh mengundurkan diri.

Krisis keuangan di Indonesia pun masih berlanjut. Pemerintah sudah melikuidasi 16 bank swasta. Paket dari IMF sebesar USJ 23 milyar sudah dijanjikan. Tetapi kurs rupiah atas dolar terus merosot, bahkan sudah menembus angka Rp 6.000 per USJ 1, jauh lebih rendah daripada periode sebelum paket bantuan IMF. Sejumlah perusahaan limbung. Diperkirakan, hampir 1 juta orang akan kehilangan pekerjaan.

Korea Selatan juga tidak luput dari krisis. Negara yang dianggap sebagai salah satu "macan Asia" itu kini juga limbung. Sampai pertengahan Desember, kurs uang Korea Selatan merosot 23%. Perusahaan pialang keempat terbesar di negeri itu, Dongsuh, bangkrut. Masyarakat makin resah, walaupun IMF sudah menjanjikan paket bantuan sebesar US\$ 57 milyar. Mereka mengetahui bahwa bantuan itu memang diperlukan, tetapi kebanggaan nasional mereka terluka.

Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Kindleberger, ekonom ternama dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, Amerika Serikat, menulis buku tentang topik ini. Ia mengamati krisis keuangan internasional, mulai dari yang terjadi di Inggris pada 1772 dan 1825 hingga di Amerika Serikat pada 1929 dan 1987.

Krisis pada 1929 di Amerika Serikat, yang meluas ke negara Barat lainnya, jauh lebih buruk dan panjang ketimbang krisis di Asia. Hari Selasa, 24 Oktober 1929, yang dikenal dengan istilah "Black Tuesday", kebangkrutan stock market dimulai. Efeknya terus meluas sampai bertahun-tahun. Pada 1932, hasil produksi industri Amerika

Serikat merosot separuh. Sekitar 15 juta orang menganggur. Kala itu, asuransi untuk pengangguran juga belum ada. Upah per jam turun 50%. Ratusan bank bangkrut.

Sebanyak 90.000 unit usaha ditutup. Banyak milyuner menjadi miskin, dan mereka mengantre roti di pinggir jalan. Tingginya keresahan saat itu dapat dilihat dan jumlah angka bunuh diri. Pada 1931 saja, sebanyak 20.000 warga Amerika Serikat bunuh diri.

Lalu Kindleberger mengembangkan model yang dipinjam dari Minsky untuk menjelaskan aneka krisis itu. Menurut model ini, awal krisis umumnya dimulai dengan terjadinya displacement, atau perubahan mendadak dalam faktor eksternal yang kemudian mengganggu sistem makroekonomi. Faktor itu dapat saja berupa Perang Dunia I dan II, penemuan baru teknologi yang berdampak besar pada produksi, atau penemuan sektor bisnis baru yang sangat menguntungkan. Yang jelas, faktor eksternal ini membuka peluang baru bagi sebuah investasi.

Pada 1929, faktor eksternal krisis itu adalah berakhirnya Perang Dunia I dan ditemukannya berbagai teknologi baru -telepon, minyak, ekspansi jalur kereta, machinery tools, dan standardized parts- yang mengarah pada produksi massal.

Faktor eksternal ini lalu membangkitkan "mania" dan "panik". Peluang investasi baru yang menjanjikan keuntungan besar membuat dunia usaha menjadi mania. Mereka berlomba menanamkan investasi besar di sebuah sektor. Pada 1929, sektor ini adalah industri besi dan perkapalan, tekstil, serta gula. Tetapi mania membuat sektor itu jenuh, dan justru berbalik menjadi sektor yang merugikan. Krisis dimulai. Nilai kurs uang antarnegara naik-turun dengan cepat. Harga saham juga naik-turun dalam waktu singkat. Dunia usaha dan masyarakat panik.

Berbagai krisis keuangan menjadi tanda bahwa kadang pasar bebas tidak sepenuhnya rasional. Unsur irasional manusia, seperti mania dan panik, cepat berkembang dan besar pengaruhnya

mengombang-ambingkan kondisi ekonomi. Apalagi tidak semua pelaku usaha terinformasi dengan baik atas apa yang terjadi.

Dapatkah model Kindleberger dan Minsky ini menjelaskan krisis uang di Asia pada dasawarsa 1990? Kini situasi ekonomi banyak berubah dan makin kompleks dibandingkan dengan periode terakhir studi Kindleberger pada 1987. Volume uang yang beredar antar negara sudah sedemikian cepat dan berlipat-lipat dibandingkan dengan 10 tahun lalu. Krisis di Asia ini menjadi menarik justru karena para ekonom ternama pun belum mempunyai model baru untuk menjelaskannya. Paling-paling ada tambahan satu variabel baru sebagai penjelas, yaitu moral hazard, meluasnya ketidakjujuran, dan ketertutupan dalam dunia usaha di negara yang mengalami krisis itu.

Kelemahan IMF

INTERNATIONAL Monetary Fund (IMF) kini sedang disorot. Dalam tiga bulan terakhir (1998), lembaga keuangan ini dilibatkan untuk menanggulangi krisis ekonomi di Asia. Paket bantuan IMF sudah dirumuskan, termasuk pinjaman sekitar US\$ 100 milyar kepada Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Sebagian rekomendasi ekonomi lembaga ini sudah pula dijalankan, seperti likuidasi bank. Tetapi krisis uang yang ada di Asia tidak kunjung reda, bahkan ada kemungkinan memburuk. Kini mulai dipertanyakan, seberapa jauh kompetensi IMF untuk menanggulangi krisis itu?

Di markas pusatnya di Amerika Serikat IMF justru mendapat kritik keras, tidak hanya dari kubu liberal, melainkan juga dari kaum konservatif. Dalam merespons kebijaksanaan ekonomi politik, dua kubu ini acapkali bertentangan karena bersandar pada filsafat dasar yang berbeda. Tetapi terhadap IMF, dua kubu ini memiliki ketidakpuasan yang sama, walau dengan alasan dan rekomendasi yang berlainan.

Kubu liberal diwakili Jeffrey Sachs, ekonom ternama yang mengepalai Harvard Institute for International Development. Sachs, sebagaimana kaum liberal lain, tidak keberatan dengan campur tangan lembaga publik seperti IMF untuk mengatasi krisis ekonomi, asalkan campur tangan itu dilakukan dengan perhitungan cermat dan bersandar pada kaidah keilmuan.

Sachs menyoroti kompetensi IMF dalam menganalisis dan memberikan solusi atas krisis ekonomi di Asia. Melihat laporan tahunan IMF pada 1997, tiga bulan lalu, menurut Sachs, IMF tidak sedikit pun memberikan sinyal akan terjadinya krisis. Laporan itu bahkan memuji Korea Selatan dan Thailand. Korea dinilai IMF mempunyai kinerja makroekonomi mengesankan. Pemerintah Thailand dianggap cakap membuat kebijaksanaan makro ekonomi. Ternyata negara yang dipuji IMF itu justru dilanda krisis.

Keraguan Sachs mengenai kompetensi IMF bersandar pada tiga alasan. Pertama, keterbatasan tenaga ahli di IMF. Lembaga ini memiliki sekitar 1.000 ekonom, yang bertugas memberikan arah perekonomian 75 negara berkembang dengan jumlah total penduduk 1,4 milyar. Dari 1.000 ekonom itu, mungkin hanya separuh yang benar-benar bertugas penuh. Setiap negara kira-kira dipantau tujuh ekonom. Jumlah ini, ujar Sachs, tidak memadai untuk mengetahui kondisi riil ekonomi sebuah negara yang kompleks.

Kedua, tidak ada keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan kebijaksanaan. Ini yang mengejutkan. Memang ada siaran pers yang dapat diakses publik. Tetapi siaran pers itu hanya bersifat umum, minim informasi yang detail dan teknis. Ini menyulitkan para ahli di luar IMF untuk melakukan evaluasi yang kritis atas program IMF. Kurangnya keterbukaan ini tidak merangsang perdebatan profesional yang dapat menguji apakah IMF sudah mengambil langkah yang benar.

Ketiga, berpengaruhnya faktor nonekonomi terhadap kinerja ekonomi. Krisis di Asia, menurut Sachs, tidak semata-mata disebabkan

problem fundamental ekonomi. Yang jauh lebih berpengaruh adalah panik dan histeria massa. Awal panik memang dapat disebabkan pelaku ekonomi itu sendiri, seperti salah perhitungan dan utang jangka pendek yang jatuh tempo. Tetapi jika panik itu meluas, solusi ekonomi semata tidak akan mampu mengatasinya.

Karena tiga alasan itu, IMF sangat mungkin tidak memberikan terapi maksimal atas krisis di Asia. Sachs memberikan contoh detail tentang berbagai rekomendasi ekonomi IMF terhadap Korea Selatan. Sachs kemudian menunjukkan betapa rekomendasi tersebut dapat memperburuk situasi negeri itu.

Berbeda dengan Jeffrey Sachs, kaum konservatif mengkritik IMF dengan alasan lain. James K. Glassman dari American Enterprise Institute menulis kolom di Washington Post, awal Desember ini. Menurut Glassman, sebagaimana diyakini kaum konservatif, mekanisme pasar bebas selalu lebih efisien dalam menanggulangi krisis ekonomi. Memang intervensi lembaga publik seperti IMF dalam jangka pendek seolah-olah dapat menolong, tetapi dalam jangka panjang akan memberikan efek lebih buruk.

Menurut pandangan ini, membantu sebuah pemerintah yang tidak berhasil mengurus ekonominya akan membuat negara lain tidak khawatir untuk turut tidak becus, dengan harapan akan juga dibantu IMF. Contohnya, Meksiko dan juga negara-negara di Asia. Pada 1995, Meksiko dibantu IMF sebesar US\$ 50 milyar, dan sekarang memang bertambah baik. Tetapi kasus ini membuat pemerintah di Asia juga berkeyakinan akan dibantu jika berada dalam krisis.

Jika IMF tidak membantu, mekanisme pasar bebas, menurut Glassman, akan menyelesaikan krisis itu dengan cara lebih efisien. Pasar bebas memang akan menghukum pelaku ekonomi mana pun, baik pengusaha maupun pemerintah negara bersangkutan, yang melakukan kesalahan. Tetapi dalam jangka panjang, berbagai pihak akan lebih berhati-hati membuat kebijaksanaan. Bantuan IMF hanya mengganggu bekerjanya hukum besi mekanisme pasar.

Dalam kasus Indonesia, menurut saya, seandainya harus diberikan kritik terhadap IMF, kritik itu lebih diarahkan kepada keterbatasan dan ketidakmampuannya memaksa sebuah pemerintah nasional untuk konsisten melakukan reformasi ekonomi.

Perhatian Amerika Serikat

MENGAPA Pemerintah Amerika Serikat memberikan perhatian sangat serius terhadap krisis yang terjadi di Indonesia? Tidak kurang dari Presiden Clinton yang menelepon Presiden Soeharto untuk memastikan bahwa program Dana Moneter Internasional (IMF) akan dilaksanakan secara konsisten.

Pemerintah Amerika Serikat juga mengirimkan pejabat tingginya, Lawrence Summers dan Menteri Pertahanan William Cohen, ke Jakarta. Seperti diberitakan Washington Post, ini merupakan perhatian terbesar yang pernah diberikan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia sejak 1965.

Setelah inisiatif Pemerintah Amerika Serikat, berbagai negara lain yang merupakan aliansi kuat Amerika Serikat aktif pula terlibat. Perdana Menteri Jerman, Jepang, dan Australia secara pribadi menyempatkan diri menelepon Soeharto. Pemerintah Amerika Serikat juga menggerakkan IMF untuk makin aktif dan agresif membantu Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, IMF mengirimkan

dua pejabat paling tinggi ke Jakarta, Stanley Fisher dan Michel Camdessus.

Media massa di Amerika Serikat tidak kalah semarak memberitakan krisis di Indonesia. Di halaman muka koran yang berpengaruh di Negeri Paman Sam itu misalnya *The New York Times*, *Washington Post*, dan *Financial Times* ditampilkan foto tentang ratusan ibu rumah tangga yang antre membeli bahan pokok di pasar swalayan, tentang kesepakatan baru Indonesia dan IMF mengenai revisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sebagainya.

Perhatian media massa Amerika Serikat atas krisis di Indonesia mungkin tidak istimewa. Media massa boleh jadi hanya tertarik karena ada unsur sensasional dan dramatis dalam krisis tersebut. Meski demikian, perhatian istimewa Pemerintah Amerika Serikat tentu saja berkaitan langsung dengan kepentingan nasionalnya.

Jeffrey E. Garten (1997) menulis buku menarik yang dapat menjelaskannya lebih detail. Mantan penasihat bisnis Presiden Bill Clinton ini berpendapat, dunia pasca-Perang Dingin mempunyai peta kekuatan baru. Di luar Amerika Serikat, di samping ada masyarakat Eropa dan Jepang, kini tengah muncul Big Emerging Markets (BEMs). Garten menyebutkan 10 negara yang menjadi bagian BEMs, dan Indonesia adalah salah satunya. Di samping Indonesia, negara-negara BEMs itu adalah Meksiko, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, Polandia, Turki, India, Cina, dan Korea Selatan.

Menurut Garten, 10 negara BEMs ini akan mengubah situasi politik dan ekonomi global. Tiap-tiap negara ini penting secara individual, dan jauh lebih penting lagi sebagai sebuah grup. Kondisi di negara-negara tersebut, cepat atau lambat, dapat mempengaruhi kepentingan Amerika Serikat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Negara BEMs memiliki kesamaan karakter. Mereka mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, pasar yang luas, dan potensi

sumber daya yang amat banyak. Tiap-tiap negara tersebut kini sedang mencari tempat yang pantas dalam hierarki dunia. Mereka mempunyai sentimen nasional yang tinggi, ingin lebih didengar secara politik, dan ingin memperoleh jatah kue ekonomi global yang lebih besar. Mereka tengah tumbuh, mengenyam pendidikan ala Barat, dan mengembangkan teknologi terbaru. Para pekerjanya mampu menghasilkan produk yang sekualitas dengan produk Amerika Serikat, tetapi dengan harga yang lebih murah, dengan gaji lebih rendah. Situasi ini akan mengubah distribusi investasi global pada masa mendatang.

Bagi Garten, negara BEMs tidak hanya penting secara ekonomi, melainkan juga secara politik dan keamanan, terutama akibat pengaruhnya yang besar atas negara tetangga. Brasil, misalnya, adalah pemimpin blok perdagangan Mercosur di Amerika Latin, yang mencakup Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, dan Chile. Apa pun yang terjadi di Brasil akan mempengaruhi negara-negara tersebut. Demikian halnya dengan Cina. Dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia yang mencapai 1,2 milyar jiwa, Cina terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu superpower dunia dan menjadi pusat Asia.

Indonesia dinilai Garten juga tidak kalah penting. Dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta, Indonesia adalah pusat ASEAN, yang mencakup berbagai negara, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Niscaya, kondisi di Indonesia akan mempengaruhi negara tetangganya, yang jika digabungkan berjumlah 414 juta penduduk, dengan total gross domestic product (GDP) di atas US\$ 500 milyar.

Sepuluh negara BEMs ini, termasuk Indonesia, sangat penting bagi Amerika Serikat. Dari segi ekspor perdagangan saja, menurut Garten, sekarang Amerika Serikat lebih banyak mengekspor barang dan jasa ke 10 negara BEMs ketimbang total nilai ekspor gabungan ke seluruh negara Eropa dan Jepang. Pada dekade mendatang, porsi itu dapat bertambah. Dari segi pertahanan dan ongkos keamanan, Amerika Serikat akan menghemat jutaan dolar jika setiap negara

BEMs mampu memelihara stabilitas regional di wilayah masing-masing. Ini berarti, Amerika Serikat tidak perlu lagi mengirimkan operasi militer dan melakukan tambahan kerja diplomasi untuk turut menstabilkan wilayah regional itu.

Perdagangan Amerika Serikat dengan 10 negara BEMs, dan dunia lainnya, menurut Garten, makin penting. Total ekspor Amerika Serikat sudah memberikan pekerjaan kepada 11 juta warga Amerika Serikat. Selama empat tahun belakangan, porsi ekspor Amerika Serikat meningkat tiga kali lipat lebih cepat daripada keseluruhan ekonomi Amerika Serikat. Berbagai penjualan barang dan jasa Amerika Serikat ke dunia luar menyumbang sepertiga bagian dari pertumbuhan ekonominya.

Dalam perspektif yang diuraikan di atas, kondisi ekonomi dan politik Indonesia sebagai salah satu negara BEMs sangat penting bagi kepentingan nasional Amerika Serikat. Tidak mengherankan jika Pemerintah Amerika Serikat memberikan perhatian sangat serius terhadap Indonesia, karena kemakmuran Amerika Serikat dipengaruhi kemakmuran negara-negara BEMs. Mungkin ini adalah jenis ketergantungan yang saling menguntungkan.

The Habibie Center: Mana Visinya?

Di Amerika Serikat, setelah tidak lagi menjabat, para mantan presiden memiliki kegiatan khusus. Umumnya, mereka mendirikan lembaga yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, atau kegiatan sosial. Ronald Reagan, misalnya, memiliki perpustakaan sekaligus museum buat publik. Aneka informasi penting di era pemerintahannya tersimpan di sana, untuk dijadikan kajian sejarah ataupun kebijakan. Jimmy Carter mendirikan Carter Center, untuk kegiatan yang lebih bersifat kemanusiaan dan perdamaian.

Nasib mantan Presiden Indonesia belum sebaik itu. Baik Soekarno maupun Soeharto, setelah tidak lagi menjabat, justru terisolasi dan dihujat oleh publiknya sendiri. Setelah tidak lagi menjabat, tidak ada kegiatan berarti yang mereka lakukan, kecuali merespons dan menjalani hukuman publik.

Habibie membawa tradisi baru mantan Presiden Indonesia, ia ingin tetap berkiprah, dan karena itu ia mendirikan The Habibie Center (THC). Habibie menjadikan kajian demokrasi dan hak-

hak asasi manusia (HAM) sebagai lokomotif lembaganya. Logo bertuliskan “Demokratisasi Tidak Boleh Henti” dijadikan trade mark. Legacy Habibie semasa presiden, yang meliberalkan politik Indonesia secara signifikan dan cepat, terkesankan ingin ia teruskan melalui lembaganya yang baru.

Ritual peresmian THC sudah menunjukkan kelasnya. Corazon Aquino, ratu demokrasi Asia, menjadi keynote speaker. Philippe C. Schmitter, teoretisi demokrasi kelas dunia, datang menyampaikan makalah. THC pun menerbitkan jurnal ilmiah berkala tentang demokrasi dan HAM. Presiden Republik Indonesia sendiri yang meresmikan lembaga itu.

Namun, bal yang justru paling penting belum dikemukakan oleh THC. Yaitu, visi politik dan ekonomi yang lebih operasional dan ideologis tentang demokrasi ataupun hak asasi yang ingin mereka perjuangkan. Sejauh ini, semua pembicara dari THC dan berbagai informasi yang sudah dipublikasikan masih berbicara dalam tataran yang sangat umum dan normatif.

Sebagai perbandingan, dapat diambil kasus di Amerika Serikat. Dua tradisi dapur pemikir di sana, kaum liberal dan kaum konservatif, sama-sama memperjuangkan prinsip demokrasi dan hak asasi. Namun seringkali mereka berada dalam konflik intelektual dan ideologis yang tajam, karena masing-masing memiliki visi dan platform yang berbeda. Kaum liberal mendasarkan diri pada arus filsafat humanisme. Sedangkan kaum konservatif banyak mengambil tradisi etik Protestan.

Hak asasi bagi visi liberal, termasuk hak kaum lesbian untuk menikah dengan sesama jenis, dan hak menggugurkan kandungan. Sementara itu, bagi kaum konservatif, hak kaum lesbian itu dianggap penyimpangan yang tidak berhubungan dengan hak asasi. Menggugurkan kandungan, bagi kaum konservatif, bahkan dianggap sama dengan pembunuhan. Bagi kaum konservatif, berdoa di sekolah publik merupakan bagian dari hak asasi. Sedangkan bagi

kaum lib-eral, doa di sekolah publik adalah pelanggaran atas simbol kenegaraan yang telah dipisahkan dari agama.

Demokrasi bagi kaum liberal mesti dikawinkan dengan bentuk negara kesejahteraan. Negara mesti juga berperan untuk mendistribusikan kesejahteraan, terutama ke kalangan masyarakat bawah. Orang kaya dikenai pajak yang lebih tinggi dan uangnya diberikan kepada pihak yang tidak mampu. Ekonomi yang ingin dikembangkan sejenis ekonomi kerakyatan.

Sebaliknya bagi kaum konservatif, demokrasi mesti dikawinkan dengan bentuk negara minimal. Peran negara harus sekecil mungkin, semua mekanisme ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Bagi kaum konservatif, negara kesejahteraan yang dipuja kaum liberal justru dianggap sebagai beban yang akan membangkrutkan negara.

Belum ada informasi, visi demokrasi dan hak-hak asasi bagaimana yang menjadi platform THC? Apakah THC akan menyerupai kaum liberal, atau kaum konservatif? Ataupun visi budayanya menyerupai kaum konservatif, namun visi ekonominya menyerupai kaum liberal? Bagi lembaga yang ingin melibatkan diri dalam proses penegakan demokrasi dan hak asasi, visi politik dan ekonomi yang rinci dan operasional tentang konsep itu adalah keharusan.

Tanpa visi yang rinci, THC akan lebih banyak dikendalikan oleh improvisasi individual para pejabatnya yang, mungkin akan berbeda satu sama lain. Dalam satu kurun yang panjang, tanpa visi yang rinci, kebijakan lembaga itu pun akan berkelok-kelok, tanpa satu benang merah yang kuat.

Belum adanya visi yang rinci itu, agaknya, berhubungan erat dengan proses awal kelahiran THC. Lembaga itu didirikan dan dimotori lebih oleh mereka yang sudah lama mengelompok atau memiliki ikatan keluarga, ketimbang oleh mereka yang sejak awal memiliki visi politik dan ekonomi yang sama. Akibatnya, mereka memilih mendirikan lembaganya terlebih dahulu, dan melalui waktu,

pelan-pelan merumuskan visi demokrasi dan hak-hak asasi yang rinci dan operasional.

Sangatlah ideal jika THC dapat berkembang seperti Heritage Foundation, dapur pemikir kaum konservatif yang sudah banyak mempengaruhi kebijakan publik di Amerika Serikat. Untuk berkembang seperti itu, THC mesti banyak merekrut pemikir atau tokoh grass root yang memiliki visi yang jelas dan teruji di bidang demokrasi dan hak-hak asasi.

SUMBER NASKAH

1. Bukan Sipil, Bukan Militer, *Gatra*, 20 Mei 1995
2. Agama dan Politik, *Gatra*, 4 Nopember 1995
3. Mencari Visi, *Gatra*, 23 Desember 1995
4. Tokoh 1995, *Gatra*, 6 Januari 1996
5. Kolumnis Politik, *Gatra*, 3 Februari 1996
6. Politik Megawati, *Gatra*, 2 Maret 1996
7. Uang Politik, *Gatra*, 13 April 1996
8. Prospek Demokrasi, *Gatra*, 27 Juli 1996
9. Debat Politik, *Gatra*, 26 Oktober 1996
10. Reformasi, *Gatra*, 2 Nopember 1996
11. Uang dan Politik, *Gatra*, 21 Desember 1996
12. Politik 1996, *Gatra*, 4 Januari 1997
13. Fleksibel?, *Gatra*, 17 Mei 1997
14. Konflik Kepentingan, *Gatra*, 13 Desember 1997
15. ABRI di Era Baru, *Gatra*, 29 Agustus 1998
16. Manajer Reformasi, *Gatra*, 6 Februari 1999
17. ABRI Perubahan Ideologi, *Gatra*, 24 April 1999
18. Polarisasi Konservatif Progresif, *Gatra*, 10 Juli 1999
19. Habibie Berburu Singa, Ditelan Singa, *Gatra*, 18 September 1999
20. Bondan Gunawan: Percikan Gunung Es, *Gatra*, 10 Juni 2000

21. Presidensialisme: Tapi Kabinet jatuh Bangun, *Gatra*, 23 Juni 2001
22. Megawati: Riding the Tiger, *Gatra*, 5 Januari 2002
23. Politik Brutus Wakil Presiden, *Gatra*, 18 Mei 2002
24. Gejolak Politik 2003, *Gatra*, 11 Januari 2003
25. Kontroversi Galon Presiden, *Gatra*, 19 Juli 2003
26. Warna-Warni Pilkada, *Gatra*, 30 Juli 2005
27. Perlunya Partai Dominan, *Gatra*, 13 Juni 1998
28. Partai Islam, *Gatra*, 11 Juli 1998
29. Prospek Golkar, *Gatra*, 25 Juli 1998
30. Koalisi Partai: Dua Ganjalan Besar, 5 Juni 1999
31. Kemenangan Partai Terbuka, *Gatra*, 19 Juni 1999
32. Etika warga: Bukan Urusan MPR, *Gatra*, 17 Nopember 2001
33. Anggota DPR: The Untouchables, *Gatra*, 12 Januari 2002
34. Guncangan Internal PDIP, *Gatra*, 13 Juli 2002
35. Anggota DPR, Kerja Sambilan, *Gatra*, 15 Maret 2003
36. Pertanggungjawaban Presiden, *Gatra*, 16 Agustus 2003
37. Potret Politik SBY-JK, *Gatra*, 5 Februari 2005
38. Kerusuhan, *Gatra*, 31 Mei 1997
39. Ekspor Demokrasi, *Gatra*, 28 Juni 1997
40. Politik Orang Kaya, *Gatra*, 4 Oktober 1997
41. Primordialisme Amerika, *Gatra*, 25 Oktober 1997
42. Kepentingan Publik, *Gatra*, 8 Nopember 1997

43. Jiang Zemin dan Amerika Serikat, *Gatra*, 22 Nopember 1997
44. Krisis Asia, *Gatra*, 27 Desember 1997
45. Kelemahan IMF, *Gatra*, 10 Januari 1998
46. Perhatian Amerika Serikat, *Gatra*, 31 Januari 1998
47. The Habibie Center: Mana Visinya, *Gatra*, 3 Juni 2000

DAFTAR BUKU DENNY J.A

1. DEMOCRATIZATION FROM BELOW PROTEST EVENTS AND REGIME CHANGE IN INDONESIA Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
2. THE ROLE OF GOVERNMENT IN ECONOMY AND BUSINESS, Penerbit LKIS, 2006
3. VARIOUS TOPICS IN COMPARATIVE POLITICS, Penerbit LKIS 2006
4. DEMOKRASI INDONESIA: VISI DAN PRAKTEK (Kumpulan Tulisan di Harian Kompas), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
5. JALAN PANJANG REFORMASI (Kumpulan Tulisan di Suara Pembaruan), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
6. MELEWATI PERUBAHAN Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia (Kumpulan Tulisan di Jawa Pos dan Indopos), Penerbit LKIS, 2006
7. POLITIK YANG MENCARI BENTUK (Kumpulan Kolom di Majalah Gatra), Penerbit LKIS, 2006
8. MEMBANGUN DEMOKRASI SEHARI-HARI (Kumpulan Tulisan di Media Indonesia), Penerbit, LKIS 2006
9. PARTAI POLITIK PUN BERGUGURAN (Kumpulan Tulisan di Republika), Penerbit LKIS 2006
10. MANUVER ELIT, KONFLIK DAN KONSERVATISME POLITIK (Kumpulan Tulisan di Koran Tempo), Penerbit LKIS 2006
11. PARA POLITISI DAN LAGUNYA (Kumpulan Tulisan di Rakyat Merdeka dan Harian Seputar Indonesia), Penerbit LKIS 2006
12. MEMPERKUAT PILAR KELIMA, Pemilu 2004 Dalam Temuan Survei LSI, Penerbit LKIS 2006

13. VISI INDONESIA BARU SETELAH REFORMASI 1998, Penerbit LKIS 2006
14. CATATAN POLITIK, Penerbit LKIS 2006
15. JATUHNYA SOEHARTO DAN TRANSISI DEMOKRASI, Penerbit LKIS 2006
16. MEMBACA ISU POLITIK, Penerbit LKIS 2006
17. GERAKAN MAHASISWA DAN POLITIK KAUM MUDA ERA 80-AN, Penerbit LKIS 2006
18. ELECTION WATCH : MERETAS JALAN DEMOKRASI (Talkshow Denny J.A di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
19. PARLIAMENT WATCH: EKSPERIMEN DEMOKRASI: DILEMA INDONESIA (Talkshow Denny J.A. di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
20. NAPAK TILAS REFORMASI POLITIK INDONESIA (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006
21. JEJAK-JEJAK PEMILU 2004 (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006